

# Bab I

## Pengantar Analisis Potensi Wilayah dan Daerah

### 1.1 Pendahuluan

Membaca buku ini, mahasiswa dan para pembaca diharapkan dapat lebih mengenal dan memahami potensi yang dimiliki setiap wilayah dan daerah yang ada di Indonesia, selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar melakukan perencanaan dan pengembangan wilayah dan daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Lebih jauh lagi dapat meningkatkan daya saing daerah dengan cara mengeksploitasi potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

### 1.2 Pengantar Analisis Potensi Wilayah dan Daerah

Dalam membahas analisis potensi wilayah dan daerah tidak terlepas dari pembahasan ruang. Apabila kita menyebut kata ruang, apa yang terbayang dalam benak kita. Apakah ruang itu abstrak atau riil. Kalau abstrak apakah hanya ada dalam khayalan atau bisa lebih konkrit dari itu, sedangkan kalau riil maka ruang itu mempunyai batas yang jelas dan ciri-ciri yang berbeda antara ruang yang satu dengan ruang lainnya. Ruang bisa berarti sangat sempit tetapi juga bisa juga sangat luas tak terhingga. Kita bisa

membayangkan bahwa ruang hanya sesuatu yang hampa tetapi memakan tempat atau yang terbayang adalah isi yang ada pada ruang tersebut, yang tentunya berbeda antara satu ruang dengan ruang lainnya. Semua benda membutuhkan ruang sehingga salah satu ciri yang membedakan benda adalah luas ruang yang dibutuhkan oleh benda itu. Dengan demikian, ruang adalah tempat untuk suatu benda/kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan suatu benda/kegiatan. Dalam hal ini kata “tempat” adalah berdimensi tiga dan kata benda/kegiatan berarti benda/kegiatan apa saja tanpa batas. Kegunaan ruang menjadi terbatas apabila diberi ciri/karakter tambahan. Misalnya, ruang kelas yang berarti berisi benda ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelas, ruang tamu berisi benda ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan menerima tamu, dan lain-lain. Tanpa ruang maka suatu benda/kegiatan tidak mungkin berada di sana. Dalam bahasa Inggris, padanan kata ruang adalah *space* (spasial). Menurut Kamus Webster (Tarigan, 2009), *space* dapat diartikan dengan berbagai cara, di sini dikutip dua cara :

- a. *The three dimensional continuous expanse extending in all directions and containing all matter : variously thought of as boundless or intermediately finite.*
- b. *Area or room sufficient for or allotted to something.*

Kamus Random House (Tarigan, 2009) menulis, *space: a particular extent of surface*. Dengan demikian, secara umum ruang diartikan dengan tempat berdimensi tiga tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat menampung atau ditujukan untuk menampung benda apa saja. Sebetulnya ada tiga kata yang sering bisa dipertukarkan, yaitu ruang, tempat dan lokasi. Di antara ketiga kata ini, ruang adalah yang bersifat umum, tidak terikat dengan isi maupun lokasi. Tempat seringkali dikaitkan dengan keberadaan suatu benda/kegiatan yang telah ada/sering ada di situ. Lokasi terkait dengan posisi apabila di permukaan bumi bisa ditentukan bujur dan lintangnya. Lokasi sering terkait dengan pemberian nama atau karakter atas sesuatu tempat sehingga dapat dibedakan lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Karena ruang bisa menyangkut apa saja yang membutuhkan tempat, maka harus ada batasan tentang ruang yang

ingin dibicarakan. Dalam hal ini yang ingin dibicarakan adalah ruang sebagai wilayah.

Sementara itu, pengertian ruang menurut Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan pengertian ruang tersebut, maka ada ruang untuk kegiatan manusia melakukan kegiatannya (budidaya) dan ada ruang untuk kelangsungan hidup makhluk lain yang harus dipelihara, dijaga, dan bahkan dilindungi agar kehidupannya biasa tetap berlangsung (ruang yang harus dilindungi).

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk ada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, dan yang ada di atas permukaan bumi. Karena kita membicarakan ruang dalam kaitannya dengan kepentingan manusia, perlu dibuat batasan bahwa ruang pada permukaan bumi itu adalah sejauh manusia masih bisa menjangkaunya atau masih berguna bagi manusia.

Sementara itu, untuk menganalisis potensi wilayah dan daerah dengan baik, perlu dilihat terlebih dahulu definisi masing-masing istilah tersebut. Analisis dapat didefinisikan sebagai upaya mengkaji suatu fenomena atau gejala secara ilmiah. Sedangkan potensi diartikan sebagai kekayaan/sumberdaya baik bersifat fisik maupun non fisik yang belum diolah. Potensi yang sudah diolah merupakan kemampuan dan kekuatan. Seperti telah dijelaskan di atas, maka pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Pembatasan dari aspek administratif berkaitan dengan peraturan pemerintah yang mengatur batas-batas wilayah atau daerah dari sisi kewenangan untuk memerintah di daerah tersebut, contohnya adalah wilayah administratif kabupaten, kota, atau provinsi. Sedangkan wilayah dari aspek fungsional adalah upaya manusia untuk membatasi

wilayah berdasarkan kepentingan manusia, seperti munculnya berbagai kawasan, seperti kawasan lindung atau kawasan budidaya, serta kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi tertentu. Secara umum, ada dua kawasan utama: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, meliputi kawasan-kawasan: *perdesaan, agropolitan, perkotaan, metropolitan, megapolitan, strategis*, dan sebagainya. Secara lengkap, pembahasan kawasan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya pada modul ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat didefinisikan bahwa potensi wilayah adalah segala sesuatu yang dimiliki (Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia) suatu wilayah baik yang telah dimobilisir maupun yang belum dimobilisir yang dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan dan atau wilayah lain. Sedangkan Analisis Potensi Wilayah dapat diartikan sebagai mengkaji secara ilmiah rincian semua kekayaan/sumberdaya baik fisik dan non fisik pada area (wilayah tertentu) sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu.

Analisis potensi wilayah dan daerah diperlukan, mengingat beberapa alasan berikut ini.

1. Perencanaan pembangunan wilayah dan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dasar pemahaman wilayah dan daerah, termasuk potensinya;
2. Perencanaan pembangunan wilayah dan daerah harus dapat memilah potensi terbarukan dan tidak terbarukan sebagai modal pembangunan;
3. "*Resources*" ketersediaannya terbatas, maka perlu digunakan dengan bijak, sehingga perlu analisis yang memadai untuk dapat mengelolanya dengan baik.

Mengingat betapa pentingnya analisis potensi wilayah dan daerah dilakukan, selanjutnya dapat dijabarkan tujuan analisis ini dilakukan, yaitu:

1. Untuk dapat mengenali potensi dan kekuatan serta kelemahan wilayah dan daerah dalam pembangunan wilayah dan daerah;
2. Untuk memberikan dasar yang logis dan valid bagi perencanaan pembangunan wilayah dan daerah yang akan dilakukan;
3. Untuk dapat mengidentifikasi modal dasar wilayah dan daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan

### 1.3 Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan Analisis Potensi Wilayah dan Daerah?
2. Mengapa analisis potensi wilayah dan daerah penting dilakukan? Dalam hal apa saja?
3. Apa yang dimaksud dengan kawasan? Sebutkan pembagian kawasan secara umum dan berikan contohnya.

### 1.3 Kesimpulan

Analisis Potensi Wilayah adalah mengkaji secara ilmiah rincian semua kekayaan/sumberdaya baik fisik dan non fisik pada area (wilayah tertentu) sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal dan memahami potensi yang dimiliki setiap wilayah dan daerah yang ada di Indonesia, selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar melakukan perencanaan dan pengembangan wilayah dan daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Lebih jauh lagi dapat meningkatkan daya saing daerah dengan cara mengeksploitasi potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

### 1.5 Test Formatif

1. Pengertian ruang bisa berarti sangat sempit tetapi juga bisa juga

- sangat luas tak terhingga. Yang dimaksud dengan ruang dalam arti sempit adalah:
- a. Ruang yang berupa suatu benda-benda atau kegiatan-kegiatan
  - b. Ruang yang dibatasi dengan adanya benda-benda atau kegiatan-kegiatan
  - c. Ruang yang dibatasi dengan koordinat geografis
  - d. Tidak ada yang benar
2. Pengertian ruang menurut Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi:
- a. ruang darat, ruang laut, dan ruang udara
  - b. ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya
  - c. ruang darat dan ruang laut
  - d. ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan tempat tinggal manusia
3. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek-aspek:
- a. Lindung dan budidaya
  - b. Administratif dan fungsional
  - c. Subjektif dan objektif
  - d. Perkotaan dan perdesaan
4. Berikut ini dapat dikategorikan sebagai pentingnya melakukan analisis terhadap potensi wilayah dan daerah, kecuali:
- a. Perencanaan pembangunan wilayah dan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dasar pemahaman wilayah dan daerah, termasuk potensinya
  - b. Perencanaan pembangunan wilayah dan daerah harus dapat memilah potensi terbarukan dan tidak terbarukan sebagai modal pembangunan

- c. Potensi wilayah dan daerah perlu dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup
  - d. “*Resources*” ketersediaannya terbatas, maka perlu digunakan dengan bijak, sehingga perlu analisis yang memadai untuk dapat mengelolanya dengan baik
5. Berikut ini adalah contoh kawasan budidaya, kecuali:
- a. Agropolitan
  - b. Metropolitan
  - c. Perkotaan
  - d. Kawasan hutan

#### 1.6 Kunci Jawaban Test Formatif Bab I

- 1. b
- 2. b
- 3. b
- 4. c
- 5. d

# Bab II

## Kedudukan dan Lingkup Analisis Potensi Wilayah dan Daerah

### **2.1 Pendahuluan**

Bab ini akan membahas kedudukan Analisis Potensi Wilayah dan Daerah sehubungan dengan pembangunan dan proses perencanaan pembangunan di daerah. Untuk itu, perlu dijabarkan terlebih dahulu pengertian perencanaan pembangunan daerah, baik dalam pengertian sempit atau pun pengertian luas. Setelah itu dapat terlihat lingkup analisis potensi wilayah dan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembahasan selanjutnya banyak mengemukakan landasan-landasan normatif tentang perencanaan daerah, disamping beberapa landasan teoritis yang relevan.

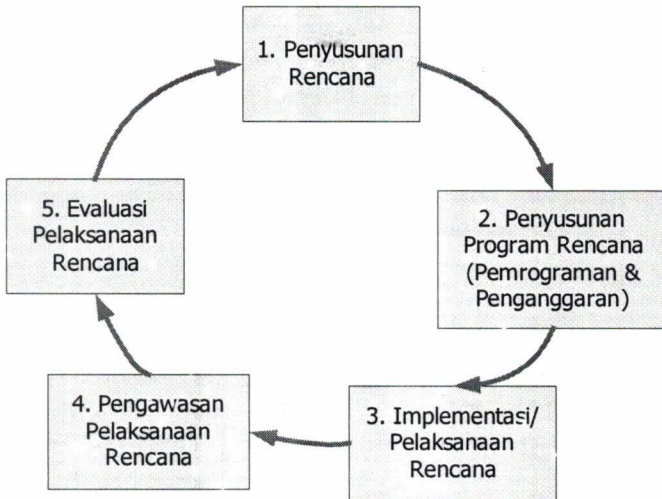
### **2.2 Kedudukan dan Lingkup Analisis Potensi Wilayah dan Daerah**

#### **2.2.1 Kedudukan Analisis Potensi Wilayah dan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan**

Secara teoritis, proses perencanaan pembangunan nasional atau pun daerah, dapat dirinci ke dalam tahapan-tahapan berikut ini.

1. Penyusunan Rencana
2. Penyusunan Program Rencana (Pemrograman dan Penganggaran)
3. Implementasi/Pelaksanaan Rencana
4. Pengawasan Pelaksanaan Rencana
5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Tahapan-tahapan di atas membentuk sebuah siklus, seperti digambarkan berikut ini.



Gambar 1  
Siklus Perencanaan

Berdasarkan landasan normatif yang ada juga, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 8, disebutkan tentang tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Perbedaan yang terlihat adalah pada landasan normatif tahap implementasi tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi secara implisit muncul pada tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Jadi pada dasarnya proses perencanaan melalui tahapan yang sama, baik berdasarkan landasan teoritis atau pun landasan normatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah pasal 4 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua Rencana Pembangunan Daerah tersebut disusun berdasarkan tahapan proses berikut ini.

1. Penyusunan rancangan awal;
2. Pelaksanaan Musrenbang;
3. Perumusan rancangan akhir; dan
4. Penetapan rencana.

Sebelum menentukan kedudukan analisis potensi wilayah dan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sebaiknya dilihat terlebih dahulu pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-

agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dilihat bahwa analisis potensi wilayah dan daerah berada pada proses dengan pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode ilmiah untuk menentukan kekuatan-kekuatan daerah yang akan mendukung kelancaran proses pembangunan.

Hal ini sejalan dengan proses penyusunan rencana pembangunan secara teoritis, yang terdiri atas:

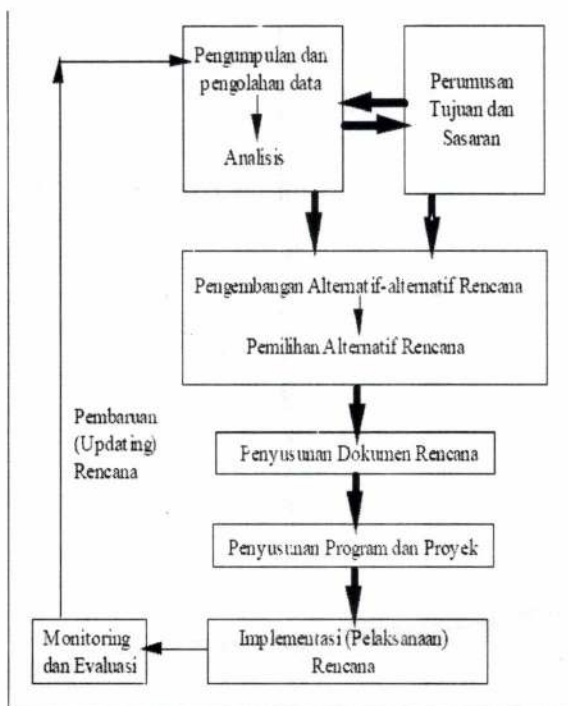
1. Tinjauan Keadaan (mencakup potensi, masalah, hambatan, tantangan, dan *opportunity* yang ada)
2. Perkiraan Keadaan masa datang
3. Penetapan Tujuan dan Strategi
4. Identifikasi alternatif Rencana & Konsekuensinya
5. Pemilihan alternatif terbaik atas alternatif rencana
6. Persetujuan Rencana

Kedudukan analisis potensi wilayah dan daerah jelas akan mendukung tahap pertama, Tinjauan Keadaan. Dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat dalam analisis potensi wilayah dan daerah maka potensi, masalah, hambatan, tantangan, dan *opportunity* yang ada dapat dipetakan dengan baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di daerah masing-masing. Akibatnya,

pembangunan yang dilaksanakan akan tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan semua pihak.

Dalam proses umum perencanaan, analisis potensi wilayah dan daerah berada pada tahap pengumpulan dan pengolahan data, berikut proses lanjutannya yaitu analisis data. Proses perencanaan secara umum dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, diantaranya adalah:

1. Penentuan Basis Ekonomi
2. Analisis Struktur Tenaga Kerja
3. Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja
4. Analisis Peluang dan kendala pembangunan



Gambar 2  
Proses Umum Perencanaan

Tingkat ketelitian dalam tahapan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sangat menentukan keberhasilan tahapan selanjutnya. Kesalahan dalam tahap awal akan menyebabkan kurang sempurnanya dokumen perencanaan. Tahapan lengkap dalam proses perencanaan bisa dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Tahapan Perencanaan

Tahap	Tugas
I	<p><b>Pengumpulan dan Analisis Data</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan Basis Ekonomi</li> <li>• Analisis Struktur Tenaga Kerja</li> <li>• Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja</li> <li>• Analisis Peluang dan kendala pembangunan</li> </ul>
II	<p><b>Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan Tujuan dan Kriteria</li> <li>• Penentuan Kemungkinan-kemungkinan Tindakan</li> <li>• Penyusunan Target Strategi</li> </ul>
III	<p><b>Pemilihan Proyek-Proyek Pembangunan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Proyek Potensial</li> <li>• Penilaian Kelayakan Proyek</li> </ul>
IV	<p><b>Pembuatan Rencana Tindakan'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prapenilaian Hasil Proyek</li> <li>• Pengembangan Input Proyek</li> <li>• Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan</li> <li>• Identifikasi Struktur Proyek</li> </ul>

V	<p><b>Penentuan Rincian Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara Rinci</li> <li>• Penyiapan Rencana Bisnis (<i>Business Plan</i>)</li> <li>• Pengembangan, Pemantauan, dan Pengevaluasian Program</li> </ul>
VI	<p><b>Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan Implementasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan Jadwal Implementasi Rencana Proyek</li> <li>• Penyusunan rencana Program Pembangunan Secara Keseluruhan</li> <li>• Targeting dan Marketing Aset-aset Masyarakat</li> <li>• Pemasaran Kebutuhan Keuangan &amp; Upaya Pembiayaan</li> </ul>

Kedudukan Analisis Potensi Wilayah dan Daerah dalam tata cara penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah secara normatif dapat dilihat pada pasal 29-39 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Dalam pasal 29 tentang Pengumpulan Data dan Informasi serta Rencana Tata Ruang, disebutkan dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. Data dan informasi yang dibutuhkan terdiri atas:

1. penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
3. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
4. keuangan daerah;
5. potensi sumber daya daerah;
6. produk hukum daerah;
7. kependudukan;
8. informasi dasar kewilayahan; dan

- informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terlihat bahwa potensi sumber daya daerah merupakan informasi yang penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu perlu dianalisis dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat supaya hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya dalam pasal 32 disebutkan tentang Pengolahan Sumber Data, mencakup:

- analisis daerah
- identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah
- perumusan masalah pembangunan daerah;
- penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
- penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

## 2.2.2 Lingkup Analisis Potensi Wilayah dan Daerah

Berdasarkan kedudukan Analisis Potensi Wilayah dan Daerah yang sudah dikemukakan pada bagian terdahulu, selanjutnya dapat dijabarkan ruang lingkup atau cakupan Analisis Potensi Wilayah dan Daerah, seperti berikut ini.

- Mencakup seluruh aspek potensi dalam perencanaan yang komprehensif (*rational comprehensive planning*), berartin mencakup fisik dan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (*ipoleksosbudhankam*).
- Mencakup analisis potensi dan kekuatan wilayah dan daerah.
- Mencakup rentang waktu masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa datang

Dalam '*Rational Comprehensive Planning*', maka semua data dan informasi terkait dengan wilayah/daerah dan penyelenggaraan pemerintahan (pembangunan) baik internal wilayah/daerah maupun dalam lingkup lebih luas (eksternal) harus dikumpulkan, diolah, dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan teknokratiknya. Oleh karena

itu cakupan analisis potensi wilayah dan daerah, juga meliputi:

1. Aspek Fisik/Lingkungan (alami dan buatan)
2. Aspek Sosial budaya dan Kependudukan
3. Aspek Ekonomi dan Keuangan
4. Aspek Ideologi dan Politik
5. Aspek Pertahanan dan Keamanan
6. Aspek Kebijakan (Hukum dan Peraturan Perundangan yang telah ada)
7. Aspek Kelembagaan

### 2.3 Latihan

1. Bagaimana kedudukan Analisis Potensi Wilayah dan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah? Jelaskan dengan contoh.
2. Apa saja cakupan Analisis Potensi Wilayah dan Daerah?
3. Jelaskan proses perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

### 2.4 Kesimpulan

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, analisis potensi wilayah dan daerah berada pada proses dengan pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode ilmiah untuk menentukan kekuatan-kekuatan daerah yang akan mendukung kelancaran proses pembangunan.

Dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat dalam analisis potensi wilayah dan daerah maka potensi, masalah, hambatan, tantangan, dan *opportunity* yang ada dapat dipetakan dengan baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di daerah masing-masing. Akibatnya, pembangunan yang dilaksanakan akan tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan semua pihak.

## 2.5 Test Formatif

1. Kedudukan analisis potensi wilayah dan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk dalam pendekatan:
  - a. Politik
  - b. Teknokratik
  - c. Partisipatif
  - d. *Top down* dan *Bottom up*
2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam:
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
  - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
  - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005
3. Berikut ini termasuk cakupan dalam analisis potensi wilayah dan daerah, kecuali:
  - a. Aspek fisik dan lingkungan
  - b. Aspek sosial dan budaya
  - c. Aspek ekonomi dan kelembagaan
  - d. Aspek metodologi
4. Pengumpulan Data dan Informasi serta Rencana Tata Ruang diatur dalam:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009
5. Berikut ini termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Daerah, kecuali:
  - a. Rencana Pembangunan Nasional
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

## 2.6 Kunci Jawaban Test Formatif Bab II

1. b
2. d
3. b
4. a

# Bab III

## Detail Aspek Potensi dan Kekuatan Dalam Analisis Potensi Wilayah dan Daerah

### 3.1 Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas beberapa hal yang terkait dengan:  
Aspek potensi dan kekuatan apa saja yang perlu diperhatikan dalam analisis potensi wilayah dan daerah?  
Apa saja detail pada setiap aspek tersebut?  
Apa saja yang perlu diperhatikan dan apa manfaatnya dalam analisis potensi wilayah dan daerah?

### 3.2 Detail Aspek Fisik, Aspek Ekonomi dan Keuangan, serta Aspek Sosial Budaya dan Kependudukan

#### 3.2.1 Detail Aspek Fisik

Sumber daya fisik terdiri atas yang alami (sumber daya alam) dan yang buatan (sumber daya buatan) serta kondisi fisik lingkungan. Keberadaan sumber daya fisik tersebut mempunyai peranan penting; Pertama, efisiensi dan produktivitas dapat dipenuhi dengan adanya alokasi sumber daya fisik wilayah dilakukan secara tepat, sehingga peruntukan berbagai

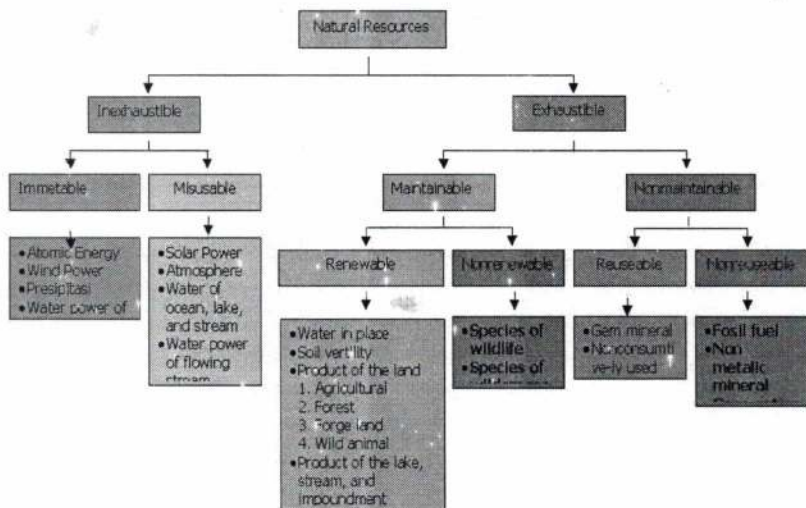
kawasan dapat sesuai dengan kemampuan dan kesesuaiannya. Oleh karena itu, peruntukan kawasan budidaya pertanian misalnya, haruslah dilakukan pada lokasi yang tepat (teori lokasi), serta harus ditunjang oleh kemampuan dan kesesuaian fisik lahan yang cukup.

Kedua, unsur fisik dapat memenuhi tujuan keadilan dan keberimbangan hanya jika alokasi sumberdaya fisik dapat bermanfaat bagi wilayah yang bersangkutan dan memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitarnya. Dalam hal ini, disparitas antar wilayah dapat dikurangi bila sumberdaya yang terdapat pada wilayah yang tertinggal dapat dialokasikan dan memberikan manfaat pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, fenomena seperti *backwash effect* dan lingkaran perangkat kemiskinan (*the vicious circle*) dapat dihindari oleh wilayah yang tertinggal.

Ketiga, tujuan untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*), hanya mungkin dicapai bila alokasi sumber daya fisik wilayah dilakukan dengan cara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, unsur fisik penataan ruang harus diperlakukan sesuai dengan daya dukung, daya tampung dan potensi wilayah.

Secara umum sumber daya alam diklasifikasikan atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (sumber daya stok) bersifat *exhaustable* seperti logam, minyak bumi, mineral, dan gas adalah sumber daya dengan *supply* terbatas. Eksploitasi sumber daya ini akan menurunkan cadangan dan ketersediaanya.

Sumber daya yang dapat diperbaharui atau disebut juga sebagai “*flow*”, yakni sumber daya yang *supply*-nya dapat mengalami regenerasi secara terus menerus baik secara biologi maupun non biologi. Sumber daya alam ini benar-benar *supply*-nya tidak terbatas (*infinite*) dan ada juga yang bersifat dapat diperbaharui sepanjang laju pemanfaatannya tidak melampaui titik kritis pemanfaatan seperti sumber daya alam dapat diperbaharui melalui proses biologi (ikan, hutan, dan lain-lain) dan non biologi (air dari mata air, situ, dan lain-lain). Pengelompokan sumber daya alam beserta karakteristiknya secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

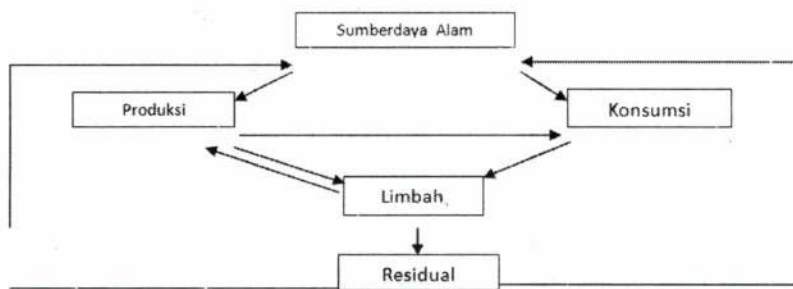


Gambar 1. Pengelompokan sumberdaya alam berdasarkan karakteristiknya (diadaptasi dari Owen, 1980)

Owen, 1980 mendefinikan sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sumber daya alam merupakan modal penting dalam menggerakkan roda pembangunan di suatu daerah baik dalam konteks negara, provinsi ataupun kabupaten/kota. Aspek pemanfaatan sumberdaya alam merupakan suatu yang sangat strategis dalam menentukan jumlah penerimaan atau tingkat kontribusinya dalam pembentukan modal pembangunan. Pengelolaan SDA dalam konteks Otda adalah Power sharing kewenangan pengelolaan SDA antara Pemerintah dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut UU 32 Tahun 2004 (Pasal 4, 5, dan 6): Pemda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah, dan pemerintah daerah lainnya dalam hal wewenang, keuangan, sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya dan dilaksanakan secara adil dan selaras yang meliputi:

1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya dan pelesarian
2. Bagi hasil atas pemanfaatan SDA dan SD lainnya
3. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan

Setiap proses produksi dan konsumsi sumber daya alam selalu menghasilkan limbah (*waste*) (Ingat hukum Termodinamika). Sebagian limbah produksi/konsumsi dapat menjadi sumber daya yang dapat dipakai kembali sebagai input dan masuk ke proses produksi (industri) atau kembali ke lingkungan alam. Namun ada juga limbah masih memerlukan upaya pendauran menjadi residual yang dapat didaur secara alamiah. Berbagai sumber daya alam tersebut bersifat melekat dengan posisi/lokasi di atas permukaan bumi. Oleh karena itu, inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam memerlukan pendekatan geografik serta memerlukan pendekatan dan analisis spasial. Dalam pengelolaan sumber daya alam, pendekatan pembangunan yang berkelanjutan memenuhi tiga kriteria keberlanjutan sebagaimana dideskripsikan dalam Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 4 Keterkaitan antar Sumber daya Alam dengan Aktivitas Ekonomi (Anwar, 2005 dalam Rustiadi, 2007)

Tabel 2 Kriteria Pemanfaatan Sumberdaya Alam Berkelanjutan

Komponen	Kriteria Pemanfaatan Berkelanjutan
Sumberdaya alam dapat diperbaharui	Laju ekstraksi/pemanenan tidak melebihi laju regenerasinya

Sumberdaya alam tidak dapat diperbaharui	Laju ekstraksi/pemanenan tidak melebihi laju kemampuan produksi substitusinya
Limbah	Laju produksi tidak melebihi laju pemanfaatan kembali oleh aktivitas (industri) lain dan laju pendaurannya

Sumber : Rustiadi, dkk. (2007)

Sumber daya buatan, pemanfaatannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dan sosiokultur. Salah satu infrastruktur yang terpenting adalah jalan. Nilai suatu lahan dalam infrastruktur tidak semata-mata ditentukan oleh kesuburan (*fertility*) dan *sustainability/ capability* tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor lokasi terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas. Sosiokultur adalah kemampuan masyarakat untuk mengorganisasikan diri pada organisasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Infrastruktur itu sendiri dapat dipilah menjadi tiga bagian besar (Basri, Faisal dan Haris Munandar, 2009) sebagai berikut :

1. Infrastruktur keras fisik (*physical hard infrastructure*) yang meliputi jalan raya, rel kereta api, bandara, dermaga dan pelabuhan, bendungan dan saluran irigasi, dan sebagainya.
2. Infrastruktur keras nonfisik (*nonphysical hard infrastructure*) yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran; pasokan listrik; jaringan telekomunikasi (telepon, internet); dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel, dan gas berikut jaringan pipa distribusinya.
3. Infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) atau yang bisa disebut kerangka institusional (kelembagaan) yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait khususnya pemerintah.

Ketiga jenis infrastruktur tersebut memainkan peranan vital karena ketiga-tiganya merupakan wahana sekaligus instrumen guna menggerakkan “mesin” perekonomian nasional. Infrastruktur merupakan penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan. Tersedianya fasilitas infrastruktur akan merangsang pembangunan di suatu daerah atau negara. Semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang hendak digerakkan, semakin banyak fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai, dapat dipastikan suatu kegiatan ekonomi atau pembangunan pada umumnya akan berjalan tersendat-sendat. Dalam beberapa literatur kita telah mengetahui betapa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas positif tinggi. Artinya, pengadaan suatu infrastruktur akan sangat mempengaruhi secara positif (mendukung) perkembangan berbagai sektor ekonomi lainnya. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur jelas mengakibatkan pemanfaatan potensi dan sumberdaya ekonomi menjadi tidak optimal, bahkan sulit berkembang hingga ke taraf yang diharapkan.

Selanjutnya Rustiadi, dkk., (2007) mengatakan sosiokultural dapat terlihat dengan adanya kelembagaan (*institution*), sebagai aturan main (*rule of game*) dan organisasi, yang berperan dalam mengatur penggunaan/ alokasi sumberdaya secara efisien, sumberdaya merata dan berkelanjutan (*sustainable*). Langkah awal guna mencapai efisiensi dalam alokasi sumberdaya yang optimal adalah perlunya pembagian pekerjaan (*division of labour*), sehingga setiap pekerja dapat bekerja secara profesional dengan produktivitas yang tinggi. Pembagian pekerjaan selanjutnya akan mengarah pada spesialisasi ekonomi, sedangkan spesialisasi yang berlanjut akan mengarah kepada peningkatan efisiensi dengan produktivitas yang semakin tinggi. Sebagai hasil dari pembagian pekerjaan dan spesialisasi pada sistem ekonomi maju sering mengarah pada keadaan di mana orang-orang menjadi hampir tidak mampu lagi berdiri sendiri. Dalam arti, mereka tidak dapat menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk kehidupannya (konsumsinya) sehingga pemenuhan kebutuhannya diperoleh dari orang/pihak lainnya yang berspesialisasi melalui pertukaran (*exchange* atau *trade*) yang dalam ekonomi disebut transaksi ekonomi.

Barang dan jasa tersebut akan dapat dipertukarkan apabila hak-hak (*property right*) dapat ditegaskan, sehingga dapat ditransfer kepada pihak lain. Agar transaksi ekonomi tersebut dapat berlangsung, perlu adanya koordinasi antar berbagai pihak dalam sistem ekonomi, yang sekaligus juga mencakup "aturan representasi" dari pihak-pihak yang berkoordinasi tersebut. Pada dasarnya ada dua bentuk koordinasi utama yaitu koordinasi untuk keperluan : (1) transaksi melalui sistem pasar, di mana harga-harga menjadi panduan dalam mengkoordinasikan alokasi sumberdaya tersebut; (2) transaksi tersebut dilakukan dalam sistem organisasi-organisasi yang berhirarkhi di luar sistem pasar (*extra market institution*), di mana wewenang kekuasaan (*power*)/otoritas berperan sebagai koordinasi dalam mengatur alokasi sumberdaya tersebut.

Beberapa permasalahan yang mungkin muncul pada pemanfaatan SDA sehubungan dengan implementasi otonomi daerah:

1. *Timbulnya daerah miskin dan kaya* sebagai konsekuensi penyebaran SDA yang tidak merata. Secara nasional kemungkinan akan menimbulkan ketimpangan kesejahteraan
2. *Konflik pemanfaatan sumberdaya lintas kabupaten/kota*, misal pemanfaatan sungai atau daerah tangkapan hujan di daerah hulu dapat berdampak negatif terhadap kabupaten di daerah hilir, hutan dan mineral yang terdapat dalam satu hamparan yang berbatasan antar kabupaten
3. *Konflik pemanfaatan sumber daya open access (laut)*, misalnya nelayan yang berasal dari satu kabupaten tidak boleh mengambil ikan di wilayah perairan kabupaten lain.
4. *Pengurusan SDA*, dalam kaedah ekologi suatu ekosistem yang kuat cenderung mengeksploitasi ekosistem yang lemah.
5. *Potensi sumber daya manusia*, kualitas SDM antara lain ditentukan dengan penguasaan ilmu, teknologi dan informasi. Ini kan berpengaruh terhadap produktivitas efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan SDA

Salah satu aspek fisik yang perlu diperhatikan adalah potensi sumberdaya hutan. Hutan tropis di Indonesia merupakan urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Rakyat Kongo. Tipe-tipe hutan di Indonesia memiliki kekayaan hayati yang unik yaitu:

1. Hutan *Dipterocarpaceae* dataran rendah di Sumatra dan Kalimantan
2. Hutan *Monsun* musiman dan padang savana di Nusa Tenggara
3. Hutan *Non-Dipterocarpaceae* dataran rendah dan kawasan Alpin di Papua

Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia diperkirakan 4.25 juta hektar pada tahun 1990 an. Indonesia juga menjadi rumah bagi beberapa mamalia yang paling disayangi di dunia seperti harimau, badak, orang utan dan gajah.

### 3.2.2 Detail Aspek Ekonomi dan Keuangan

Mengingat keterbatasan/kelangkaan (*scarcity*) dan ketidakmerataan sumber daya, maka setiap potensi sumber daya yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sumber daya harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam teori ekonomi, prinsip efisiensi dibagi menjadi dua jenis yaitu: efisiensi produksi dan efisiensi alokasi. Efisiensi produksi dicapai dengan meminimalkan biaya untuk menghasilkan satu unit output. Sedangkan efisiensi alokasi adalah suatu kondisi dimana dalam suatu produksi output, sumber daya yang dialokasikan adalah maksimum dan harga produksi barang sama dengan biaya marginalnya. Dalam proses perencanaan dan pengembangan wilayah, aspek ekonomi berperan penting untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien baik dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang.

Struktur ekonomi di suatu daerah dapat menjadi indikator daya saing daerah. Daya saing yang tinggi dapat dijadikan dasar oleh para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Berarti daya saing yang tinggi akan menyebabkan daya tarik investasi yang tinggi pula. Tabel 3 berikut ini memperlihatkan distribusi investasi di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2005.

**Tabel 3.1**  
**Distribusi Investasi di Indonesia menurut Provinsi**  
**Tahun 2005 (dalam %)**

No	Provinsi	Proporsi Investasi	No	Provinsi	Proporsi Investasi
1	DKI Jakarta	27.91%	18	Papua	1.05%
2	Jawa Timur	12.74%	19	Nusa Tenggara Barat	1.01%
3	Jawa Barat	11.21%	20	Bali	0.78%
4	Jawa Tengah	6.51%	21	Sulawesi Utara	0.63%
5	Riau	5.31%	22	Kalimantan Selatan	0.60%
6	Sumatera Utara	4.01%	23	Nusa Tenggara Timur	0.57%
7	Kepulauan Riau	3.78%	24	Sulawesi Tengah	0.57%
8	Kalimantan Timur	3.78%	25	Sulawesi Tenggara	0.53%
9	Banten	3.68%	26	Jambi	0.51%
10	Sumatera Selatan	2.88%	27	Irian Jaya Barat	0.44%
11	Sulawesi Selatan	1.93%	28	Kep. Bangka Belitung	0.38%
12	Kalimantan Barat	1.91%	29	Gorontalo	0.19%
13	Sumatera Barat	1.48%	30	Bengkulu	0.15%
14	DI. Yogyakarta	1.36%	31	Sulawesi Barat	0.08%
15	Lampung	1.34%	32	Maluku	0.03%
16	Kalimantan Tengah	1.33%	33	Maluku Utara	0.02%
17	Nanggroe Aceh Darussalam	1.29%			

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik

\*) Investasi menggunakan data Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000.

**Tabel 3**

Peningkatan daya saing daerah dapat dilakukan dengan cara memberdayakan potensi daerah semaksimal mungkin. Setiap komunitas/daerah/wilayah mempunyai potensi lokal yang unik yang dapat membantu atau menghambat pengembangan ekonominya. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal diyakini dapat meningkatkan daya saing daerah, dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya tarik investasi. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini:

1. Bertambah banyaknya lapangan usaha;
2. Meningkatkan nilai PDRB;
3. Bertambahnya sumber-sumber pendanaan pembangunan, tidak

- tergantung dari sumber pendanaan dari pemerintah pusat;
4. Bertambahnya sektor-sektor produktif di daerah tersebut, sehingga masyarakat tidak lari ke luar daerah untuk mengembangkan usahanya;
  5. Bertambahnya perbankan/lembaga keuangan yang beroperasi di daerah tersebut;
  6. Bertambahnya dunia usaha sejalan dengan bertambahnya sektor-sektor produktif yang berkembang di daerah tersebut;
  7. Berkembangnya ekonomi sumber daya alam, artinya semakin banyak sektor produktif yang mengelola sumber daya alam secara langsung (sektor primer)

Pada sisi lain di era globalisasi, (*global economy competitiveness*), peningkatan daya saing daerah menjadi krusial, mengingat keberhasilan (kelangsungan hidup) komunitas ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan yang cepat dan meningkatnya kompetisi pasar. Setiap daerah perlu mengidentifikasi dan menganalisis potensi wilayah terutama berbasis keunggulan lokal. Hal ini disebabkan oleh:

1. Setiap komunitas/daerah/wilayah mempunyai potensi lokal yang unik yang dapat membantu atau menghambat pengembangan ekonominya.
2. Untuk membangun daya saing tiap komunitas/daerah diperlukan pemahaman dan tindakan yang didasarkan atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar daerahnya bisa menarik kegiatan bisnis, kehadiran pekerja dan lembaga yang menunjang

Selanjutnya, bagaimana agar daya saing bisa dioptimalkan? Indikator-indikator apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing tersebut? *World Economic Forum* (WEF), lembaga dunia yang secara rutin menerbitkan "*Global Competitiveness Report*" mendefinisikan daya saing nasional sebagai "kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan". Sedangkan daya saing yang menjadi fokus kita adalah daya saing yang

berbasis potensi daerah. Kata kuncinya terletak pada, “bagaimana suatu daerah melakukan penggalan atas sumber-sumber yang dimilikinya, sehingga daerah tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi unggul, terlebih lagi jika disertai inovasi dalam menggarap pasar global”.

Daya saing dapat diukur dengan beberapa indikator :

1. *Struktur Ekonomi*: komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta tingkat investasi asing atau domestic. Beberapa teknik analisis yang biasa digunakan *location quotient (LQ)*, *shift-share analysis*, *economic base analysis*, *regional income indicators* dst.
2. *Potensi Wilayah* : yang *non tradeable* seperti lokasi, prasarana, sumber daya alam, amenity, biaya hidup dan bisnis, citra daerah.
3. *Sumber daya manusia* : kualitas SDM yang mendukung kegiatan ekonomi
4. *Kelembagaan* : konsistensi kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah, perilaku masyarakat serta budaya yang mendukung produktivitas.

Pada laporannya yang diliris pada tahun 2006-2007, WEF merangking Indonesia pada urutan ke-50 dari 125 negara yang disurvei oleh organisasi tersebut. Bila dilihat perbandingannya, kemajuan rangkin ini secara umum bisa dikatakan terus mengalami kenaikan sejak 4 tahun terakhir:

1. 2006 rangking 50 dari 125 negara
2. 2005 rangking 74 dari 117 negara
3. 2004 rangking 69 dari 104 negara
4. 2003 rangking 72 dari 101 negara

Bila dibanding dengan Malaysia dan Thailand, peringkat daya saing Indonesia masih berada di bawah kedua negara tersebut. Ini jelas merupakan tantangan bagi bangsa ini untuk terus meningkatkan daya saing tersebut. Ini jelas akan berakibat seberapa besar kemajuan yang bisa diraih di masa depan.

### 3.2.3 Detail Aspek Sosial Budaya dan Kependudukan

Salah satu aspek sosial budaya yang paling penting adalah kependudukan. Aspek kependudukan dan interaksi kependudukan (mobilitas penduduk) merupakan informasi yang mendasar terkait dengan perkembangan suatu wilayah. Perkembangan suatu wilayah berimplikasi terhadap pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Faktor kependudukan juga dijadikan sebagai indikator yang efektif dalam pembangunan suatu wilayah, seperti penduduk terkait dengan perkembangan ekonomi suatu wilayah dan migrasi ke luar maupun dalam wilayah. Di sisi lain faktor penduduk juga seringkali menjadi faktor utama dari berbagai masalah dalam pembangunan, terutama berkaitan dengan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di banyak kasus, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan pada kenyataannya banyak terkait dengan tekanan penduduk. Informasi tentang proyeksi kependudukan menjadi penting, terutama terkait dengan memproyeksi tingkat degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Data kependudukan juga sering dijadikan sebagai patokan kinerja pembangunan suatu wilayah. Seperti pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dinilai efektif jika pertumbuhannya berada di atas pertumbuhan penduduk, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi dinilai kurang efektif jika berada di bawah pertumbuhan penduduk.

Secara agregat struktur demografi suatu wilayah dapat mempengaruhi pembangunan wilayah, seperti struktur usia penduduk dapat berimplikasi terhadap pola dan struktur konsumsi, produktivitas, ketersediaan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Struktur kependudukan berdasarkan status seperti penduduk kawasan perdesaan, perkotaan, hingga suku/golongan, asli/pendatang, dan berdasarkan kesejahteraan seperti miskin/kaya, serta berdasarkan pendidikan dan gender akan menentukan produktivitas, hingga preferensi sosial masyarakat di suatu wilayah. Dengan demikian maka informasi kependudukan dan aspek-aspeknya menjadi penting untuk diperhatikan, karena dapat berimplikasi pada pembangunan.

Berbicara aspek kependudukan sama halnya dengan membahas aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia, indikator operasionalnya antara lain pengetahuan, ketrampilan, kompetensi, etos kerja/sosial,

pendapatan/produktivitas, kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI). Sumberdaya manusia merupakan fokus tujuan dari semua kegiatan yang ada; pembangunan ekonomi, pembangunan fisik dan sebagainya yang telah dilaksanakan, tanpa adanya kesiapan dari manusianya sendiri maka pembangunan tersebut akan berakhir sia-sia. Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choice*). Pada konsep itu manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formal modal manusia (*human capital formation*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Perhatian pembangunan bukan hanya pada upaya untuk meningkatkan kapabilitas manusia (melalui intervensi masyarakat) saja, tetapi juga pada upaya-upaya pemanfaatan kapabilitas tersebut secara penuh.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak hanya empat hal tersebut. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi, dan sosial, sampai kepada kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, serta menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jaminan hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia mempunyai dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan. Sisi yang lain adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi tidak seimbang maka hasilnya adalah masyarakat yang frustrasi.

Pembangunan menghendaki terjadinya peningkatan kualitas hidup penduduk yang lebih baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk

yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Azas pemerataan merupakan salah satu prinsip pembangunan manusia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dilakukan pemerintah melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang program pembangunannya dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Dengan demikian, pembangunan manusia mencakup dimensi yang sangat luas. Pengukuran pencapaian hasil pembangunan manusia di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal. UNDP sejak 1990 menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu ialah (1) tingkat kesehatan yang tercermin dengan umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup; (2) berpengetahuan dan berketranampilan, serta (3) akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Ada juga yang mengembangkan konsep pembangunan manusia yang memperhatikan produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan dan ditambah pilihan-pilihan seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai pada kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jaminan hak-hak azasi manusia. Jauh lebih luas daripada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumberdaya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan

tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Namun demikian, pembangunan ekonomi atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitasnya dan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat timbal-balik. Artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia. Sukar dibayangkan ada negara yang dapat menjalankan pembangunan manusia yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pendekatan SDM merupakan penegasan adanya alasan ekonomis (*economic reasons*) dari pembangunan manusia yang keabsahannya terus ditunjang oleh bukti-bukti empiris. Akan tetapi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang. Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat sedang tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan. Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua macam jalur. Jalur pertama melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya

pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa.

Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga, hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini penting, karena sesungguhnya, penciptaan lapangan kerja merupakan “jembatan utama” yang mengkaitkan antara keduanya (UNDP. 1996:87).

Melalui upaya pembangunan manusia, kemampuan dasar dan ketrampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha, dan manajer diharapkan akan meningkat. Mereka yang bekerja akan terlibat dalam proses produksi di mana hal itu ditentukan oleh banyaknya kesempatan kerja yang tersedia (*employment*) sebagai hasil pembangunan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang melakukan proses produksi menentukan besarnya volume Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDRB.

Semakin tinggi pendidikan, kesehatan, dan keamanan pekerja dianggap mencerminkan kualitas modal manusia yang baik. Apabila kualitas modal manusia semakin baik, maka berpengaruh pada peningkatan produktivitas pekerja, semakin tinggi kualitas modal manusia akan semakin tinggi pula tingkat produksi. Jumlah dan kualitas pekerja yang meningkat dan jika terlibat sebagai faktor produksi dengan menghasilkan output yang baik akan mempercepat peningkatan pembangunan.

Program Pembangunan PBB (UNDP, *United Nations Development Program*) yang fokus pada aspek-aspek “pembangunan manusia” (*human development*) membuat klasifikasi yang mencakup variabel-variabel nonekonomi seperti usia harapan hidup, tingkat kematian bayi, dan capaian pendidikan, di samping variabel-variabel pokok ekonomi seperti angka pendapatan per kapita. Maka disusunlah indeks baru yang disebut **Indeks Pembangunan Manusia (HDI, *Human Development Index*)**. IPM ini mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup,

pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan ukuran komprehensif dari pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara/daerah dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidupnya diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli (PPP, *Purchasing power parity*) dari mata uang domestik di masing-masing negara guna lebih mencerminkan besar kecilnya biaya hidup dan juga untuk menyesuaikan dengan fakta menyusutnya utilitas marginal pendapatan di atas tingkat pendapatan dunia. Nilai indeks berkisar antara 0 – 1 di mana 0 (prestasi pembangunan manusia terendah) dan satu (kinerja pembangunan manusia tertinggi) (Todaro, 1998).

IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal sebagai berikut (TKPK, 2007; Basri, Faisal dan Haris Munandar, 2009) :

1. Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara/daerah, bukannya pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu daerah/negara: bagaimana dua daerah/negara yang pendapatan per kapita sama dapat memiliki IPM yang berbeda. Contohnya: tingkat pendapatan per kapita antara Cina (US\$ 370) dan Indonesia (US\$ 610), namun harapan hidup dan angka melek huruf antara keduanya sangat berbeda, sehingga Cina memperoleh nilai IPM yang lebih tinggi (0,644) daripada Indonesia (0,586) (laporan UNDP 1994). Laporan UNDP tahun 1999, Indonesia berada di urutan 107 (tahun 1997 urutan 77) dari 174 negara di dunia termasuk kelompok menengah dalam

melaksanakan pembangunan manusia. Singapura urutan 22, Brunei Darussalam 25, dan Filipina di 77, termasuk kelompok pembangunan manusia tinggi. Tahun 2007 peringkat Indonesia belum beranjak, IPM Indonesia 0,728 (peringkat 107) dan Cina 0,777 (peringkat 81).

- Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi, di antara gender, kesukuan dan kelompok sosial-ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

DIMENSI	Umur panjang dan sehat	Pengetahuan		Kehidupan yang layak
INDIKATOR	Angka harapan hidup pada saat lahir ↓	Angka melek huruf (Lit) ↘	Rata-rata lama sekolah (MYS) ↘	Pengeluran (kapita riil yang disesuaikan, PPP rupiah) ↓
		Indeks Lit	Indeks MYS	
INDEKS / DIMENSI	Indeks harapan hidup	Indeks Pendidikan ↘ ↓ ↙		Indeks Pendapatan

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Gambar 5 Perhitungan IPM

(Sumber : Buku Panduan Konggres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia, Menko Kesra dan TKPK, 2006 dalam TKPK 2007)

Indikator pembangunan lain dikenalkan oleh Morris D. Morris (Todaro, 1998) yang berhasil merumuskan sebuah indeks gabungan baru yang disebut **Indeks Kualitas Hidup Fisik** (PQLI, *Physical Quality of Life Index*). Ada tiga indikator yaitu, tingkat harapan hidup pada satu tahun, tingkat kematian bayi dan tingkat melek huruf yang digunakan untuk membentuk indeks gabungan yang relatif sederhana. Berdasarkan setiap indikator tersebut, kinerja setiap negara diperingkatkan pada skala antara 1 hingga 100, di mana angka 1 melambangkan kinerja terburuk sedangkan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk kinerja harapan hidup, batas atas (*upper limit*) seratus ditetapkan 77 tahun (ini telah dicapai Swedia di tahun 1973), sedangkan batas bawah (*lower limit*) satu ditetapkan 28 tahun (ini merupakan tingkat harapan hidup terendah yang dapat ditemukan di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan bawah itulah, tingkat harapan hidup setiap negara diperingkatkan dengan skor satu hingga seratus. Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki harapan hidup 52 tahun atau pada pertengahan antara batas atas 77 tahun dan bawah 28 tahun, maka negara tersebut akan memperoleh skor 50. Demikian juga untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya adalah 9/1.000 kelahiran (ini juga dicapai Swedia di tahun 1973), sedangkan batas bawahnya adalah 229/1.000 kelahiran (Gabon, 1950). Adapun tingkat melek huruf yang diukur berdasarkan angka presentase satu hingga seratus, dapat dihitung secara langsung. Jika kinerja suatu negara dalam tingkat harapan hidup, tingkat kematian bayi dan tingkat melek huruf telah diperingkatkan pada skala antara satu hingga seratus, maka indeks gabungan untuk negara tersebut dapat dihitung dengan merata-ratakan ketiga skor peringkatnya.

Selain aspek-aspek kesehatan, pendidikan, serta daya beli penduduk, aspek-aspek yang tidak kalah penting dalam aspek social budaya adalah:

1. agama dengan keanekaragamannya serta prasarana peribadatan yang ada;
2. adat istiadat, yaitu adat istiadat yang ada serta adat istiadat yang masih berlaku;
3. hukum, yaitu hukum-hukum yang berlaku dalam menata masyarakat serta respon masyarakat terhadap hukum yang ada.

4. politik, yaitu kehidupan berdemokrasi, kesadaran masyarakat dalam bernegara, saluran-saluran penyampaian aspirasi, serta tokoh-tokoh politik;
5. teknologi, yaitu tingkat pemfungsian teknologi, pusat-pusat informasi teknologi, serta dampak penerapan teknologi;
6. informasi dengan efektifitas dan efisiensi sistem informasi yang ada;
7. kamtibmas, yaitu kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban serta ratio petugas keamanan dengan masyarakat.

### 3.2.4 Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*)? Sebutkan masing-masing contohnya.
2. "Sumber daya manusia merupakan fokus tujuan dari semua kegiatan yang ada". Apa maksud dari pernyataan tersebut? Sebutkan indikator operasional dari sumber daya manusia.
3. Apa yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI, *Human Development Index*)? Bagaimana cara mengukurnya? Apa kegunaan dari nilai IPM bagi pemerintah?
4. Apa yang dimaksud dengan Indeks Kualitas Hidup Fisik (PQLI, *Physical Quality of Life Index*)? Sebutkan indikator-indikatornya.

### 3.2.5 Kesimpulan

Sumber daya fisik meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang di setiap wilayah/daerah tidak seragam adanya. Begitu juga sumberdaya manusia yang indikatornya seperti pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etos kerja/sosial, pendapatan/produktivitas, kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) di setiap daerah/wilayah tidak seragam kualitas dan kuantitasnya. Sumberdaya produksi merupakan input dari produksi (output) yang berupa modal dan tenaga kerja yang keberadaannya tidak seragam di setiap wilayah/daerah.

Modal yang dimaksud seperti mesin-mesin, pabrik, jalan raya, mobil dan lainnya serta tingkat teknologi yang tepat, seperti pengetahuan, rekayasa, manajemen, kewirausahaan dan lainnya. Lingkungan juga merupakan sumber daya modal karena dapat menampung limbah semua kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, jadi perlu dijaga keberadaannya baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

### 3.2.6 Test Formatif

1. Berikut ini adalah tiga indikator untuk mengukur **Indeks Kualitas Hidup Fisik** (PQLI, *Physical Quality of Life Index*), kecuali...
  - a. Kekayaan, kesejahteraan, dan keamanan
  - b. Tingkat harapan hidup pada satu tahun, tingkat kematian bayi dan tingkat melek huruf
  - c. Tingkat kematian bayi, tingkat kematian ibu, dan tingkat kesejahteraan masyarakat
  - d. Tingkat melek huruf, jumlah wajib belajar, dan tingkat harapan hidup
2. Berdasarkan data Tahun 2007, peringkat IPM Indonesia dibandingkan dengan Cina adalah...
  - a. Lebih tinggi
  - b. Lebih rendah
  - c. Sama saja
  - d. Tidak dapat ditentukan
3. Berikut ini merupakan bagian dari Infrastruktur, kecuali...
  - a. Infrastruktur keras fisik (*physical hard infrastructure*)
  - b. Infrastruktur keras nonfisik (*nonphysical hard infrastructure*)
  - c. Infrastruktur lunak (*soft infrastructure*)
  - d. Infrastruktur keras (*hard infrastructure*)
4. Berikut ini adalah kegunaan diketahuinya nilai IPM di suatu negara atau daerah

- a. Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia
  - b. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan suatu negara atau daerah
  - c. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah
  - d. Untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam pembangunan
5. Berikut ini yang tidak termasuk faktor penentu daya saing suatu daerah adalah:
- a. Potensi daerah dan struktur ekonomi
  - b. Sumber daya manusia dan kelembagaan
  - c. Sumber daya manusia dan fasilitas
  - d. Potensi daerah dan sumber daya manusia

### **3.3 Detail Aspek Ideologi dan Politik, Aspek Pertahanan dan Keamanan, Aspek Kebijakan, serta Aspek Kelembagaan**

#### **3.3.1 Detail Aspek Ideologi dan Politik**

Aspek ideologi dan politik secara nyata mempengaruhi sistem perekonomian di sebuah negara. Penjelasan berikut ini membuktikan perubahan sistem perekonomian di beberapa negara dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh ideologi dan politik yang dianut oleh negara-negara tersebut. Sepanjang sejarah perekonomian dunia, dikenal berbagai sistem ekonomi dengan segala keunggulan dan keterbatasannya. Setiap sistem ekonomi telah menemukan euforia pada masing-masing masanya secara silih berganti. Ketika sistem yang satu mulai "sakit", datanglah sistem yang lain menggantikan dengan ide-ide dan konsep-konsep yang baru seolah memberikan solusi yang mujarab.

Namun demikian, tidak selalu sistem yang baru dapat menggantikan sistem yang mulai sakit-sakitan itu. Ada kalanya hanya berguna untuk melengkapi sistem yang lama. Akan tetapi, perubahan sistem ekonomi

seperti dalam kasus Uni Soviet adalah contoh nyata betapa sebuah negara membutuhkan perombakan sistem secara menyeluruh. Uni Soviet yang dulu berbentuk negara komunis, sekarang berubah menjadi negara yang lebih liberal, termasuk di bidang ekonomi. Hal tersebut menimbulkan banyak anggapan bahwa sistem komunis dan sosialis cenderung tidak cocok untuk diterapkan saat ini.

Hal inilah yang terjadi di Indonesia saat sistem ekonomi Pancasila diperkenalkan. Banyak pro dan kontra yang muncul bersamaan dengan diperkenalkan sistem ekonomi tersebut oleh Prof. Mubyarto dan Dr. Boediono karena banyak kalangan beranggapan bahwa sistem ekonomi tersebut hanyalah “utopia” semata sehingga sulit diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Sistem perkonomian yang baru biasanya harus menghadapi berbagai macam ujian untuk bisa dibuktikan dalam kehidupan. Pada saat Ronald Coase memperkenalkan sistem ekonomi berdasar institusi, banyak pihak yang mencibir keberhasilan sistem tersebut. Akan tetapi, setelah munculnya krisis keuangan akibat lemahnya institusi yang membatasi para pelaku ekonomi, teori Coase saat ini banyak diterima oleh banyak pihak. Hal itu dibuktikan dengan anugerah Nobel kepada Oliver Williamson yang terus memperjuangkan penggunaan institusi untuk mengontrol kegiatan ekonomi.

Hanya saja para pemikir yang kritis mulai mempertanyakan: ke mana arah sistem ekonomi kita nantinya? GBHN di era Soeharto sudah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak menganut *free-fight liberalism* atau pun etatisme. Sistem Ekonomi Pancasila versi Mubyarto dan Emil Salim, serta isu demokrasi ekonomi yang sempat ramai beberapa waktu lalu, tampaknya baru pada taraf “normatif” dan belum mampu menjawab dinamika perekonomian Indonesia yang dinilai banyak pihak semakin terbuka dan “ke kanan”.

Betulkah perekonomian Indonesia semakin condong ke kanan? Apakah gelombang privatisasi yang melanda dunia juga menerpa kita? Konsekuensi terbaik privatisasi adalah dapat menciptakan persaingan, efisiensi dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi terburuknya berupa pergeseran monopoli milik negara yang tidak responsif dengan monopoli swasta yang lebih responsif terhadap

lingkungan. Oleh karena itu, kendati arus privacisasi juga melanda Indonesia, tampaknya pemerintah Indonesia menyadari benar akan konsekuensi terburuk ini. Ini pula agaknya yang menyebabkan pemerintah baru sejak 1988 memberlakukan upaya privatisasi secara bertahap, yakni dengan dikeluarkannya Inpres No. 5 (Oktober 1988), tiga keputusan Menteri Keuangan (740/KMK.00/1989; 741/KMK.99/1989; 1232/KMK.013/1989), dan Surat Edaran S-648/MK013/1990). Dimulai dengan menetapkan standar kesehatan BUMN yang mencakup profitabilitas, likuiditas, solvabilitas untuk merangking 212 BUMN dengan kategori sangat sehat, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Kriteria kesehatan finansial dan macam barang dan jasa yang disediakan oleh BUMN, digunakan sebagai kriteria untuk menentukan pilihan untuk merestrukturisasi BUMN, yaitu: mengubah status hukum, menjual saham di bursa saham, penggantian saham secara langsung, konsolidasi dan merger, menjual perusahaan kepada pihak ketiga, melakukan patungan atau likuidasi. Selain itu, dilakukan juga berbagai upaya perbaikan manajemen BUMN selama 1989-90. Selama periode bonanza minyak (1973-81) dan periode awal jatuhnya harga minyak (1982-85) reorganisasi dan restrukturisasi BUMN belum menjadi prioritas, bahkan tidak pernah muncul sebagai agenda pembicaraan.

Kalau pun ada yang mendengungkan pengembangan koperasi dan usaha kecil, barangkali hanya akan dianggap sebagai upaya membuat agar perekonomian Indonesia berwajah lebih “merakyat”. Tanpa bermaksud mengecilkan arti dan “kemajuan” koperasi yang ada saat ini, tampaknya “beban berat” koperasi mengemban amanat sebagai soko guru ekonomi perlu ditinjau kembali. Menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian memang sebuah ide mulia, sekaligus menjadi masalah besar karena yang terakhir ini selalu diartikan perlunya campur tangan pemerintah dalam pengembangan koperasi sehingga muacullah gerakan *koperatisasi*: koperasi sarat dengan pesan-pesan konstitusional dan misi departemental. Koperasi dalam konteks ekonomi Indonesia modern haruslah koperasi yang modern pula; ia harus dinamis sedinamis perekonomian itu sendiri. Karena persaingan adalah kata kunci dalam ekonomi global, mau tidak mau, ide koperasi sebagai organisasi ekonomi berwatak bisnis (tidak lagi berwatak sosial) sungguh layak untuk dipertimbangkan.

Pertumbuhan yang pesat di negara-negara “Macan Asia” serta semakin terbukanya negara Eropa Timur, Cina, dan bekas Uni Soviet, mau tidak mau memperkuat keyakinan bahwa jalan kapitalisme disambut sebagai resep yang mujarab. Repelita V, yang menandai berakhirnya pembangunan jangka panjang I, telah berakhir (1993/1994), dan kita mulai memasuki era pembangunan jangka II, yang tentu penuh dinamika dan tantangan baru. Pertanyaannya kini, manakah yang akan kita pilih: semakin menuju privatisasi ataukah menempuh *free-market socialism*? Kalau benar “ekstrem kiri” sudah mati, jangan-jangan yang selama ini mengaku berada “di tengah” dianggap menjadi “kiri”. Ini yang masih tanda tanya, dan patut direnungkan.

### 3.3.2 Detail Aspek Pertahanan dan Keamanan

Berbicara tentang aspek pertahanan dan keamanan dalam konteks potensi daerah tidak bisa lepas dari upaya pemerintah, baik pusat atau pun daerah dalam memberikan rasa aman terhadap warganya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak adanya tindakan kriminalitas yang dihadapi oleh masyarakat juga merupakan hal penting dalam aspek keamanan. Makna keamanan manusia terdiri dari tujuh dimensi yang saling terkait (Siregar, 2008), yaitu:

1. keamanan ekonomi,
2. keamanan pangan,
3. keamanan kesehatan,
4. keamanan lingkungan,
5. keamanan individu,
6. keamanan komunitas,
7. keamanan politik.

Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan, berada dekat dengan masyarakat, dan membaur bersama. Inilah paradigma yang dikenal sebagai *Community Policing*. Model *Community Policing* dapat dianalogikan sebagai polisi dapat berpindah tempat secara fleksibel, yaitu:

1. Posisi selaras antara polisi dengan warga komuniti dalam membangun kemitraan, dimana polisi bersama-sama dengan warga dalam upaya mencari solusi dalam menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.
2. Posisi di bawah, adalah polisi berada di bawah masyarakat yaitu polisi dapat memahami keebutuhan rasa aman warga komuniti yang dilayaninya.
3. Posisi polisi di atas yaitu polisi dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Syarat utama dari paradigma baru ini adalah terjalannya kedekatan hubungan antara polisi dengan masyarakat. Tepatnya kemitraan yang harmonis dan upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan rasa aman warga masyarakat.

Aspek pertahanan dan keamanan akan sangat terasa dampaknya di daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga. Ancaman keamanan yang sering muncul diantaranya: *transnasional crime, illegal fishing, illegal logging, women and child trades (trafficking), illegal imigran*, peredaran narkotika, pintu masuk terorisme, perdagangan senjata, serta konflik sosial dan politik.

Ancaman ini sangat berbahaya dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Begitu juga potensi daerah yang sangat kaya belum dapat diawasi dan dikembangkan sepenuhnya.

Secara umum permasalahan yang perlu diantisipasi dan harus dicegah antara lain adalah konflik kepentingan dengan negara lain, yang bersumber dari masalah *Sea Lines of Comulation* atau garis-garis penghubung laut, perbatasan laut, dan pemanfaatan sumber daya laut. Konflik kepentingan ini sewaktu-waktu dapat menimbulkan benturan, terutama di wilayah perairan perbatasan.

Permasalahan selanjutnya adalah meningkatnya berbagai kerawanan dan gangguan keamanan di laut, antara lain perompakan, teror dan sabotase objek vital di laut, pemanfaatan sumber daya laut terutama ikan

secara ilegal, penyelundupan, penelitian ilmiah tanpa ijin, dan perusakan ekosistem lingkungan laut.

Keamanan yang diharapkan dari pihak Kepolisian adalah mengantisipasi masuknya teroris dan narkoba yang berasal dari negara Malaysia, TKI yang akan berangkat ke Malaysia dan kembali ke Indonesia, serta *illegal logging*.

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan hal yang penting guna mempertahankan keutuhan NKRI. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Keadaan ini dapat merupakan suatu kegiatan yang memberikan nilai berarti bagi bangsa dan negara. Kegiatan tersebut adalah:

1. mempunyai nilai penting bagi kedaulatan negara
2. memiliki kemampuan untuk mendorong agar terjadi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
3. mempunyai kemampuan untuk membangun jaringan kerja dengan wilayah lainnya dan negara tetangga.
4. memberikan kontribusi terhadap pertahanan dan keamanan baik skala regional maupun nasional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di wilayah perbatasan diantaranya adalah:

1. Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok dan jarak satu patok dengan patok lainnya saling berjauhan.
2. Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak sumber daya alam kita diambil oleh orang asing, misalnya kasus *illegal logging*.
3. Daerah perbatasan memiliki posisi strategis yang berdampak terhadap pertahanan dan keamanan mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, dimana banyak terjadi pelintas batas baik dari dan ke Indonesia.
4. Kemiskinan akibat keterisolasian daerah menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke negara tetangga dengan alasan untuk memperbaiki kehidupan, mengingat perekonomian di negara tetangga lebih baik daripada di Indonesia.

5. Kesenjangan sarana dan prasarana antara kedua wilayah negara menjadi pemicu orientasi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan isu strategis dalam mengelola wilayah perbatasan negara, dapat dikemukakan beberapa permasalahan penting untuk dikaji, diantaranya adalah:

1. Tidak jelasnya garis batas laut dan darat, akibatnya sering menimbulkan konflik. Kerugian selalu ada di pihak Indonesia dan kondisi ini langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
2. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil kehutanan dan kekayaan laut. Untuk menjaga daerah perbatasan bukan hal mudah, baik di daratan atau pun di lautan, mengingat luasnya daerah yang dijaga dan petugas keamanan yang terbatas.

Masalah lain yang seringkali muncul adalah pembalakan liar. Pembalakan liar tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan tetapi juga dilakukan oleh para pemegang ijin sah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembalakan liar merupakan salah satu penyebab degradasi hutan tropis di Kalimantan Timur yang saat ini sudah kehilangan 331.258 ha atau 71,2% dalam periode 2 tahun. Pembalakan liar salah satunya dapat ditekan oleh keseriusan penegak hukum dan komitmen pemerintah untuk memberantasnya, tetapi itu tidak cukup mengingat luasnya perbatasan dan personil keamanan terbatas jumlahnya dan fasilitas pendukung kurang memadai. Dewasa ini sedang marak-maraknya *illegal logging* melalui laut.

Masalah lain adalah *illegal fishing* dengan modus menggunakan nelayan Indonesia yang dimodali oleh cukong asing agar cukong asing tersebut bebas dari jerat hukum. Modus ini perlu mendapat perhatian serius agar cukong asing tidak seenaknya membiayai nelayan Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Disamping itu juga nelayan Indonesia harus diberikan informasi tentang pelanggaran hukum yang dilakukannya agar pekerjaan itu tidak dilakukan lagi dan pembelajaran bagi kelompok nelayan yang lain.

Nasib para tenaga Indonesia (TKI) ilegal di Negara tetangga sangat memprihatinkan, padahal mereka adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dari berbagai bahaya yang mengancamnya; kelaparan, ketakutan, dan penganiayaan. Sebenarnya TKI ini memiliki kesadaran untuk meringankan beban yang sedang dialami oleh negaranya. Para TKI tahu bahwa pengangguran di negara yang sudah mengalami kesusahan hanya akan menjadi beban negara, dan akibat dari pengangguran akan berdampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi. Pihak yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya adalah pemerintah sebagai pihak yang memiliki kebijakan, scenario, rencana, dan kepentingan, tetapi terkesan bahwa pemerintah kurang tanggap terhadap persoalan TKI ini.

Beberapa solusi yang diduga dapat memperbaiki ketahanan nasional diantaranya adalah:

1. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat, agar masyarakat mempunyai pekerjaan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
3. Batas Negara harus dievaluasi kembali agar patok tanda batas negara jelas posisinya.
4. Penduduk perbatasan, khususnya pemuda, setiap enam bulan sekali secara bergiliran diberi penataran tentang ketahanan nasional.
5. Menambah pos penjagaan di daerah perbatasan.
6. Masyarakat nelayan harus diberikan informasi tentang batas-batas laut Negara Indonesia, bila ada kapal asing masuk ke perairan Indonesia tanpa ijin, para nelayan dapat memberikan informasi kepada Polisi Air atau Angkatan Laut.
7. Membangun rumah sakit sangat sederhana (RSSS) untuk rakyat miskin yang tinggal di perbatasan yang tempat tinggalnya tepat bersebelahan dengan batas garis negara.
8. Bila memungkinkan masyarakat perbatasan diberikan latihan dasar-dasar militer, khususnya kepada pemuda.

Sedangkan untuk meningkatkan keamanan di daerah perbatasan, bisa ditempuh cara-cara berikut ini.

1. Perlu meningkatkan patrol di daerah perbatasan, baik di laut maupun di darat.
2. Meningkatkan anggaran untuk menunjang biaya patrol baik BBM maupun biaya penunjang lainnya.
3. Menerapkan *Community Policing* bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan.
4. Menerapkan *Community Policing* bagi masyarakat nelayan agar dapat mengantisipasi kejahatan yang ada di pantai maupun di laut.
5. Setiap pengusaha tambak ikan dan udang sebaiknya diberikan identifikasi terhadap produksi ikan atau udang, agar diketahui bila terjadi perampokan terhadap ikan maupun udang yang dimilikinya.
6. Untuk mengatasi konflik antar etnis atau agama perlu dibentuk forum kerja sama antar etnis atau agama.
7. Perlu diinformasikan dengan polisi negara tetangga bahwa sering terjadi perdagangan narkoba yang bersumber dari negara tetangga.
8. Perlu mewaspada: jaringan teroris yang besar kemungkinan masuk dari daerah perbatasan.
9. Perlu bekerjasama dengan nelayan sebagai informan dalam mengatasi perdagangan senjata dan bahan peledak di tepi pantai maupun di tengah laut.
10. Perlu dilakukan rajia terhadap TKI yang datang maupun yang berangkat ke negara tetangga.

### 3.3.3 Detail Aspek Kebijakan

Landasan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran dituangkan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tercantum dalam:

- UU 25/2004 Pasal 4 Ayat 2  
RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden..... yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- UU 25/2004 Pasal 4 ayat 3  
RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional ..... rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- UU 17/2003 Pasal 12 Ayat 2  
Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Landasan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran secara rinci dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) dua menteri serta peraturan presiden untuk implementasinya. Secara rinci bisa dilihat sebagai berikut:

1. SEB Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas (0142/M.PPN/06/2009) dan Menteri Keuangan (SE 1848/MK/2009) tgl 19 Juni 2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, yang memuat :
  - Buku I : Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan
  - Buku II : Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
  - Buku III : Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
  - Buku IV : Format Baru RKA-KL
  - Buku V : Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup
2. Implementasi
  - Peraturan Presiden Nomor 5/2010 (Januari 2010): Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
  - Peraturan Presiden Nomor 29/2010 (Mei 2010): Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, visi RPJMN 2010-2014 adalah: **Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sejahtera: Memperkuat *triple tracks strategy* serta pembangunan inklusif dan berkeadilan
2. Demokratis: Memantapkan konsolidasi demokrasi
3. Berkeadilan: Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan

Terdapat sebelas program prioritas nasional yang menjadi program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

Disamping itu terdapat tiga program prioritas lainnya, yaitu:

1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Bidang Perekonomian
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tata Urut (Flow) Keterkaitan Buku I-II-III

1. Buku I: Prioritas Nasional dijabarkan dalam arah kebijakan bidang dalam Buku II, dan kebijakan regional dalam Buku III.
2. Buku II: arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan dilaksanakan di wilayah.
3. Buku III: arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah atas bidang pembangunan yang dibutuhkan.

Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi bisa dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi

No.	Pembangunan	Sasaran
1.	Pertumbuhan Ekonomi	8. Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun 9. Sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen
2.	Inflasi	Rata-rata 4 - 6 persen pertahun
3.	Tingkat Pengangguran	5 - 6 persen pada akhir tahun 2014
4.	Tingkat Kemiskinan	8 – 10 persen pada akhir tahun 2014

Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat dalam bidang pendidikan bisa dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan

No.	Pembangunan	Status Awal (tahun 2008)	Target tahun 2014
1.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)	7,50	8,25
2.	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen)	5,97	4,18
3.	Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen)	95,14	96,0

4.	Meningkatnya APM SMP/ SMPLB/ MTs/Paket B (persen)	72,28	76,0
5.	Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/Paket C (persen)	64,28	85,0
6.	Meningkatnya APK PT usia 19- 23 tahun (persen)	21,26	30,0
7.	Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		

Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan bisa dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan

No.	Pembangunan	Status Awal (tahun 2008)	Target tahun 2014
1.	Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)	70,7	72,0
2.	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	228	118
3.	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	34	24
4.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen)	18,4	< 15,0

Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat dalam bidang pangan bisa dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Sasaran Pembangunan Bidang Pangan

No.	Pembangunan	Sasaran
1.	Produksi Padi	Tumbuh 3,22 persen per tahun
2.	Produksi Jagung	Tumbuh 10,02 persen per tahun
3.	Produksi Kedelai	Tumbuh 20,05 persen per tahun
4.	Produksi Gula	Tumbuh 12,55 persen per tahun
5.	Produksi Daging Sapi	Tumbuh 7,30 persen per tahun

Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat dalam bidang energi bisa dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 Sasaran Pembangunan Bidang Energi

No.	Pembangunan	Sasaran
1.	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik	3.000 MW pertahun
2.	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Pada tahun 2014 mencapai 80 persen
3.	Meningkatnya rasio desa berlistrik	Pada tahun 2014 mencapai 98 persen
4.	Meningkatnya produksi minyak bumi	Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari
5.	Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi	Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW

Sasaran perkuatan pembangunan demokrasi dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8 Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi

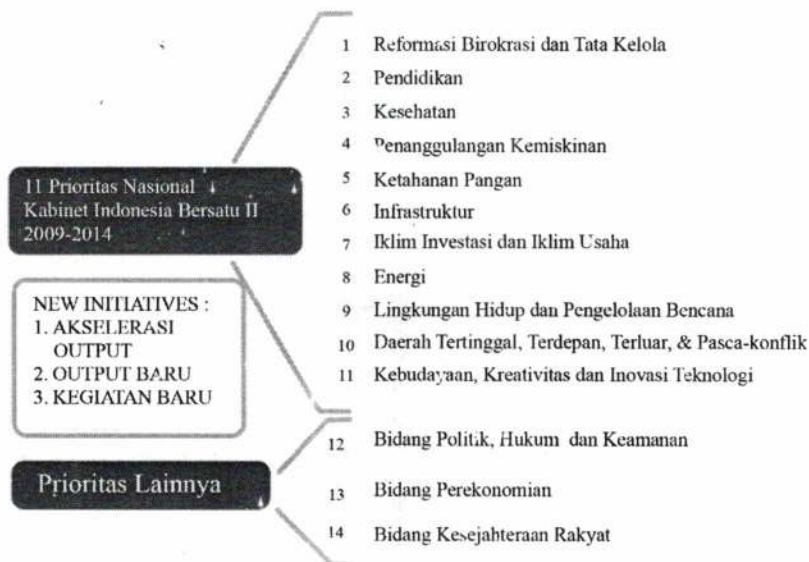
No.	Pembangunan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semakin terjaminnya iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis</li> </ul>
		<b>Pada tahun 2014</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100</li> </ul>

Sasaran perkuatan pembangunan demokrasi dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9 Sasaran Pembangunan Penegakan Hukum

No.	Pembangunan	Sasaran
	<p>Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (<i>rule of law</i>) dan terjaganya ketertiban umum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum</li> <li>2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum</li> <li>3) Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien</li> </ol> <p>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009</p>

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009-2014 terdiri atas sebelas program prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya. Secara lengkap bisa dilihat pada Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6

Program Prioritas Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014

### 3.3.4 Detail Aspek Kelembagaan

Penguasaan dan pengelolaan sumber daya sangat ditentukan oleh sistem kelembagaan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, dapat menentukan pembagian tanah atau lahan bagi anggota masyarakat. Kelembagaan (*institution*), sebagai kumpulan aturan main (*rules of game*) dan organisasi, berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi sumber daya secara efisien, merata, dan berkelanjutan (*sustainable*). Kelembagaan tidak hanya sekadar organisasi. Selain ini terjadi kesalahpahaman karena kelembagaan sering diidentikkan dengan sistem organisasi. Dalam konsep

ekonomi kelembagaan (*institutional economic*), organisasi merupakan suatu bagian (unit) pengambil keputusan yang di dalamnya diatur oleh sistem kelembagaan atau aturan main (*behavior rule*). Aturan main mencakup kisaran yang luas dari bentuk yang berupa konstitusi dari suatu negara, sampai kepada kesepakatan antara dua pihak (individu) tentang suatu pembagian manfaat dan beban (biaya) yang harus ditanggung oleh tiap-tiap pihak guna mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, unsur-unsur kelembagaan yang mengatur transaksi pertukaran manfaat-biaya antar pihak menjadi sangat penting.

Teori ekonomi neoklasik terlalu menekankan kepada pemilihan alternatif alokasi sumber daya dengan mengasumsikan bahwa motivasi manusia dan kelembagaan adalah tetap (*given*). Manusia sebagai pelaku ekonomi akan bertindak rasional dalam memilih alternatif yang tersedia, yaitu berdasarkan pengetahuan yang sempurna (*full knowledge*) dan mengetahui semua informasi tentang suatu komoditas (*full information*) yang akan dipertukarkan. Dalam konsep tersebut, diasumsikan bahwa tiap pilihan dalam alternatif dianggap tanpa risiko (*absence of risk*). Padahal kita mengetahui bahwa usaha pertanian pada umumnya beresiko tinggi sehingga akan mempengaruhi efisiensi dalam alokasi sumber daya. Dengan demikian, setiap pelaku dalam usaha pertanian selalu berespons terhadap risiko dan berusaha menghindari atau menekan risiko sekecil mungkin.

Dalam struktur masyarakat feodal, penguasaan tanah didominasi oleh sekelompok kecil masyarakat elite. Sebagian besar anggota masyarakat bekerja memburuh pada tuan tanahnya. Dengan demikian, aspek kelembagaan penguasaan sumber daya merupakan aspek penting lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam suatu perencanaan dan pengembangan wilayah.

Bentuk-bentuk kelembagaan yang bisa menjadi potensi di suatu daerah diantaranya adalah:

1. Kelembagaan Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), perbankan, lumbung desa, gotong royong ekonomi, atau perkumpulan-perkumpulan/kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi;

2. Kelembagaan sosial budaya, seperti Karang Taruna, LKMD/PKK, serta perkumpulan/paguyuban masyarakat yang bergerak di bidang sosial (olah raga, kesenian, atau organisasi profesi);
3. Kelembagaan politik, seperti partai-partai serta ormas-ormas yang bernaung dibawah partai;
4. Kelembagaan keagamaan, seperti perkumpulan-perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan;
5. Kelembagaan adat, seperti perkumpulan-perkumpulan yang merefleksikan dinamika adat atau pelestarian adat.

Keberadaan lembaga-lembaga di atas menunjukkan potensi di daerah tersebut dari aspek kelembagaan dapat dikatakan sudah baik. Makin banyak dan mapan jumlah dan jenis kelembagaan maka makin bagus juga potensi daerah tersebut.

### **3.3.5 Latihan**

1. Apa pengaruh perubahan ideologi dan politik terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia?
2. Mengapa aspek pertahanan dan keamanan sangat penting diterapkan terutama di kawasan-kawasan perbatasan?
3. Apa pentingnya aspek kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan potensi daerah?

### **3.3.6 Kesimpulan**

Aspek ideologi dan politik secara nyata mempengaruhi sistem perekonomian di sebuah negara. Seperti halnya di Indonesia, karena dasar negara yang digunakan adalah Pancasila, maka dalam sistem perekonomian juga dikenal ekonomi Pancasila, yang mengenal azas demokrasi. Tetapi perkembangan selanjutnya ditandain dengan mulai munculnya azas liberal, ketika Indonesia mulai melakukan privatisasi untuk BUMN-BUMN yang ada di Indonesia. Sampai sekarang belum jelas secara spesifik sistem perekonomian seperti apa yang dianut oleh Indonesia.

Aspek pertahanan dan keamanan sangat penting ditegaskan di Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan yang rawan dengan kejahatan lintas negara serta disintegrasi bangsa. Beberapa jenis kejahatan lintas negara diantaranya adalah pembalakan liar, narkoba, terorisme, serta perdagangan wanita dan anak-anak (*trafficking*). Disamping itu, lalu lintas para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang keluar masuk negara Indonesia melalui negara tetangga seringkali menimbulkan konflik yang merugikan negara Indonesia. Kedua aspek ini harus ditanamkan kepada penduduk di daerah perbatasan supaya rasa kesatuan nasional mereka semakin kuat, dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya disintegrasi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk kebijakan untuk dijadikan acuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Landasan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran dituangkan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tercantum dalam UU 25/2004 Pasal 4 Ayat 2, UU 25/2004 Pasal 4 ayat 3, dan UU 17/2003 Pasal 12 Ayat 2. Landasan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran secara rinci dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas (0142/M.PPN/06/2009) dan Menteri Keuangan (SE 1848/MK/2009) tgl 19 Juni 2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Sedangkan implementasinya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5/2010 (Januari 2010): Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, serta Peraturan Presiden Nomor 29/2010 (Mei 2010): Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011.

Kelembagaan (*institution*), sebagai kumpulan aturan main (*rules of game*) dan organisasi, berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi sumber daya secara efisien, merata, dan berkelanjutan (*sustainable*). Kelembagaan tidak hanya sekadar organisasi.

### 3.3.7 Test Formatif

1. Salah seorang pencetus sistem ekonomi Pancasila di Indonesia adalah:

- a. Prof. Sutami
  - b. Prof. Mubyarto
  - c. Dr. Moh. Hatta
  - d. Drs. Harun Al Rasyid
2. Berikut ini adalah daerah-daerah yang termasuk ke dalam wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga, kecuali:
- a. Sebatik
  - b. Nunukan
  - c. Atambua
  - d. Raja Ampat
3. Menurut Siregar (2008), makna keamanan manusia terdiri dari tujuh dimensi yang saling terkait. Dimensi berikut tidak termasuk dalam kategori di atas:
- a. Keamanan fisik
  - b. Keamanan lingkungan
  - c. Keamanan pangan
  - d. Keamanan politik
4. Landasan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran dituangkan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tercantum dalam:
- a. UU 25/2004 dan UU 31/2004
  - b. UU 25/2004 dan UU 19/2005
  - c. UU 25/2004 dan UU 17/2003
  - d. UU 25/2004 dan UU 18/2008
5. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kelembagaan yang bisa menjadi potensi di suatu daerah, kecuali:
- a. Lembaga adat, karang taruna, bank, dan KUD
  - b. Bank dan Pantu Asuhan
  - c. Karang Taruna, LKMD, Gank Motor, dan Pantu Pijat
  - d. Bank, KUD, dan Karang Taruna

### 3.4 Jawaban Test Formatif

Sub Bab Detail Aspek Fisik, Aspek Ekonomi dan Keuangan, serta Aspek Sosial Budaya dan Kependudukan

1. b
2. b
3. d
4. a
5. c

Sub Bab 3.2 Detail Aspek Ideologi dan Politik, Aspek Pertahanan dan Keamanan, Aspek Kebijakan, serta Aspek Kelembagaan

1. b
2. d
3. a
4. c
5. c

# Bab IV

## Model, Metode, dan Teknik (Mmt) Dalam Analisis Potensi Wilayah Dan Daerah

### 4.1 Pendahuluan

Berikut ini dijabarkan pengertian model, metode, dan teknik yang selanjutnya akan digunakan dalam tulisan ini.

- Model adalah representasi system nyata dalam bentuk yang lebih sederhana, untuk tujuan menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan, maupun memprediksikan.
- Model dapat juga diartikan sebagai bungkus dari kombinasi metode dan teknik yang memiliki kekhasan tertentu
- Metode adalah merupakan jabaran dari pendekatan yang merupakan prosedur tertentu yang difokuskan ke pencapaian tujuan
- Teknik adalah suatu cara kongkret untuk penyelesaian suatu masalah yang spesifik secara aplikatif, nyata, dan praktis, dan replikatif (mudah diulang/dilakukan pihak lain).
- Atau dapat dikatakan bahwa teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode

Bab ini akan membahas model, metode, serta teknik yang dapat digunakan dalam analisis potensi wilayah dan daerah untuk semua aspek.

## 4.2 Model, Metode, dan Teknik (MMT) pada Aspek Fisik serta Aspek Ekonomi dan Keuangan

### 4.2.1 Model Gravitasi

Model gravitasi dimulai dari penelitian Carey dan Revenstein pada abad ke-19 yang menemukan bahwa jumlah migran yang masuk ke suatu kota dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk kota yang didatangi, besarnya jumlah penduduk tempat asal migran, dan jarak antara kota asal dengan kota yang dituju. Hal ini berarti banyaknya migran yang memasuki sesuatu kota tidaklah acak, melainkan dipengaruhi oleh faktor tertentu tadi. Keterkaitan ini mengikuti hukum gravitasi Newton (Sir Isaac Newton) yang berbunyi, "dua massa yang berdekatan akan saling tarik-menarik dan daya tarik masing-masing massa adalah sebanding dengan bobotnya" (Tarigan, 2005:147-148).

Dalam perkembangannya kemudian, model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Daya tarik ini kemudian mendorong berbagai kegiatan lain untuk berlokasi di dekat kegiatan yang telah ada terlebih dahulu. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, apabila kita ingin membangun suatu fasilitas yang baru maka model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal. Pada lokasi optimal, fasilitas itu akan digunakan sesuai dengan kapasitasnya (Tarigan, 2005:104).

Menurut Tarigan (2005), interaksi antara dua kota ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, besarnya kedua kota, dalam hal ini sering diukur dari jumlah penduduk, karena jumlah penduduk sangat terkait langsung dengan berbagai ukuran lain yang digunakan, seperti banyaknya lapangan kerja, total pendapatan, dan lain-lain, serta mudah mendapatkan data. Kedua, jarak antara kedua kota, yang mempengaruhi keinginan orang untuk bepergian karena untuk menempuh jarak diperlukan waktu, tenaga,

dan biaya. Makin jauh jarak yang memisahkan kedua lokasi, makin rendah keinginan orang untuk bepergian. Dalam hal ini, minat orang bepergian menurun drastis apabila jarak itu semakin jauh, artinya penurunan minat itu tidak proporsional dengan penambahan jarak, melainkan eksponensial. Rumus gravitasi secara umum adalah sebagai berikut :

$$T_{ij} = k \frac{P_i P_j}{d_{ij}^b} \dots\dots\dots (2)$$

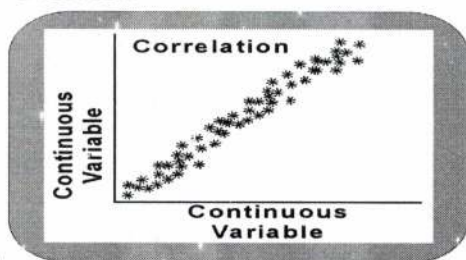
Keterangan :

- $T_{ij}$  = Daya tarik atau banyaknya trip dari subwilayah i ke subwilayah j,
- $P_i$  = Penduduk subwilayah i ,
- $P_j$  = Penduduk subwilayah j,
- $d_{ij}$  = Jarak antara subwilayah i dengan subwilayah j,
- $b$  = Pangkat dari  $d_{ij}$  menggambarkan cepatnya jumlah trip menurun seiring dengan penambahan jarak. Nilai b dapat dihitung tetapi bila tidak maka sering digunakan  $b = 2$ ,
- $k$  = sebuah bilangan konstanta berdasarkan pengalaman, juga dapat dihitung seperti b (Tarigan, 2005:105).

#### 4.2.2 Model Regresi Linier

Regresi linier merupakan pola persamaan yang dibentuk guna menerangkan pola hubungan antar variabel. Dengan membuat suatu pola persamaan, maka pendugaan ke arah peramalan akan dapat dilakukan. Untuk membuat model regresi linier dapat dilakukan cara sebagai berikut: Dari data yang diperoleh, dapat posisikan dalam grafik kartesius, hingga membentuk titik-titik, dan diperolehlah garis lurus yang dapat dibuat pola persamaannya, seperti dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini

## Overview



Gambar 7  
Model Regresi Linier

Persamaan yang didapat dari grafik di atas adalah persamaan linear, yaitu

$$y = a + bx$$

$y$  : variabel terikat,  $x$  : variabel bebas

$a$  : konstanta,  $b$  : koefisien

Dari persamaan

$$y = a + bx$$

Dapat diperoleh

$$\begin{aligned} \text{Persamaan Normal: } \quad \Sigma y &= an + b\Sigma x \\ \Sigma xy &= a\Sigma x + b\Sigma x^2 \end{aligned}$$

Sehingga:

$$a = \frac{\Sigma y - b\Sigma x}{n} \quad b = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam analisis potensi wilayah dan daerah pada aspek fisik diantaranya, adalah:

- Metode Teknokratik dan Partisipatif

- Metode Observasi (teknokratik)
- Metode Dokumentasi (teknokratik)
- Metode Pengukuran (kuantitatif, kualitatif)
- Metode *Self Survei* (partisipatif)

Sedangkan teknik-teknik yang biasa digunakan adalah:

- Teknik *Super Impose* (overlay)
- Teknik *Scoring* (*simple, weighted*); untuk penentuan struktur wilayah dan daerah, serta penentuan fungsi ruang
- Teknik Pengukuran dan Pengetesan Khusus (sesuai dengan bidang fisik yang diukur/ditest)

## 43. Model, Metode, dan Teknik (MMT) pada Aspek Ekonomi dan Keuangan

### 4.3.1 Model Agregat

Model Agregat Makro Ekonomi, seperti Capital Output Ratio (COR) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), digunakan dalam penjelasan pertumbuhan dan investasi wilayah. COR disebut sebagai *koefisien modal*, menunjukkan hubungan antara besarnya investasi (modal) dengan nilai output. Terdapat dua macam nilai COR, yaitu: *Average Capital-Output Ratio* (ACOR) dan *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR). ACOR menunjukkan hubungan antara stok modal yang ada dengan aliran output lancar yang dihasilkan, sedangkan ICOR menunjukkan perbandingan antara kenaikan tertentu pada stok modal (delta K) dengan kenaikan output atau pendapatan (delta Y), dengan kata lain ICOR =  $dK/dY$ .

### 4.3.2 Model Keseimbangan

Model Keseimbangan digunakan dalam menjelaskan (dan memprediksi) berbagai fenomena ekonomi wilayah dalam keseimbangan. Penggunaan model keseimbangan dapat dilihat melalui contoh berikut ini. Persamaan Sederhana  $Y = C + S$ , dengan keterangan bahwa Y: pendapatan wilayah atau masyarakat

C: konsumsi masyarakat

S: tabungan masyarakat

Misalkan diketahui persamaan yang lebih kompleks

$$(1) : Y = C + G + I_g + I_p + X - M$$

Y: PDB (*Product Domestic Bruto*)

C: *Consumsion*

G: *Government expenditure*

I<sub>g</sub>: *Investation by Government*

I<sub>p</sub>: *Investation by Private*

X: *Export*

M: *Import*

Selanjutnya diketahui persamaan kompleks (2)  $I_p = f(\Delta PDB, PDB)$ . Misalkan setelah dihitung dengan data empiris selama 10-15 tahun terakhir atau lebih, diperoleh hubungan seimbang sebagai berikut:  $I_p = 1.5 \Delta PDB + 0.021 PDB$ , maka  $I_p$  ke depan dapat diprediksi berdasarkan persamaan tersebut.

### 4.3.3 Model Input-Output

Model Input-Output dipergunakan dalam penjelasan keterkaitan sub sektor ekonomi. Analisis input output merupakan usaha untuk memasukkan fenomena keseimbangan umum dalam analisis empiris sisi produksi.

Tabel Input-Output adalah suatu uraian statistik dalam bentuk matriks baris dan kolom yang menggambarkan transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antara suatu sektor dengan sektor lainnya. Besarnya ketergantungan suatu sektor tertentu terhadap sektor yang lain ditentukan oleh input yang digunakan dalam proses produksi maupun besarnya output yang dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir. Dengan demikian pengembangan suatu sektor tidak akan tercapai apabila tidak di dukung oleh sektor lain.

Sebagai uraian statistik yang berkaitan dengan masukan dan

keluaran sektor-sektor ekonomi, Tabel Input-Output dapat memberi gambaran tentang struktur perekonomian yang mencakup struktur input, struktur output dan nilai tambah, struktur penyediaan barang dan jasa, permintaan, ekspor, dan impor dari setiap sektor. Kerangka umum Tabel Input-Output dapat dilihat pada Gambar 6.

Kerangka umum Tabel I-O terdiri atas 4 kuadran yaitu:

- Kuadran I : Menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi. Transaksi yang terjadi pada kuadran I lebih dikenal sebagai transaksi antara (*intermediate transaction*).
- Kuadran II: Menunjukkan permintaan akhir (*final demand*) dan impor, serta menggambarkan penyediaan barang dan jasa. permintanaan akhir terdiri atas konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor.
- Kuadran III: menunjukan input primer sektor-sektor produksi berupa upah/gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.
- Kuadran IV: memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Informasi ini digunakan dalam sistem neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Dalam penyusunan Tabel I-O kuadran ini tidak disajikan.

Tiap kuadran tersebut di atas dinyatakan dalam bentuk matriks. Kuadran I yang berukuran matriks  $n \times n$  menunjukkan banyaknya sektor yang dihitung menurut klasifikasi sektor dengan memperhatikan kegiatan ekonomi yang dianggap potensial di wilayah/daerah.

I ( $n \times n$ ) Transaksi antar sektor/kegiatan	II ( $n \times m$ ) Permintaan akhir dan impor
III ( $p \times n$ ) Input Primer	IV ( $p \times m$ )

Gambar 8  
Kerangka Umum Tabel Input-Output

Untuk memberikan gambaran tentang Tabel Input-Output, berikut diberikan suatu ilustrasi Tabel Input-Output dengan menyederhanakan suatu sistem ekonomi menjadi tiga sektor produksi, atau disebut juga Tabel Input-Output 3 x 3 sektor (lihat Gambar 9).

Alokasi Output Susunan Input		Permintaan Antara			Permintaan Akhir	Jumlah Output
		Sektor Produksi				
Sektor Produksi	1	$X_{11}$	$X_{12}$	$X_{13}$	$F_1$	$X_1$
	2	$X_{21}$	$X_{22}$	$X_{23}$	$F_2$	$X_2$
	3	$X_{31}$	$X_{32}$	$X_{33}$	$F_3$	$X_3$
Jumlah Input Primer		$V_1$	$V_2$	$V_3$		
Jumlah Input		$X_1$	$X_2$	$X_3$		

Gambar 9  
Ilustrasi Tabel Input-Output ( 3 x 3 ) sektor

Pada garis horizontal atau baris, isian-isian angka memperlihatkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan, sebagaimana untuk memenuhi permintaan antara (*intermediate demand*) sebagian lagi dipakai untuk memenuhi permintaan akhir (*final demand*). Permintaan Antara adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk proses lebih lanjut pada sektor produksi.

Sedangkan permintaan akhir adalah permintaan untuk konsumsi akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal, dan ekspor. Isian angka menurut garis vertikal atau kolom, menunjukkan pemakaian input antara maupun input primer yang disediakan oleh sektor-sektor lain untuk pelaksanaan produksi. Input primer dalam istilah yang lebih populer disebut nilai tambah, yang terdiri

dari upah/gaji, surplus usaha (sewa tanah, bunga neto, dan keuntungan), penyusutan barang modal, dan pajak tidak langsung netto.

Setiap angka satu sel dalam sistem matriks tersebut mempunyai pengertian ganda. Misalnya di kuadran pertama yaitu transaksi antara (permintaan antara dan input antara). Dilihat secara horizontal angka tersebut merupakan aloksi output suatu sektor lainnya, dan pada waktu yang bersamaan dilihat secara vertikal merupakan input dari suatu sektor yang diperoleh dari sektor lainnya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa susunan angka-angka dalam bentuk matriks memperlihatkan suatu jalinan yang kait-mengait (*interdependent*) di antara beberapa sektor. Dengan mengambil contoh dari ilustrasi di atas, dapat dijelaskan bahwa sektor  $i$ , outputnya berjumlah  $X_i$ , dialokasikan secara baris sebanyak  $x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}$  berturut-turut kepada sektor 1, 2 dan 3 sebagai permintaan antara, serta sebanyak  $F_i$ , untuk memenuhi permintaan akhir. Output  $X_2$  dan  $X_3$  masing-masing dari sektor 2 dan 3, alokasinya dapat diperiksa dengan cara yang sama.

Alokasi output itu secara keseluruhan dapat dituliskan dalam bentuk persamaan aljabar sebagai berikut:

$$\begin{aligned} x_{12} + x_{12} + x_{13} + F_1 &= X_1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + F_2 &= X_2 \quad \dots\dots\dots(1) \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + F_3 &= X_3 \end{aligned}$$

Secara umum persamaan di atas dapat dirumuskan kembali

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} + F_i = X_i \quad \dots\dots\dots(2)$$

untuk  $i = 1, 2, 3$ ,  
dimana  $x_{ij}$  adalah banyaknya output sektor  $i$  yang dipergunakan sebagai input sektor  $j$ , dan  $F_i$  adalah permintaan akhir terhadap sektor  $i$ . Isian secara vertikal atau kolom terutama di sektor produksi, menunjukkan struktur input suatu sektor. Dengan mengikuti cara membaca seperti

di atas, persamaan aljabar secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} X_{12} + X_{12} + X_{13} + V_1 &= X_1 \\ X_{21} + X_{22} + X_{23} + V_2 &= X_2 \quad \dots\dots\dots(3) \\ X_{31} + X_{32} + X_{32} + V_3 &= X_3 \end{aligned}$$

Secara umum persamaan diatas dapat dirumuskan kembali menjadi

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} + V_j = X_j \quad \dots\dots\dots(4)$$

untuk  $j = 1,2,3$

dimana  $V_j$  adalah input primer (nilai tambah) dari setor  $j$ .

Dalam analisis input-output sistem persamaan tersebut di atas memegang peranan penting sebagai dasar analisis ekonomi yang akan dibuat. Apabila  $a_{ij} = x_{ij}/X_j$  ( $a_{ij}$  = koefisien input) atau  $x_{ij} = a_{ij}X_j$ , maka persamaan (1) dapat disubstitusikan menjadi:

$$\begin{aligned} a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + a_{13}X_3 + F_1 &= X_1 \\ a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + a_{23}X_3 + F_2 &= X_2 \quad \dots\dots\dots(5) \\ a_{31}X_1 + a_{32}X_2 + a_{33}X_3 + F_3 &= X_3 \end{aligned}$$

Dalam bentuk persamaan matriks, persamaan (5) akan menjadi :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$$

$$A \quad X + F = X$$

$$\text{atau } (I - A) \quad X = F$$

$$\text{atau } X = (I - A)^{-1} F \quad \dots\dots\dots(6)$$

Dari persamaan (6) ini terlihat bahwa output mempunyai hubungan fungsional terhadap permintaan akhir, dengan  $(I-A)^{-1}$  sebagai koefisien arahnya. Selanjutnya disebut sebagai matriks pengganda output dan menjadi dasar pengembangan model Input-Output.

Model-model ekonomi yang diturunkan dari tabel input-output berangkat dari asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi homogenitas, bahwa setiap sektor hanya memproduksi satu jenis output dengan struktur input tunggal dan tidak ada substitusi otomatis antara berbagai sektor.
2. Asumsi proporsionalitas, bahwa dalam proses produksi, hubungan antara input dengan output merupakan fungsi linier. Kenaikan penggunaan input oleh suatu sektor tertentu akan berbanding lurus dengan output yang dihasilkan.
3. Asumsi Aditif, bahwa efek total pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah. Diluar sistem tabel input-output semua pengaruh luar diabaikan.

Karena input antara terhadap output konstan sepanjang periode analisis, maka salah satu keterbatasan model yang diturunkan dari tabel input-output ialah produsen tidak dapat menyesuaikan perubahan-perubahan inputnya atau mengubah proses produksi. Kemudian hubungan antara input dan output proporsional dan tetap, menunjukkan bahwa apabila output naik dua kali lipat, maka input juga akan naik dua kali lipat. Asumsi ini menolak adanya pengaruh perubahan teknologi atau produktivitas, serta perubahan relatif harga.

Dalam penyusunan tabel I-O maupun analisis ekonomi yang menggunakan model I-O, terdapat beberapa besaran (variabel) yang perlu untuk dijelaskan. Besaran tersebut menyangkut output, input antara, input primer (nilai tambah), permintaan akhir dan impor.

Output merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi yang ada suatu daerah. Ada tiga jenis produksi yang dicakup dalam penyusunan output setiap sektor, yaitu:

1. Produk utama adalah produk yang memiliki nilai dan atau kuantitas paling dominan diantara produk-produk yang dihasilkan.

2. Produk ikutan adalah produk yang secara otomatis terbentuk pada saat menghasilkan produk utama. Teknologi yang digunakan untuk mendapatkan produk utama dan produk ikutan merupakan teknologi tunggal.
3. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan sejalan dengan produk utama tetapi menggunakan teknologi yang berbeda.

Untuk lebih jelasnya diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Andaikan seseorang berusaha di bidang penggilingan padi. Dari penggilingan padi ini dihasilkan beras dan dedak, selain itu mesin penggilingan padi tersebut dapat membangkitkan listrik. Listrik ini dijual ke lingkungan sekitar. Listrik yang dijual ini dimasukkan sebagai produk sampingan karena teknologinya berbeda. Sedangkan beras dimasukkan sebagai produk utama, dan dedak sebagai produk ikutan karena teknologinya menyatu dengan teknologi produk beras.

Untuk menghitung output suatu sektor, produk ikutan dimasukkan sebagai bagian dari output sektor yang bersangkutan, sedangkan produksi sampingan dihitung di sektor yang sesuai dengan karakteristiknya. Dalam contoh ini, listrik yang dihasilkan oleh penggilingan padi dan dijual digolongkan kedalam sektor listrik.

Secara umum pengertian mengenai output dan cara memperkirakan output telah dijelaskan. Namun untuk beberapa sektor, agak berbeda atau bersifat khusus, seperti sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sektor pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Output sektor bangunan adalah seluruh nilai proyek yang telah diselesaikan selama periode penghitungan tanpa memperhatikan apakah bangunan tersebut sudah selesai seluruhnya atau belum dan berlokasi pada wilayah domestik. Oleh karena itu output dari sektor ini pada umumnya diperoleh berdasarkan perkiraan.
2. Output sektor perdagangan mencakup seluruh margin perdagangan yang timbul dari kegiatan perdagangan pada suatu wilayah domestik. Margin perdagangan adalah selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan dikurangi dengan biaya pengangkutan yang telah dikeluarkan dalam

rangka memperdagangkan komoditas-komoditas tersebut.

3. Output sektor bank terdiri atas jasa pelayanan di bidang perbankan (*service charge*) dan imputasi jasa bank (*imputed service charge*) yaitu selisih antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayar.
4. Output sektor pemerintahan terdiri atas belanja pegawai dan penyusutan barang-barang modal milik pemerintah.

Input antara mencakup penggunaan berbagai barang dan jasa oleh suatu sektor dalam kegiatan produksi. Barang dan jasa tersebut berasal dari produksi sektor-sektor lain, dan juga produksi sendiri. Barang-barang yang digunakan sebagai input antara biasanya habis sekali pakai, seperti bahan baku, bahan penolong, bahan bakar dan sejenisnya. Dalam model I-O, penggunaan input antara diterjemahkan sebagai keterkaitan antara sektor dan dinotasikan dengan  $X_{ij}$ , yaitu input antara yang berasal dari produksi sektor- $i$  yang digunakan oleh sektor- $j$  dalam rangka menghasilkan output  $X_j$ .  $\sum X_{ij}$  disebut sebagai total input antara sektor  $j$ .

Dalam suatu tabel I-O, input antara dinilai dengan dua jenis harga. Input antara atas dasar harga pembeli menggunakan harga beli konsumen sebagai dasarnya. Dalam harga tersebut tentunya margin distribusi (keuntungan pedagang dan ongkos angkut) sudah termasuk di dalamnya. Sebaliknya input antara atas dasar harga produsen penggunaan harga pabrik sebagai dasarnya, yang tentunya margin distribusi tidak termasuk di dalamnya. Margin distribusi selanjutnya diperlukan sebagai input yang berasal dari sektor perdagangan dan angkutan.

Input antara sebenarnya mencakup dua komponen, komponen input yang berasal dari produksi daerah sendiri dan komponen impor (dari luar daerah). Oleh karena itu suatu tabel I-O yang ingin menggambarkan secara langsung hubungan produksi daerah sendiri (domestik) dengan berbagai sektor pemakai, harus memisahkan komponen impor dari setiap input antara. Dalam model I-O, analisis dengan menggunakan input antara domestik lebih sering dipakai.

Input primer atau lebih dikenal dengan nilai tambah merupakan balas jasa yang diciptakan/diberikan kepada faktor-faktor produksi yang berperan dalam proses produksi. Balas jasa tersebut mencakup upah dan

gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung. Upah dan gaji merupakan balas jasa yang diberikan kepada buruh/karyawan, baik dalam bentuk uang maupun barang, termasuk dalam upah dan gaji, semua tunjangan (perumahan, kendaraan dinas, kesehatan) dan bonus, uang lembur yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Semua pendapatan pekerja tersebut masih dalam bentuk bruto atau sebelum dipotong pajak penghasilan.

Surplus usaha mencakup sewa properti (tanah, hak cipta/paten), bunga neto (bunga yang diterima dikurangi bunga yang dibayar) dan keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan dalam bentuk bruto, yaitu sebelum dibagikan kepada pemilik saham berupa deviden dan sebelum dipotong pajak perseroan. Penyusutan merupakan nilai penyisihan keuntungan perusahaan untuk akumulasi pengganti barang modal yang habis pakai.

Sedangkan pajak tak langsung merupakan pajak yang dikenakan pemerintah untuk setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan seperti pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam model I-O, nilai tambah biasanya dinotasikan dengan  $V_j$ , dan untuk setiap komponennya menggunakan notasi  $h$ . Jadi  $V_{hj}$  merupakan nilai tambah yang diciptakan di sektor  $j$  untuk komponen  $h$ .

Permintaan akan barang dan jasa dibedakan antara permintaan oleh sektor-sektor produksi untuk proses produksi disebut permintaan antara dan permintaan oleh konsumen akhir disebut permintaan akhir. Dalam tabel I-O, permintaan akhir mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok, ekspor dan impor.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pembelian barang dan jasa oleh rumah tangga, baik untuk makanan maupun non makanan. Termasuk pula pembelian barang-barang tahan lama (*durable goods*), seperti perlengkapan rumah tangga, kendaraan bermotor dan sebagainya. Satu-satunya pembelian yang tidak termasuk dalam konsumsi rumah tangga adalah bangunan tempat tinggal, karena dianggap sebagai pembentukan modal di sektor persewaan bangunan. Konsumsi rumah tangga mencakup pula barang-barang hasil produksi sendiri dan pemberian pihak lain.

Pengeluaran komsumsi pemerintah mencakup semua pembelian barang

dan jasa oleh pemerintah yang bersifat rutin (*current expenditure*), termasuk pembayaran gaji para pegawai (belanja pegawai). Sedangkan pengeluaran pembangunan untuk pengadaan sarana dan berbagai barang modal, termasuk dalam pembentukan modal.

Pembentukan modal tetap mencakup semua pengeluaran untuk pengadaan barang modal baik dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta (bisnis). Barang modal dapat terdiri dari bangunan/konstruksi, mesin dan peralatan, kendaraan dan angkutan serta barang modal lainnya.

Sedangkan perubahan stok sebenarnya juga merupakan pembentukan modal (tidak tetap) yang diperoleh dari selisih antara stok akhir dan stok awal periode penghitungan. Stok biasanya dipegang oleh produsen merupakan hasil produksi yang belum sempat dijual, oleh pedagang sebagai barang dagangan yang belum sempat dijual dan oleh konsumen sebagai bahan-bahan (*inventory*) yang belum sempat digunakan.

Ekspor dan impor merupakan kegiatan atau transaksi barang dan jasa antara penduduk daerah sendiri dengan penduduk luar daerah baik penduduk kota/kabupaten lain maupun provinsi lain dan dari luar negeri. Perbandingan ekspor dan impor baik keseluruhan maupun untuk setiap kelompok komoditi menunjukkan terjadinya surplus atau defisit perdagangan antara daerah sendiri dengan daerah lain.

Beberapa tipe multiplier diantaranya adalah:

(1) **Angka Pengganda Output** merupakan nilai total dari output yang dihasilkan oleh perekonomian untuk memenuhi (atau akibat) adanya perubahan satu unit uang permintaan akhir suatu sektor (sektor j).

$$i = 1$$

$$Om_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

(2) **Angka Pengganda Pendapatan Rumah (*Household Income Multiplier*)** atau efek pendapatan merupakan angka pengganda pendapatan rumah tangga sektor  $j$  yang tercipta akibat adanya tambahan satu unit uang permintaan akhir di sektor  $j$  tersebut.

$$H_j = \sum v_j (I - A)^{-1}, \text{ jika } : v_j = V_j / X_j$$

(3) **Angka Pengganda Tenaga Kerja (*Labor Multiplier*)** merupakan efek total dari perubahan lapangan pekerjaan di perekonomian akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan akhir di suatu sektor tertentu.

$$I_j = \sum w_j (I - A)^{-1}; \text{ Jika } : w_j = L_j / X_j$$

#### 4.3.4 Model Basis Ekonomi (*Economic Base*)

Diasumsikan bahwa basis pertumbuhan ekonomi wilayah adalah ekspor. Sistem perekonomian di suatu wilayah diklasifikasikan menjadi sektor kegiatan basis dan kegiatan non-basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar wilayah. Koefisien multiplier ekonomi biasanya diukur dari tenaga yang dipekerjakan pada sektor basis dan non basis tersebut.

Jumlah total tenaga kerja (basis + non basis)

Multiplier Basis Ekonomi = -----  
-----

Jumlah total tenaga kerja dalam kegiatan basis

#### 4.3.5 Model Location Quotient

*Location Quotient* atau disingkat *LQ* adalah sebuah indeks yang mengukur *overspecialization* atau *underspecialization* dari sektor tertentu dalam suatu wilayah/subwilayah. *LQ* mengukur tingkat spesialisasi relatif suatu wilayah/subwilayah dalam aktivitas sektor perekonomian tertentu. Pengertian relatif dapat diartikan sebagai tingkat spesialisasi yang

membandingkan suatu wilayah dengan wilayah yang lebih besar, dengan ketentuan bahwa wilayah yang diamati merupakan bagian/subwilayah dari wilayah tersebut. Wilayah yang lebih luas disebut dengan wilayah referensi. Selain itu, LQ juga dikatakan sebagai suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan suatu sektor/industri tersebut secara nasional.

$$Q = \frac{\frac{x_i}{PDRB}}{\frac{X_i}{PNB}} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- $x_i$  = Nilai tambah (PDRB) sektor i di suatu kecamatan dalam suatu wilayah,
- PDRB = Total Nilai tambah (PDRB) di suatu kecamatan dalam suatu wilayah,
- $X_i$  = Nilai tambah (PDRB) sektor i di suatu wilayah,
- PNB = Total Nilai tambah (PDRB) di suatu wilayah.

Istilah wilayah nasional dapat diartikan untuk wilayah induk/wilayah atasan yang lebih tinggi satu tingkat. Misalnya, apabila diperbandingkan antara wilayah kabupaten dengan provinsi, maka provinsi memegang peran sebagai wilayah nasional, dan seterusnya (Tarigan, 2004:78).

Dari rumus tersebut, diketahui bahwa apabila  $LQ < 1$  berarti peranan sektor i di subwilayah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara wilayah. Sebaliknya, apabila  $LQ > 1$  berarti peranan sektor i di subwilayah itu lebih menonjol daripada peranan sektor tersebut secara wilayah.  $LQ > 1$  mengindikasikan bahwa peranan sektor i cukup menonjol di subwilayah itu dan seringkali sebagai petunjuk bahwa subwilayah tersebut surplus (*overspecialized*) akan produk sektor i dan mengekspornya ke subwilayah lain. Subwilayah tersebut hanya mungkin mengekspor produk ke subwilayah lain atau ke luar negeri karena mampu

menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisien. Atas dasar itu  $LQ > 1$  secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor  $i$  dimaksud. Sedangkan, apabila  $LQ = 1$  berarti peranan sektor  $i$  di subwilayah itu relatif hampir sama dengan peranan sektor tersebut secara wilayah.

Ada beberapa keunggulan metode  $LQ$ , yaitu:

- (1) Metode  $LQ$  memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung.
- (2) Metode  $LQ$  sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data historis untuk mengetahui *trend*.

Berikut ini adalah kelemahan metode  $LQ$ .

- (1) Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah identik dengan permintaan bangsa dan bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional sama dengan produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional.
- (2) Berasumsi bahwa tingkat ekspor tergantung pada tingkat disgregasi.

#### **4.3.6 Model Shift Share**

Digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Data yang digunakan: pendapatan per kapita, PDRB, atau tenaga kerja dengan tahun pengamatan pada rentang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen.

- (1) *Provincial share* ( $Sp$ ) yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi (provinsi). Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi maka peranannya terhadap provinsi tetap.

- (2) *Proportional (Industry-Mix) Shift* adalah pertumbuhan Nilai Tambah Bruto suatu sektor i dibandingkan total sektor di tingkat provinsi.
- (3) *Differential Shift* (Sd) adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah (kabupaten) dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan disbandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat.

Keunggulan analisis *shift share* antara lain:

- (1) Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *shift share* tergolong sederhana.
- (2) Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
- (3) Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Berikut ini adalah beberapa kelemahan *analisis shift share*, yaitu:

- (1) Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*.
- (2) Masalah *benchmark* berkenaan dengan homothetic change, apakah  $t$  atau  $(t-1)$  tidak dapat dijelaskan dengan baik.
- (3) Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap.
- (4) Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
- (5) Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor.
- (6) Tidak ada keterkaitan antar daerah.

### 4.3.7 Model Analisis Kelayakan Finansial

Beberapa cara untuk menganalisis kelayakan finansial, diantaranya adalah:

- (1) *Payback Period*: adalah lama waktu yang diperlukan suatu usaha untuk memperoleh kembali investasi awalnya

$$PP = \frac{\text{Investasi awal}}{\text{Aliran kas/tahun}}$$

(2) *Average Rate of Return on Investment* untuk mengukur keuntungan proyek investasi yang diusulkan, dapat dihitung dengan rumus:

$$AROROI = \frac{\text{Rata-rata aliran kas}}{\text{Rata-rata investasi}}$$

(3) Analisis *NPV* (*Net Present Value*) dan *IRR* (*Internal Rate of Return*)

Sama halnya dengan aspek teknis, beberapa metode berikut juga dapat digunakan dalam analisis potensi wilayah dan daerah pada aspek ekonomi dan keuangan, yaitu:

- Metode Teknokratik, Politik, dan Partisipatif
- Metode Kuesioner (teknokratik dan partisipatif)
- Metode Dokumentasi (teknokratik)
- Metode Kuantitatif, kualitatif (teknokratik)
- Metode Wawancara (*simple, in-depth*) (teknokratik dan partisipatif)

#### 4.3.8 Latihan

1. Teknik analisis *Location Quotient* (*LQ*) digunakan untuk apa? Beri contoh persoalan yang dapat menggunakan teknik analisis *LQ* tersebut! Dan bagaimana membaca indeks *LQ* nya?
2. Apa arti kuadran pada kerangka umum model Input-Output? Kemudian sebutkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam model Input-Output.
3. Untuk menganalisis kelayakan usaha secara finansial sebaiknya digunakan beberapa indikator, tidak cukup hanya satu indikator. Setujukah saudara dengan pernyataan tersebut? Berikan alasan dan contoh yang konkrit.

### 4.3.9 Kesimpulan

Salah satu model yang bisa digunakan untuk menganalisis potensi wilayah dan daerah berdasarkan aspek fisik adalah model gravitasi. Model ini menyatakan bahwa jumlah migran yang masuk ke suatu kota dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk kota yang didatangi, besarnya jumlah penduduk tempat asal migran, dan jarak antara kota asal dengan kota yang dituju.

Sedangkan model regresi linier bisa digunakan pada hampir semua aspek, karena pada dasarnya model ini menghubungkan dua atau lebih variabel dalam aspek apa saja, sehingga pemakaiannya sangat luas. Model ini sering digunakan dalam meramalkan kondisi ke depan tentang kecenderungan sebuah variabel, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, termasuk kecenderungan selera atau perilaku masyarakat.

Beberapa model yang dapat digunakan untuk menganalisis potensi wilayah dan daerah dari aspek ekonomi dan keuangan diantaranya adalah analisis *Capital Output Ratio (COR)*, *Location Quotient (LQ)*, shift share, Input-Output, model berbasis ekonomi, model keseimbangan, serta analisis kelayakan finansial.

### 4.3.10 Test Formatif

1. Model gravitasi yang biasa digunakan dalam menganalisis aspek fisik di kembangkan melalui proses analogi dengan hukum gravitasi yang ditemukan oleh:
  - a. Bernoulli
  - b. Sir Issac Newton
  - c. Archimides
  - d. Socrates
2. Salah satu keuntungan analisis dengan menggunakan model *Location Quotient (LQ)* adalah:
  - a. Tidak menggunakan data keuangan
  - b. Satu-satunya model dalam analisis ekonomi wilayah

- c. Sederhana dan mudah dikerjakan
  - d. Tidak ada yang benar
3. Berikut ini adalah asumsi yang digunakan dalam model Input-Output, kecuali:
    - a. Autokorelasi
    - b. Homogenitas
    - c. Proporsionalitas
    - d. Aditif
  4. Analisis kelayakan secara finansial yang menggunakan nilai sekarang sebagai acuan adalah:
    - a. Internal Rate of Return
    - b. Payback Period
    - c. Net Future Value
    - d. Net Present Value
  5. Pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:
    - a. *Provincial share, proportional shift, dan non proportional shift*
    - b. *Provincial share, district share, dan industrial share*
    - c. *Provincial share, proportional shift, dan differential shift*
    - d. *Provincial shift, industrial shift, dan differential shift*

#### 4.4 114 Model, Metode, dan Teknik (MMT) pada Aspek Sosial Budaya dan Kependudukan

##### 4.4.1 Teknik Proyeksi Penduduk

- Teknik Proyeksi Sederhana

$$P_t = P_0 + k \cdot (t-t_0)$$

Dg pertambahan tetap/tahun

$$P_{(t+x)} = a + b \cdot (tx-t_0)$$

Dg persamaan Regresi linear

$$P_{(t+x)} = P_t (1+r)^x$$

Dg persamaan eksponensial

- Teknik Proyeksi Penduduk Berimbang  
Penduduk yang akan datang = Penduduk sekarang + (kelahiran-kematian) alami + (masuk-keluar) pindah
- Teknik Cohort  
Teknik proyeksi jumlah penduduk dengan memperhatikan pergeseran kelompok umur pada struktur penduduknya

Lazimnya: Cohort = pengelompokan dalam interval 5 tahun

Cohort 0-4 tahun

Cohort 5-9 tahun

Cohort 10-14 tahun, dan seterusnya.

#### 4.4.2 Metode Self Survey

Metode self survey, adalah metode pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah (penjabaran dari pendekatan partisipatif) dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengamatan sendiri atas lingkungannya, serta mengidentifikasi masalah yang terjadi. Metode ini diterapkan untuk lingkup perencanaan yang bersifat mikro/operasional yang dapat dikenali obyek dan output perencanaannya secara langsung oleh masyarakat.

**Contoh Penerapan Metode ini:** pada perencanaan peremajaan kawasan kumuh, perencanaan rencana tindak penanganan kawasan kumuh, dan penyusunan rencana tindak lingkungan.

#### 4.4.3 Metode In-depth-Interview

Metode In-Depth Interview biasa dilakukan untuk rencana pembangunan yang masih memiliki waktu yang cukup panjang, tetapi juga diperkirakan memiliki dampak yang luas dalam jangka panjang. Contoh Penerapan *In-Depth Interview* adalah pada rencana pembangunan jalan menembus hutan lindung, atau rencana pembangunan jalan yang akan menggusur banyak permukiman warga.

#### 4.4.4 Latihan

1. Sebutkan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan penduduk beserta contohnya.
2. Apa yang disebut dengan metode *self-survey*? Berikan contoh penerapannya.
3. Apa yang dimaksud dengan metode *in-depth interview*? Berikan contoh penerapannya

#### 4.4.5 Kesimpulan

Beberapa teknik yang biasa digunakan dalam memproyeksikan penduduk adalah: teknik proyeksi sederhana, teknik proyeksi penduduk berimbang, dan teknik *cohort*. Sedangkan metode yang bisa digunakan dalam pengumpulan data adalah metode *self survey* dan metode *in-depth interview*.

#### 4.4.6 Test Formatif

1. Berikut ini adalah teknik-teknik yang biasa digunakan dalam memproyeksikan penduduk, kecuali:
  - a. Teknik *Cohort*
  - b. Teknik *in-depth interview*
  - c. Teknik proyeksi sederhana
  - d. Teknik proyeksi penduduk berimbang
2. Dalam melakukan analisis potensi wilayah dan daerah dari aspek sosial dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Metode berikut ini termasuk penjabaran dari teknik partisipatif, yaitu:
  - a. Metode *self-survey*
  - b. Metode *in-depth interview*
  - c. Metode *delphi*
  - d. Metode *brain storming*

3. Berikut ini adalah ciri-ciri metode *in-depth interview*, kecuali:
  - a. Rencana pembangunan masih memiliki waktu yang cukup panjang
  - b. Rencana pembangunan diperkirakan mempunyai dampak yang luas
  - c. Secara otomatis membutuhkan biaya yang relatif lebih besar
  - d. Bisa dilakukan dengan tergesa-gesa
4. Berdasarkan teknik proyeksi penduduk berimbang, jumlah penduduk yang akan datang dipengaruhi oleh:
  - a. Kematian dan kelahiran saja
  - b. Migrasi saja
  - c. Kematian, kelahiran, migrasi, dan jumlah penduduk saat ini
  - d. Jumlah penduduk saat ini dan migrasi
5. Teknik proyeksi jumlah penduduk dengan memperhatikan pergeseran kelompok umur pada struktur penduduknya, disebut:
  - a. Teknik ekstrapolasi
  - b. Teknik interpolasi
  - c. Teknik *Cohort*
  - d. Teknik anomali

#### **4.5 Model, Metode, dan Teknik (MMT) pada Aspek Pertahanan dan Keamanan, Aspek Kebijakan, dan Aspek Kelembagaan**

##### **4.5.1 Model Sistem Dinamik**

Model Sistem Dinamik telah dan sedang berkembang sejak diperkenalkan pertama kali oleh Jay W. Forrester pada tahun 1950-an dan berpusat di MIT Amerika. Sesuai dengan namanya, metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tendensi-tendensi dinamika sistem-sistem yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu.

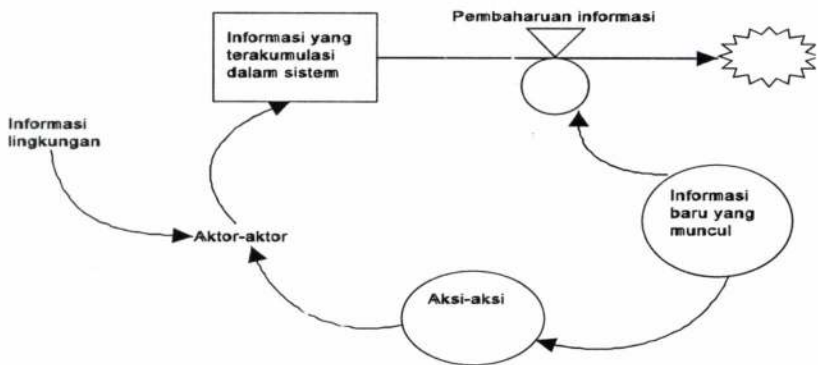
Penggunaan model ini lebih ditekankan pada tujuan-tujuan

peningkatan pengertian kita tentang bagaimana tingkah laku sistem itu muncul dari strukturnya. Pengertian ini sangat penting dalam perancangan kebijaksanaan yang efektif.

**Tasrif, 2005** mengidentifikasi bahwa persoalan-persoalan yang dapat dengan tepat dimodelkan menggunakan metodologi sistem dinamik adalah masalah yang:

- Mempunyai sifat dinamis (berubah terhadap waktu); dan
- Struktur fenomenanya mengandung paling sedikit satu struktur umpan balik (*feedback structure*).

Dalam metodologi sistem dinamik yang dimodelkan adalah struktur informasi sistem yang didalamnya terdapat aktor-aktor, sumber-sumber informasi, dan jaringan aliran informasi yang menghubungkan keduanya, seperti dapat dilihat pada Gambar 10 berikut ini.

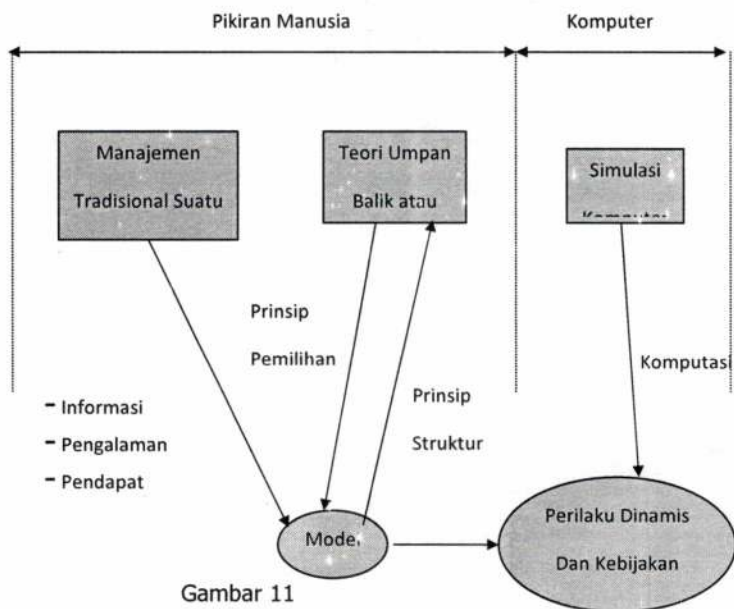


Gambar 10  
Struktur Informasi Sistem (Tasrif, 2005)

Analogi fisik dan matematik untuk struktur informasi ini dapat dibuat dengan mudah. Sebagai suatu analogi fisik, sumber informasi merupakan suatu tempat penyimpanan (*storage*), sedangkan keputusan merupakan aliran yang masuk ke dalam atau ke luar dari tempat penyimpanan itu. Dari analogi matematik, sumber informasi dinyatakan sebagai variabel

keadaan (*state variable*), sedangkan keputusan merupakan turunan (*derivative*) variabel keadaan tersebut.

Metodologi sistem dinamik dibangun atas dasar tiga latar belakang disiplin, yaitu: manajemen tradisional, teori umpan balik atau *cybernetics*, dan simulasi komputer. Prinsip dan konsep dari ketiga disiplin ini dipadukan dalam sebuah metodologi untuk memecahkan permasalahan manajerial secara holistik, menghilangkan kelemahan dari masing-masing disiplin, dan menggunakan kekuatan setiap disiplin untuk membentuk sinergi. Akar dari metodologi sistem dinamik dan input yang diberikan terhadap model dinamika sistem dapat dilihat pada Gambar 11 berikut ini.



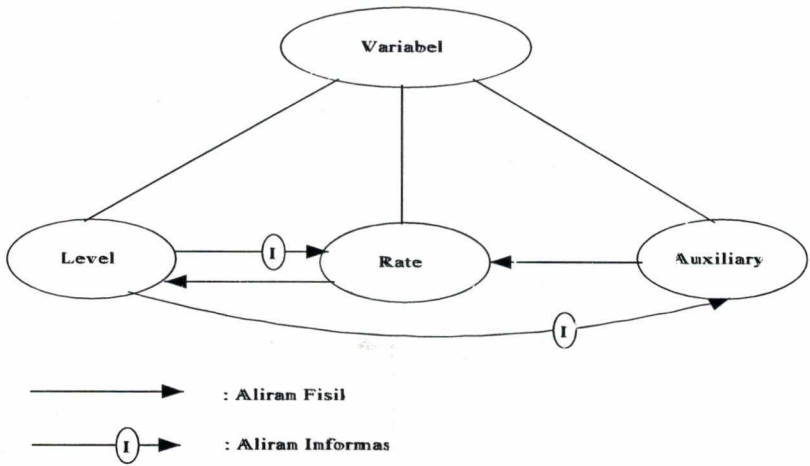
Gambar 11

Gambar 11  
 Dasar Metodologi Sistem Dinamik (Sunshil, 1993)

- Manajemen Tradisional adalah dunia nyata dari para praktisi manajerial yang mengutamakan pengalaman dan pendapat dari beberapa manajer. Dasar utama dari manajemen tradisional adalah basis data mental dan model mental dengan kekuatan utama pada kekayaan atas informasi kualitatif yang didapat dari pengamatan langsung dan pengalaman.
- Sibernetika atau Teori Umpan Balik adalah ilmu mengenai komunikasi dan kontrol yang didasari oleh teori umpan balik. Kekayaan informasi yang terkandung dalam basis data mental tidak dapat digunakan secara efektif tanpa adanya prinsip tentang pemilihan informasi yang relevan dan prinsip tentang restrukturisasi informasi. Dengan adanya sibernetika maka informasi yang ada dapat difiltrasi dan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk struktur kausal dan umpan balik dalam sistem.
- Simulasi komputer digunakan dalam dinamika sistem untuk menghasilkan keluaran yang berupa sebuah kumpulan informasi guna mempelajari perilaku suatu sistem. Perkembangan yang amat pesat dalam dunia simulasi komputer membuat simulasi dari konsekuensi yang dihasilkan oleh perilaku dinamis ini dapat dilakukan dengan biaya yang rendah. Simulasi komputer memberikan sumbangan besar dalam perancangan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam suatu sistem dengan kemampuan untuk memberikan konsekuensi yang akan ditimbulkan atas setiap kebijakan tersebut.

#### 4.5.2 Variabel Dalam Model Sistem Dinamik

Dalam pemodelan dengan menggunakan metodologi sistem dinamik terdapat tiga jenis variabel yang digunakan, yaitu *level*, *rate*, dan *auxiliary*, ketiga jenis variabel ini dan aliran yang terjadi antar variabel dapat dilihat dalam Gambar 10 berikut ini.



Gambar 10  
 Jenis Variabel dalam Model Sistem Dinamik (Sunshil, 1993)

- Variabel *level* merepresentasikan akumulasi atau integrasi suatu aliran dari waktu ke waktu. Dalam sistem nyata pada dasarnya terdapat dua jenis *level* bergantung pada jenis subsistem yang terlibat, subsistem fisik atau subsistem informasi. Subsistem fisik berkaitan dengan aliran sumber-sumber fisik seperti material, tenaga kerja, uang, order, dan sebagainya. Jika aliran-aliran diakumulasikan maka akan merepresentasikan level fisik. Level fisik ini dipengaruhi oleh aliran masuk *rate* dan aliran keluar *rate*. Subsistem informasi berkaitan dengan aliran informasi dalam sistem yang menghubungkan entitas-entitas fisik. Jika suatu *rate* fisik dirata-ratakan menurut waktu maka ini akan merepresentasikan level informasi.
- Variabel *rate* dalam sistem pada dasarnya adalah variabel keputusan yang diatur oleh satu atau lebih struktur kebijakan. *Rate* akan menentukan aliran masuk/keluar baik dari/men menuju suatu level. Keputusan yang diambil adalah menentukan besar pengaruh *rate* dalam suatu waktu terhadap level dan informasi tentang sistem. *Rate* tidak dapat diukur secara langsung pada suatu titik waktu melainkan

diukur oleh kebijakan yang diterjemahkan dalam bentuk aliran-aliran informasi yang mempengaruhi variabel *rate* tersebut. Selanjutnya variabel *rate* pada dasarnya diatur secara endogen oleh variabel level atau secara eksogen sebagai konstanta atau fungsi.

- Variabel *auxiliary* hanya merupakan variabel pelengkap secara teoritis, yang merepresentasikan suatu struktur kebijakan secara lebih baik dan jelas. Jika Variabel *auxiliary* dihilangkan maka rincian dari struktur kebijakan tidak dapat tergambar dalam model.

### 4.5.3 Diagram Dalam Model Sistem Dinamik

Berbagai jenis variabel saling bergantung dan membentuk struktur umpan balik dalam sistem. Hubungan-hubungan ini direpresentasikan dalam bentuk diagram untuk melihat struktur sistem nyata. Model sistem dinamik dapat dibangun dengan bantuan diagram-diagram yang tersedia untuk membantu pengertian atas struktur permasalahan yang terjadi. Diagram-diagram ini digunakan untuk merepresentasikan aliran struktur dan struktur umpan balik sebab akibat dari sistem. Bentuk diagram yang dikenal dalam model sistem dinamik adalah:

- Diagram hubungan kausal (*Causal loop diagram*)
- Diagram subsistem (*Subsystem diagram*)
- Diagram struktur kebijakan (*Policy structure diagram*)
- Diagram alir (*Flow diagram*)

### 4.5.4 Diagram Hubungan Kausal (*Causal Loop Diagram*)

Tujuan utama dari diagram hubungan kausal adalah menggambarkan hipotesis kausal dalam pengembangan model sehingga struktur sistem direpresentasikan dalam bentuk agregat. Diagram ini membantu pembuat model untuk mengkomunikasikan struktur umpan balik dan asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Diagram hubungan kausal merepresentasikan tentang cara kerja suatu sistem. Hirarki dari elemen-elemen umpan balik dalam diagram hubungan kausal dapat dilihat dalam Gambar 11.

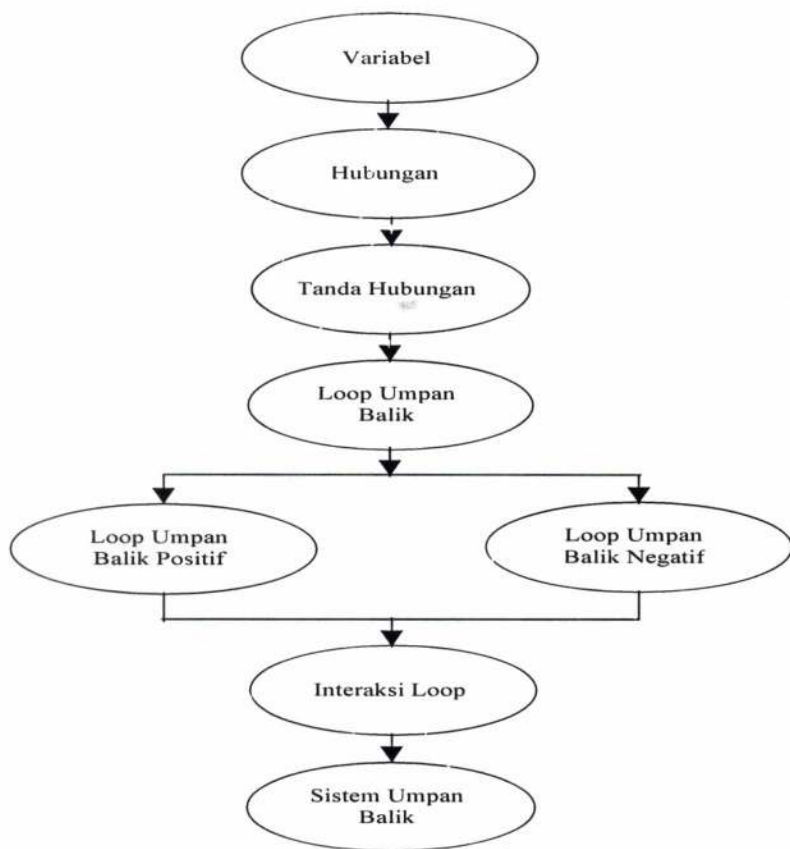
Pengaruh dari suatu variabel atas variabel lainnya dapat berupa hubungan positif atau negatif. Hubungan ini ditandai oleh tanda "+" atau "-" pada ujung dari panah hubungan kausal. Aturan untuk menentukan tanda dari hubungan kausal dinyatakan sebagai berikut:

1. Tanpa memperhatikan variabel-variabel lainnya, jika perubahan pada satu variabel mempengaruhi variabel lainnya dengan arah perubahan yang sama, maka hubungan antar variabel ini dinyatakan positif.
2. Dengan tetap tidak memperhatikan variabel-variabel lainnya, jika perubahan pada satu variabel mempengaruhi variabel lainnya dengan arah perubahan yang berbeda, maka hubungan antar variabel ini dinyatakan negatif.

Jika beberapa hubungan kausal digabungkan dan ditemukan bahwa terdapat suatu alur yang berawal dan berakhir pada variabel yang sama, maka sebuah *loop* umpan balik sebab akibat dinyatakan teridentifikasi. *Loop* umpan balik ini memiliki polaritas yang ditentukan oleh hubungan-hubungan kausal di dalamnya. *Loop* memiliki polaritas positif bila jumlah hubungan kausal negatif yang terjadi dalam *loop* adalah nol atau genap dan memiliki polaritas negatif bila jumlah hubungan kausal negatif yang terjadi adalah ganjil.

Diagram hubungan kausal memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Tidak membedakan antara subsistem fisik dan subsistem informasi.
2. Keterangan rinci tentang jenis dari setiap variabel tidak digambarkan.
3. Diagram ini sulit digunakan untuk menggambarkan keputusan yang akan diambil atau kebijakan yang terlihat

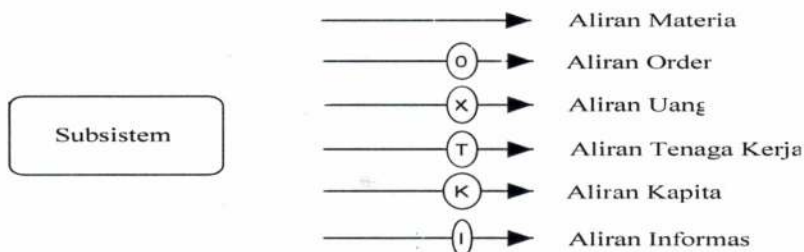


Gambar 12  
 Hirarki Elemen Umpan Balik (Sunshil, 1993)

#### 4.5.5 Diagram Subsistem (*Subsystem Diagram*)

Diagram subsistem bertujuan untuk merepresentasikan hubungan alir antara subsistem-subsistem suatu situasi permasalahan pada tingkat agregat. Representasi yang dilakukan meliputi struktur suatu sistem

dalam bentuk subsistem yang terlibat dan hubungan di dalam sistem berupa aliran sumber seperti material, tenaga kerja, order, uang, informasi, dan sebagainya. Simbol yang digunakan dalam diagram subsistem dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13  
Simbol Diagram Subsistem (Sunshil, 1993)

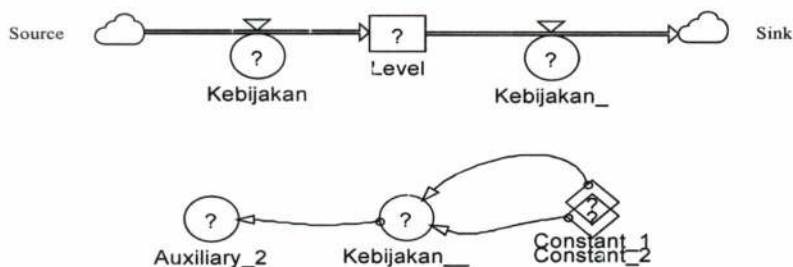
Representasi yang dilakukan oleh diagram subsistem memiliki beberapa kelemahan utama, yaitu:

- 1 Tidak memberikan gambaran tentang umpan balik yang terjadi dalam sistem.
- 2 Jenis dari variabel yang ada tidak dapat terlihat.
- 3 Tidak menggambarkan struktur keputusan atau kebijakan dari sistem.

#### 4.5.6 Diagram Struktur Kebijakan (*Policy Structure Diagram*)

Diagram struktur kebijakan digunakan untuk menggambarkan struktur keseluruhan dari kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam sistem, menggambarkan keputusan-keputusan yang diatur oleh kebijakan tersebut, dan elemen-elemen informasi yang mengatur kebijakan.

Diagram struktur kebijakan untuk seluruh subsistem biasanya dibangun secara terpisah dan hubungan antar subsistem ditunjukkan dalam diagram. Kemudian diagram-diagram tersebut disatukan untuk membentuk diagram struktur kebijakan untuk seluruh sistem.



Gambar 14  
 Simbol Diagram Struktur Kebijakan (Sunshil, 1993)

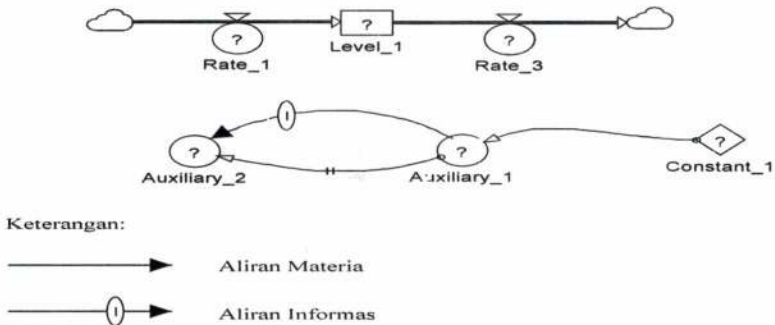
#### 4.5.7 Diagram Alir (*Flow Diagram*)

Tujuan utama dari diagram alir adalah merepresentasikan struktur aliran secara rinci dari sistem dalam bentuk struktur kebijakan yang baik sehingga dapat digunakan untuk menyusun model matematis. Diagram ini memiliki tingkat ketelitian paling tinggi dibanding dengan jenis diagram-diagram lainnya, dengan kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

- 1 Telah membedakan antara subsistem fisik dan subsistem informasi.
- 2 Telah membedakan jenis-jenis variabel yang digunakan yaitu *level*, *rate*, dan *auxiliary*.
- 3 Memiliki hubungan satu-satu dengan persamaan matematis.
- 4 Mengindikasikan adanya *delay* dalam sistem.
- 5 Menunjukkan adanya *smoothing* terhadap beberapa variabel.
- 6 Menunjukkan dengan jenis-jenis dari fungsi-fungsi khusus yang digunakan dalam persamaan matematis.
- 7 Memiliki simbol yang berbeda untuk setiap jenis variabel.

Diagram alir membantu memvisualisasikan hubungan antar variabel-variabel, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang model yang dibuat. Diagram alir akan menunjukkan variabel-variabel *level*, *rate*, *auxiliary*, konstanta dan fungsi-fungsi khusus dalam

program serta bagaimana mereka saling berhubungan. Berikut ini diuraikan beberapa simbol yang digunakan dalam diagram alir sistem dinamik.



Gambar 15  
Simbol dan Diagram Alir (Sunshil, 1993)

#### 4.5.8 Persamaan Model Sistem Dinamik

Representasi sistem dalam diagram hanyalah membantu pembuat model dalam pemahaman dan konseptualisasi sistem, namun untuk dapat disimulasikan dengan komputer, konseptualisasi ini harus diterjemahkan menjadi persamaan matematis.

Simulasi komputer dalam penelitian ini menggunakan alat bantu perangkat lunak POWERSIM yang bersifat *object-oriented* (persamaan didefinisikan langsung pada variabel yang ada pada diagram alir).

Jenis-jenis persamaan dalam model dinamika sistem yang sering digunakan dapat dilihat pada Tabel 9, sebelum penjelasan mengenai persamaan, terlebih dahulu akan diuraikan konsep variabel, konstanta, dan representasi waktu dalam model sistem dinamik yang akan digunakan dalam menyatakan persamaan.

Tabel 10 Jenis-jenis Persamaan dalam Model Sistem Dinamik

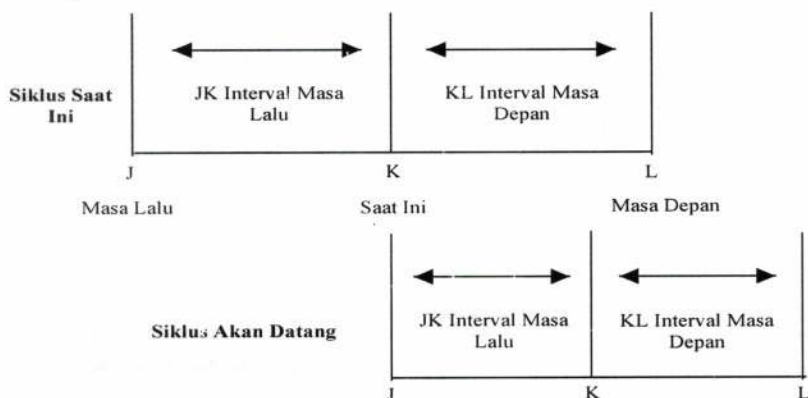
Label	Jenis Persamaan
L	Persamaan Level
N	Persamaan Inisial
R	Persamaan Rate
A	Persamaan Auxiliary
C	Persamaan Konstanta

#### 4.5.9 Variabel dan Konstanta

Seperti model matematis lainnya, dalam model sistem dinamik juga mengenal adanya parameter dan variabel. Parameter atau konstanta adalah suatu nilai yang tidak berubah selama simulasi dijalankan sementara pada variabel nilainya akan berubah sepanjang waktu.

#### 4.5.10 Konsep Representasi Waktu

Model sistem dinamik adalah suatu model yang merepresentasikan waktu masa lalu, saat ini dan masa depan. Konsep representasi waktu ini dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16

Representasi Waktu Model Sistem Dinamis (Sunshil, 1993)

#### 4.5.11 Persamaan Level

Persamaan *level* menghitung akumulasi dari suatu aliran terhadap waktu, dengan bentuk dasar sebagai berikut:

$$\text{LEVEL K} = \text{LEVEL J} + (\text{DT}) * (\text{INFLOW JK} - \text{OUTFLOW JK})$$

Persamaan di atas menyatakan bahwa nilai variabel *level* saat ini (K) merupakan jumlah dari nilai tersebut di masa lalu (J) ditambah dengan perubahan akibat aliran yang mempengaruhi variabel tersebut dari suatu titik waktu di masa lalu sampai saat ini (JK). Lama waktu dari J ke K disebut dengan waktu komputasi, atau interval solusi, yang dinyatakan dengan DT.

#### 4.5.12 Persamaan Rate

Persamaan *rate* digunakan untuk menghitung nilai dari suatu aliran masuk dan aliran keluar dalam persamaan level. Berbeda dengan persamaan *level*, persamaan *rate* tidak memiliki bentuk standar tertentu, dan tergantung pada struktur kebijakan yang ada pada sistem. Batasan yang ada dalam pendefinisian persamaan *rate*, antara lain:

1. Pada umumnya persamaan *rate* tidak mengandung unsur DT, kecuali dalam pemodelan akhir tahun, pemodelan deret waktu, dan sebagai pembatas.
2. Dependensi antar rate harus dihindari, karena akan menimbulkan *circularity error*, yaitu kesalahan pendefinisian sistem akibat ketergantungan antar variabel yang bersifat siklis, sehingga program tidak dapat menentukan variabel mana yang akan dijadikan acuan awal dan simulasi tidak dapat dijalankan.

#### 4.5.13 Persamaan Auxiliary

Persamaan *auxiliary* merepresentasikan komputasi informasi dalam sistem umpan balik. Dalam melakukan representasi sistem ke dalam persamaan matematis, persamaan *rate* akan sulit ditentukan tanpa mengetahui informasi yang mempengaruhi variabel *rate* tersebut. Komputasi dari informasi inilah yang dinyatakan ke dalam bentuk *auxiliary*.

Sama halnya dengan persamaan *rate*, persamaan *auxiliary* tidak memiliki bentuk standar, namun ada batasan yang harus diperhatikan:

1. Persamaan *auxiliary* tidak dapat mengandung unsur DT pada sisi kanan persamaan.
2. Sebuah variabel *auxiliary* secara umum bergantung pada *level* atau *auxiliary* lainnya.
3. Perumusan sekumpulan persamaan *auxiliary* secara simultan, misalnya susunan variabel *auxiliary* yang membentuk loop tanpa ada variabel *level*, akan menimbulkan pesan kesalahan dalam simulasi.

#### 4.5.14 Interval Solusi

Interval solusi (DT) adalah suatu parameter waktu dalam simulasi yang digunakan dalam persamaan *level* akan mengkonversikan variabel *rate* ke dalam *level*. Penentuan DT harus dilakukan dengan cermat, karena pemilihan DT yang terlalu besar akan menyebabkan perilaku sistem tidak dapat diamati secara rinci, sedangkan DT yang terlalu kecil akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar dalam simulasi. Prinsip sederhana dalam penentuan DT: dalam setiap model, DT harus kurang dari setengah nilai delay tingkat pertama yang digunakan dalam sistem, namun untuk menghemat waktu komputasi, DT harus tidak kurang dari seperlima nilai delay terendah.

#### 4.5.15 Delay

Dalam sistem informasi umpan balik, adanya *delay* (penundaan) akan menciptakan karakteristik dinamis dari suatu sistem. Ada dua bentuk *delay*, yaitu:

1. *Delay* fisik/material, seperti aliran material, aliran tenaga kerja, aliran pesanan, *delay* pengapalan, *delay* proses dan *delay* konstruksi.
2. *Delay* informasi, seperti informasi tingkat penjualan, produktivitas.

*Delay* memiliki beragam orde diantaranya: *delay* orde pertama, orde kedua, orde ketiga, orde keenam, dan lain-lain. Setiap *delay* dengan

orde tertentu berlaku pada situasi khusus yang bergantung pada respon sementara yang diharapkan selama terjadinya *delay*. Bentuk *delay* yang sering digunakan adalah *delay* orde pertama dan *delay* orde ketiga. Sedangkan pemilihan *delay* akan tergantung bagaimana perilaku sistem nyata dalam merespon perubahan.

#### 4.5.16 Validasi Model Sistem Dinamik

Signifikansi sebuah model bergantung pada kemampuan model tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Validasi model sistem dinamik pada dasarnya adalah suatu proses membangun kepercayaan pada kegunaan model sebagai alat bantu analisis dan perancangan kebijakan. Dalam proses validasi ini, sebuah model tidak akan dapat dinyatakan valid secara absolut dimana tidak adanya bukti bahwa model dapat merepresentasikan suatu realita dengan benar-benar mirip secara absolut. Sehingga dengan melakukan proses pengujian model sistem dinamik terhadap bukti-bukti empiris akan meningkatkan kepercayaan seseorang terhadap model. Pertanyaan atas validasi suatu model sebaiknya ditinjau dari segi kecocokan dan konsistensi model tersebut. Pertanyaan tentang validasi model akan lebih bermanfaat bila ditinjau dari dua pertanyaan berikut:

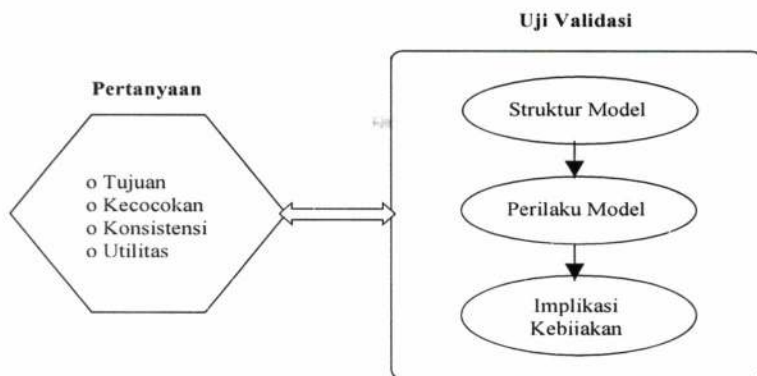
1. Apakah model cocok dengan tujuan dan permasalahan yang akan dipecahkan?
2. Apakah model konsisten dalam menggambarkan realita yang ingin ditampilkan?

Selanjutnya, sebuah model diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan perilaku suatu sistem di masa depan sehingga dapat dirancang serangkaian kebijakan untuk menghindari dari kondisi yang tidak diinginkan.

Pengujian terhadap model sistem dinamik secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama sebagai berikut:

1. Uji validasi struktur, yaitu pengujian relasi antar variabel yang ada di dalam model, dan disesuaikan dengan keadaan pada sistem yang sebenarnya.

2. Uji validasi perilaku, yaitu pengujian terhadap kecukupan struktur model dengan melakukan penilaian terhadap perilaku yang dihasilkan model.
3. Uji validasi implikasi kebijakan, yaitu pengujian terhadap perilaku model terhadap berbagai rekomendasi kebijakan.

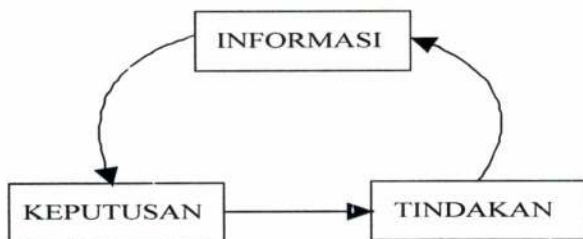


Gambar 17  
Validasi Model Sistem Dinamis (Sunshil, 1993)

## 4.6 Pengembangan Model Kebijakan

### 4.6.1 Pembuatan Keputusan Dalam Perspektif Sistem

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kaidah/aturan (*rule*) yang menyatakan bagaimana keputusan-keputusan operasional harian dibuat. Sedangkan keputusan (*decision*) adalah tindakan (*action*) yang diambil pada suatu waktu tertentu dan merupakan hasil pengaplikasian aturan-aturan kebijakan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang berlaku pada saat ini. Hubungan antara keputusan dengan informasi dapat dilihat pada Gambar 18 berikut ini.



Gambar 18  
Keputusan dan Umpan Balik Informasi (Tasrif, 2005)

Dalam setiap kotak dapat terjadi:

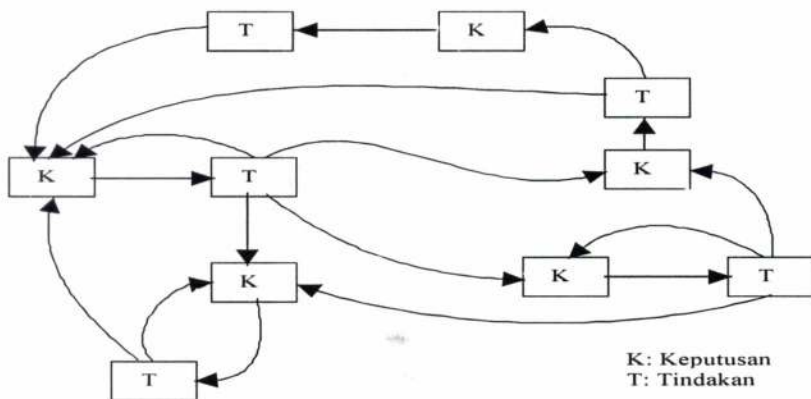
1. Kelambatan (*delay*)
2. Penguatan (positif, negatif, non linier), dan
3. Gangguan (*noise* atau *distortion*)

Dalam fenomena (sistem) sosial yang sebenarnya, umpan balik informasi tersebut akan membentuk suatu sistem pembuatan keputusan lingkaran banyak (*multiloop decision-making system*), seperti diperlihatkan pada Gambar 18.

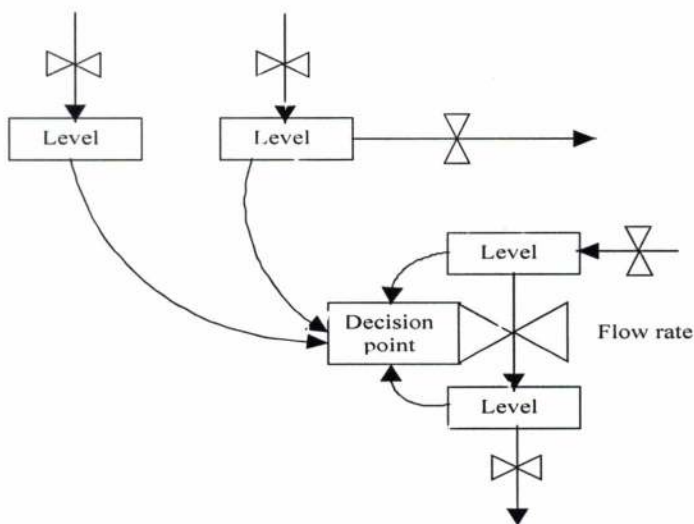
Sedangkan proses pembuatan keputusan dalam struktur sistem dapat dilihat pada Gambar 19.

Secara mendasar, pembuatan keputusan akan mencakup 3 (tiga) hal, seperti diperlihatkan pada Gambar 20, yaitu:

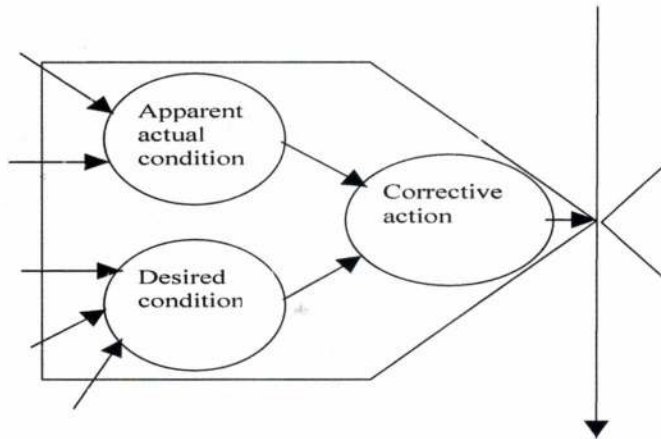
1. Suatu konsep tentang keadaan yang diinginkan (*desired state of affairs*)
2. Keadaan yang tampak (dirasakan) terhadap kondisi sistem yang sebenarnya (*apparent state of actual conditions*)
3. Tindakan perbaikan (*corrective action*) yang diambil berdasarkan 2 (dua) hal sebelumnya.



Gambar 19  
Sistem Pembuatan Keputusan Lingkar Banyak (Tasrif, 2005)



Gambar 20  
Pembuatan Keputusan Dalam Struktur Sistem (Tasrif, 2005)



Gambar 21  
Proses Pembuatan Keputusan (Tasrif, 2005)

Kata kebijakan (*policy*) digunakan sebagai suatu istilah yang luas untuk menerangkan bagaimana proses keputusan (*decision process*) mengkonversikan informasi menjadi tindakan.

Dalam model analisis kebijakan, kebijakan adalah suatu pernyataan formal yang memberikan kejelasan tentang hubungan-hubungan antar sumber-sumber informasi dan jalur-jalur keputusan yang dihasilkannya (*resulting decision flows*). Dalam literatur, pernyataan tersebut dikenal sebagai suatu kaidah/aturan keputusan (*decision rule*). Dalam bidang sistem kendali, pernyataan tersebut dikenal sebagai fungsi alih (*transfer function*).

Ada 3 (tiga) tingkat/aras (*level*) gambaran (abstraksi) pembuatan keputusan, yaitu:

- Aras pertama: tindakan tak beralasan secara acak (*random unreasoned action*), pada tingkat yang paling rendah, yang tidak bergantung kepada masukan-masukan dan tidak memiliki suatu dasar (basis).
- Aras kedua: reaksi-reaksi intuitif yang tidak rasional (*unrationalized*

*intuitive reactions*). Dalam kenyataannya reaksi ini merupakan hasil dari aliran-aliran informasi yang ada (tersedia) tetapi tanpa adanya suatu pemahaman yang dimiliki oleh si pengambil keputusan tentang struktur dan dasar tindakan-tindakannya.

- Aras ketiga: adanya suatu kesadaran (*awareness*) tentang alasan-alasan formal pembuatan keputusan.

Bergelut dengan karakteristik dinamis sistem-sistem sosial, setidaknya tidaknya diperlukan suatu pengungkapan kerangka sentral struktur pembuatan keputusan yang esensial. Untuk ini harus ada pendekatan tentang kebijakan pengendalian (*controlling policy*) pada setiap titik keputusan yang penting dalam sistem. Pemahaman kebijakan ini dapat dikerjakan dengan sempurna, jika:

1. Memiliki suatu konsep yang memadai (*tepat/proper*) tentang apakah suatu keputusan itu dan pentingnya suatu kebijakan yang dapat menjelaskan proses keputusan itu;
2. Memiliki suatu struktur yang memadai yang menghubungkan status (keadaan) sistem terhadap kebijakan, keputusan-keputusan, dan tindakan;
3. Sadar bahwa proses tersebut mengalami gangguan (*noise*) dan tidak akan mendapatkan dan memerlukan pengungkapan (representasi) pembuatan keputusan (*decision making*) yang sangat teliti;
4. Memanfaatkan sebaik-baiknya keunggulan (kelebihan) pengalamannya dan informasi deskriptif yang luas yang boleh jadi mengandung 98% informasi yang esensial dalam pembuatan keputusan. Dua persen sisanya berasal dari data statistik dan numerik yang formal; dan
5. Menyadari bahwa suatu pernyataan kuantitatif kebijakan yang formal tidaklah membawa implikasi, dengan sendirinya atau tidak, adanya suatu ketelitian yang mutlak. Selanjutnya dapat dibuat pernyataan kuantitatif formal yang berhubungan dengan setiap pernyataan yang dapat diungkapkan melalui suatu bahasa yang dimengerti. Ketelitian deskriptif yang relatif sedikit tidaklah menghambat/mencegah pengkuantifikasian ide-ide tentang suatu kebijakan keputusan (*decision policy*). Pemberian suatu bilangan/angka tidaklah menaikkan

ketelitian (*accuracy*/ketepatan) pernyataan yang semula (orisinal). Pendapat (*belief*/kepercayaan) umum yang mengatakan bahwa tidak dapat mengkuantifikasikan suatu aturan keputusan (*decision rule*) karena tidak mengetahuinya dengan ketelitian yang tinggi, adalah/ merupakan pencampuradukan 2 (dua) pertimbangan yang sangat berbeda/terpisah. Mengkuantifikasi sesuatu dapat dilakukan terlepas dari ketelitiannya. Setelah itu, berkepentingan (bergelut) dengan pernyataan apakah ketelitian yang memadai itu.

#### 4.6.2 Pemodelan Kebijakan

Pemanfaatan yang prinsip suatu model dinamik adalah untuk mempelajari pengaruh kebijakan-kebijakan terhadap perilaku sistem. Kebijakan merepresentasikan dasar-dasar (basis) pengendalian aliran-aliran pada semua bagian (titik) dalam suatu sistem nyata. Disamping mencakup konsep kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keputusan manusia dan manajerial, model tersebut harus mencakup pula keputusan-keputusan yang muncul karena adanya kendala-kendala fisik yang bebas dari keputusan-keputusan manusia. Kategori pertama disebut *overt decisions* (keputusan yang jelas/terang) sedangkan kategori kedua disebut *implicit decision*.

Dalam memformulasikan fungsi-fungsi keputusan (persamaan-persamaan *rate*) harus memperhatikan bahwa keputusan itu dibangkitkan oleh besaran-besaran (variabel-variabel) yang pada kenyataannya harus tersedia pada suatu titik keputusan.

**Tasrif, 2005** mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan, dapat bergerak maju (*progress*) melalui 4 tahap, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang cukup penting untuk dilibatkan/ dimasukkan?

Kemudian untuk setiap faktor tersebut:

- Ke arah manakah efek yang ditimbulkannya?
- Seberapa besar efek tersebut?
- Ketidaklinieran seperti apakah yang perlu dikenali?

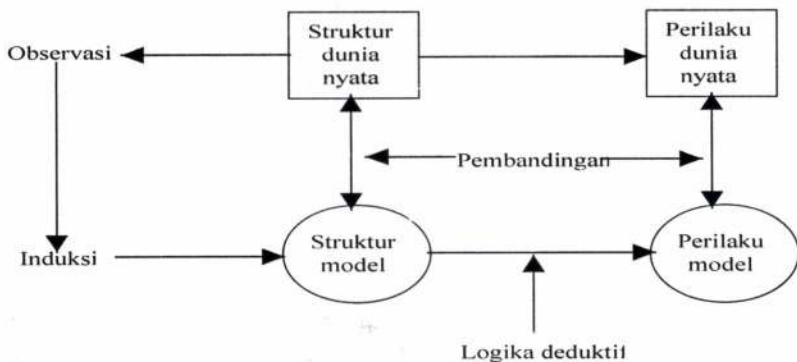
### 4.6.3 Prinsip-prinsip Pemodelan Kebijakan

Model yang memenuhi syarat dan mampu dijadikan sarana analisis untuk merumuskan (merancang) kebijakan haruslah merupakan suatu wahana untuk menemukan jalan dan cara intervensi yang efektif dalam suatu sistem (fenomena). Melalui jalan dan cara intervensi inilah perilaku sistem yang diinginkan dapat diperoleh (perilaku sistem yang tidak diinginkan dapat dihindari).

Dengan demikian model yang dibentuk untuk tujuan seperti di atas haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Karena efek suatu intervensi (kebijakan), dalam bentuk perilaku, merupakan suatu kejadian berikutnya, maka untuk melacaknya unsur (elemen) waktu perlu ada (dinamik)
2. Mampu mensimulasikan bermacam intervensi dan dapat memunculkan perilaku sistem karena adanya intervensi tersebut.
3. Memungkinkan mensimulasikan suatu intervensi yang efeknya dapat berbeda secara dramatik dalam jangka pendek dan jangka panjang (kompleksitas dinamik);
4. Perilaku sistem di atas dapat merupakan perilaku yang pernah dialami dan teramati (historis) atau pun perilaku yang belum pernah teramati (pernah dialami tetapi tidak teramati atau belum pernah dialami tetapi kemungkinan besar terjadi); dan
5. Mampu menjelaskan mengapa suatu perilaku tertentu (transisi yang sukar misalnya) dapat terjadi.

Prosedur ilmiah pemodelan kebijakan dapat dilihat pada Gambar 22 berikut ini.



Gambar 22  
Prosedur Ilmiah Pemodelan Kebijakan (Tasrif, 2005)

Usaha pertama dari penyelidikan ilmiah adalah upaya untuk memahami bagaimana suatu perilaku dunia nyata muncul dari strukturnya. Karena tidak ada cara langsung yang dapat digunakan untuk mengetahuinya, suatu model yang mewakili struktur dunia nyata itu harus dikonstruksikan dan perilakunya kemudian diperoleh melalui logika deduktif. Struktur model ini didapat melalui suatu proses induksi yang didasarkan kepada pengetahuan empirik tentang dunia nyata tersebut. Pembandingan-pembandingan baik struktur maupun perilaku model dengan struktur dan perilaku dunia nyata akan menegakkan kepercayaan itu akan menjadi dasar kesahihan model tersebut.

Struktur terdiri atas struktur fisik (stok dan jaringan aliran materi) dan struktur pengambilan keputusan (*decision-making structure*) bermacam aktor di dalam sistem. Struktur pengambilan keputusan di sini dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah pembuatan keputusan dan sumber informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan itu. Oleh karena itu, model untuk analisis kebijakan dalam kasus interaksi ekonomi, kependudukan, dan lingkungan hidup itu haruslah merupakan suatu model dinamik dan mampu merepresentasikan secara relatif cukup rinci (*detail*), aras-mikro (*micro-level*) individu dan industri (perusahaan), relasi-relasi fisik dan

teknik, dan proses-proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh aktor-aktor di dalam sistem.

Prinsip-prinsip untuk membuat model dinamik menurut *Sterman, 1981*, adalah:

- Keadaan yang diinginkan dan keadaan yang terjadi harus secara eksplisit dinyatakan dan dibedakan dalam model;
- Adanya struktur stok dan aliran dalam kehidupan nyata harus dapat direpresentasikan di dalam model;
- Aliran-aliran yang secara konseptual berlainan cirinya harus secara tegas dibedakan di dalam menanganinya;
- Hanya informasi yang benar-benar tersedia bagi aktor-aktor di dalam sistem yang harus digunakan dalam pemodelan keputusan-keputusannya;
- Struktur kaidah pembuatan keputusan di dalam model haruslah sesuai (cocok) dengan praktek-praktek manajerial; dan
- Model haruslah *robust* dalam kondisi-kondisi ekstrim.

#### 4.6.4 Model *Cost Benefit Analysis (CBA)*

*CBA* adalah suatu teknik untuk menilai efisiensi ekonomi suatu program atau proyek dalam menggunakan sumber daya yang tersedia.

Cakupan *CBA*:

- 1 Analisis finansial
- 2 Analisis ekonomi
- 3 Analisis sosial

*Cost Benefit Analysis* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$O = I + \sum_{i=1}^n \frac{M_i - B_i}{(1+r)^i}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- I : Investasi awal  
M : Manfaat  
B : Biaya  
n : waktu  
r : suku bunga diskonto

#### 4.6.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah cara melakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*). Namun, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*), yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan antara kondisi internal yaitu: kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dengan kondisi eksternal yaitu: peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang ada, kemudian diimplementasikan dalam matriks *SWOT*, untuk mendapatkan strategi terbaik (*the best solution*). Sejalan dengan hal tersebut Rangkuti (2006:18-19) mengatakan bahwa: Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (organisasi). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Langkah awal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis SWOT adalah mengetahui posisi organisasi/perusahaan. Membuat keputusan untuk memilih alternatif strategi sebaiknya dilakukan setelah organisasi/perusahaan mengetahui terlebih dahulu posisi organisasi/perusahaan pada kuadran yang mana sehingga sehingga strategi yang paling tepat karena sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki. Posisi organisasi/perusahaan dapat berada pada salah satu dari kuadran yang ada (kuadran I, II, III dan IV) sebagaimana pada gambar berikut ini:



Gambar 23

Posisi Organisasi/perusahaan pada berbagai kondisi dilihat dari faktor-faktor S,W,O, dan T

Sumber: Marimin (2004:59).

Marimin (2004:59) mengemukakan bahwa:

Dengan mengetahui posisi perusahaan pada kuadran yang tepat maka perusahaan dapat mengambil keputusan dengan tepat yaitu:

- Jika posisi perusahaan berada pada kuadran I maka menandakan bahwa situasi ini sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditetapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (*growth oriented strategy*).
- Perusahaan yang berada pada kuadran II berarti perusahaan menghadapi berbagai ancaman, namun perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang, dengan cara strategi diversifikasi.

- c. Perusahaan yang berada pada kuadran III menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai peluang pasar yang sangat besar, tetapi di pihak lain, perusahaan menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi yang harus diambil adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
- d. Posisi perusahaan pada kuadran IV menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Posisi organisasi/organisasi pada kuadran dalam Analisis SWOT adalah koordinat (skor kekuatan-kelemahan), koordinat (skor peluang-ancaman). Skor masing-masing unsur-unsur faktor eksternal dan internal diperoleh dari bobot masing-masing unsur dikalikan dengan *rating* unsur tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya menurut responden. Langkah selanjutnya adalah menjangkau persepsi orang-orang yang dianggap mengetahui persoalan dengan baik atau memang berkecimpung didalamnya atau disebut *expert* terhadap faktor-faktor internal dan eksternal sekaligus penilaian mereka terhadap faktor-faktor tersebut.

Penilaian *expert* terhadap faktor internal-eksternal akan menghasilkan kelompok faktor-faktor: *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, *Threat*. Kemudian, dilakukan analisa matriks *SWOT*, dengan melakukan interaksi *merger* (penggabungan) dari kelompok faktor internal (*Strength-Weakness*) dengan kelompok faktor eksternal (*Opportunity-Threat*), sehingga menghasilkan strategi interaksi matriks *SWOT*, yang berupa:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*),
2. Strategi ST (*Strength-Threat*),
3. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*) dan
4. Strategi WT (*Weakness-Threat*).

Interaksi faktor internal dan faktor eksternal serta strategi kombinasi yang dihasilkan dari interaksi tersebut dapat dilihat pada matriks *SWOT* pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11  
Matriks SWOT-Interaksi IFAS-EFAS

<p><b>IFAS</b></p> <p><b>EFAS</b></p>	<p><i>Strength (S)</i></p> <p>Tentukan masing-masing 5-10 faktor kekuatan internal</p>	<p><i>Weaknesses (W)</i></p> <p>Tentukan masing-masing 5-10 faktor kelemahan internal</p>
<p><i>Opportunities (O)</i></p> <p>Tentukan masing-masing 5-10 faktor peluang eksternal</p>	<p><b>Strategi SO</b> (<i>Comparative Advantage</i>)</p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (strategi agresif)</p>	<p><b>Strategi WO</b> (<i>Investment/ Divestment</i>)</p> <p>Strategi untuk meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (strategi <i>turn-around</i>)</p>
<p><i>Threats (T)</i></p> <p>Tentukan masing-masing 5-10 faktor tantangan eksternal</p>	<p><b>Strategi ST</b> (<i>Mobilization</i>)</p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (strategi diversifikasi)</p>	<p><b>Strategi WT</b> (<i>Damage Control</i>)</p> <p>Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari tantangan (strategi defensif)</p>

Sumber: Kearns dalam Salusu (2008:357) dan Darmakusuma (2010:9)

Penjelasan:

- IFAS = *Internal Factor Analysis System*  
EFAS = *External Factor Analysis System*
- Strategi SO = adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan/meraih peluang.
- Strategi ST = adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

- d. Strategi WO = adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang.
- e. Strategi WT = adalah strategi meminimalkan kelemahan untuk lepas dari ancaman.

Selanjutnya Kearns dalam Salusu (2008:356-358) menjelaskan sebagai berikut:

1. *Comparative advantage*: apabila organisasi menghadapi dua elemen strategik yang paling baik bertemu sehingga para eksekutif tidak boleh membiarkannya hilang, tetapi sebaliknya harus memperkuatnya dengan berbagai perencanaan yang mampu mendukungnya.
2. *Investment/divestment*: memberikan pilihan kepada para eksekutif karena situasinya kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, tetapi tidak ada kemampuan organisasi untuk menggarapnya dan memberikan reaksi positif. Kalau dipaksakan, bisa memakan biaya terlalu besar sehingga merugikan organisasi. Lebih baik tinggalkan dan serahkan kepada organisasi lain yang mungkin memiliki posisi yang lebih baik. Bisa juga para eksekutif tidak berbuat apa-apa.
3. *Mobilization*: kontak interaksi dan pertemuan antara ancaman/tantangan dari luar yang diidentifikasi oleh para pengambil keputusan dengan kekuatan organisasi. Para eksekutif hendaknya memobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar, bahkan kalau mungkin mengubahnya sebagai peluang.
4. *Damage control*: strategi yang harus diambil untuk mengendalikan kerugian karena organisasi dihadapkan pada ancaman dari luar dan lemahnya sumber daya. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan sedikit demi sedikit membenahi sumber daya, dengan harapan mampu memperkecil ancaman dari luar. Usaha itu diarahkan pada upaya mengalihkan kelemahan menjadi kekuatan, sungguhpun mungkin akan memakan waktu lama.

Strategi-strategi yang dikembangkan organisasi didasarkan atas posisi organisasi berada dalam matriks SWOT sehingga strategi yang diambil

merupakan strategi yang paling tepat. Disamping itu strategi yang dikembangkan oleh Kearns tersebut memberikan pilihan alternatif bagi organisasi apabila organisasi berada pada salah satu bagian dari matriks SWOT tersebut.

#### 4.6.6 Teknik Pengambilan Keputusan

Beberapa prinsip dalam teknik pengambilan keputusan

- Teknik optimisasi mencari solusi terbaik dari **jumlah alternatif**, bukan dari **seluruh alternatif**
- Jika alternatif yang harus dipilih terbatas, misal dua alternatif:
  - Nyatakan kriteria terpenting dari persoalan tersebut.
  - Tentukan bobot kepentingan dari criteria tersebut.
  - Bandingkan dan pilih alternatif terbaik.
- Alternatif terpilih sangat ditentukan oleh criteria yang digunakan dan bobot kepentingannya.

Contoh Cara Perhitungan Total Skor pada alternatif pilihan dengan Metode "Simple scoring"

No	Alternatif pilihan	Nilai/Skor alternatif pilihan pada Tiap Kriteria						Total Skor
		Krit 1 Bbt b1	Krit2 Bbt b2	Krit3 Bbt b3	Krit4 Bbt b4	.....	Krit-n Bbt bn	
1	Alt-1	A1	A2	A3	A4	.....	AN	$\sum_{i=1}^n a_{ix}b_i$
2	Alt-2	C1	C2	C3	C4	.....	CN	$\sum_{i=1}^n C_{ix}b_i$

Contoh Cara Perhitungan Total Skor Alternatif Pilihan dengan Metode "Weighted Scoring"

No	Alternatif pilihan	Nilai/Skor alternatif pilihan pada Tiap Kriteria						Total Skor
		Krit 1	Krit2	Krit3	Krit4	.....	Krit-n	
1	Alt-1	A1	A2	A3	A4	.....	AN	$\sum_{i=1}^n a_i$
2	Alt-2	B1	B2	B3	B4	.....	BN	$\sum_{i=1}^n b_i$

### Contoh Penerapan Optimasi dengan Teknik Skoring terbobot dengan 2 kriteria

**Contoh:** Penentuan lokasi bandara.

Kriteria:

Biaya dan waktu tempuh rata-rata dari simpul kegiatan yang dilayani

Lokasi	Biaya investasi.	Waktu tempuh
A	\$ 10,000,000	40 menit.
B	\$ 15,000,000	20 menit.

Jika bobot biaya adalah 0.6 dan waktu adalah 0.4, maka:

Nilai Kepentingan A =  $0.6 \cdot 2 + 0.4 \cdot 2 = 1.2 + 0.8 = 2.0$ .

Nilai kepentingan B =  $0.6 \cdot 3 + 0.4 \cdot 1 = 1.8 + 0.4 = 2.2$ .

Pilihan terbaik dengan criteria biaya dan waktu adalah lokasi A.

#### 4.6.7 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Proses hirarki analitik (*Analytical Hierarchy Proses/AHP*) dikembangkan pertama kali oleh Thomas L. Saaty dari Universitas Pittsburg Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Saaty (1993) mengatakan proses hirarki adalah merupakan metode atau alat yang dapat digunakan oleh seorang pengambil keputusan untuk memahami kondisi suatu sistem, membantu melakukan prediksi dan pengambilan keputusan.

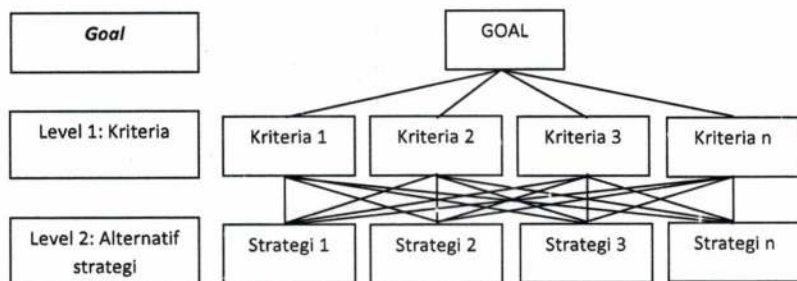
AHP merupakan salah satu metode untuk membantu menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria (*multi criteria*). Di samping bersifat multi kriteria, AHP juga didasarkan pada suatu proses yang terstruktur dan logis. Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur. Kegiatan tersebut dilakukan oleh *expert* (ahli-ahli yang representatif) berkaitan dengan alternatif-alternatif yang akan disusun prioritasnya. Para *expert* dalam melakukan analisisnya dengan menggunakan *personal judgement* berdasarkan pengetahuan/kemampuan dan pengalamannya yang diperkaya dengan data sekunder dari literatur maupun opini pendapat masyarakat.

Tahapan-tahapan proses dalam AHP adalah mengidentifikasi, memahami dan menilai interaksi-interaksi dari sistem yang ada. Penilaian dilakukan dengan teknik komparasi berpasangan terhadap elemen-elemen keputusan pada suatu tingkat hirarki keputusan dengan menggunakan nilai skala pengukuran yang dapat membedakan transformasi dalam bentuk pendapat (kualitatif) ke dalam bentuk nilai angka (kuantitatif). Tingkat kesahihan (validitas) pendapat tergantung pada konsistensi dan akurasi pendapat.

Model AHP memiliki beberapa prinsip dasar antara lain:

- 1) Penyusunan hirarki (*decomposition*) yaitu menggambarkan dan menguraikan secara hirarki dengan cara memecah-mecah persoalan menjadi unsur yang terpisah-pisah. Proses penyusunan hirarki secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama* adalah mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki atau lazim disebut *goal*. *Goal* disini adalah masalah yang akan dicari

pemecahannya lewat model *AHP*. *Kedua* Setelah penentuan tujuan maka dilakukan penentuan kriteria yang diperlukan atau yang sesuai dengan tujuan keseluruhan itu. Kriteria biasanya terdiri dari syarat-syarat atau keadaan yang kiranya dapat menunjang tercapainya sebuah *goal* dan bisa masih bersifat umum atau sudah bersifat khusus. Apabila kriteria yang ditentukan sudah bersifat khusus maka tidak dibutuhkan sub kriteria lagi. *Yang ketiga atau terakhir* adalah mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi di bawah kriteria. Alternatif ini dapat bersumber dari alternatif strategi yang telah dirumuskan pada Analisis SWOT. Model hirarki umum *AHP* dapat dilihat pada Gambar 24 berikut ini:



Gambar 24  
Model Hirarki *AHP* (Saaty, 1993)

## 2) Penilaian Kriteria dan Alternatif.

Kriteria dan alternatif dinilai melalui teknik perbandingan berpasangan (*pairwise comparasion*) terhadap elemen elemen pada suatu tingkatan hirarki. Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot numerik dan membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain. Dalam hal penelitian ini maka penilaian kriteria dan alternatif adalah membandingkan masing-masing alternatif strategi yang ada secara berpasang-pasangan. Menurut Saaty dalam Marimin (2004:79) skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif

dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12  
Skala Banding Secara Berpasangan

Skala	Pengertian	Keterangan
1	Kedua elemen Sama pentingnya ( <i>equal importance</i> )	Kriteria/Alternatif A sama penting dengan kriteria/alternatif B
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting ( <i>moderate importance</i> )	A sedikit lebih penting dari B
5	Lebih penting ( <i>essential/strong importance</i> )	A jelas lebih penting dari B
7	Sangat lebih penting ( <i>very strong importance</i> )	A sangat jeas lebih penting dari B
9	Mutlak sangat penting ( <i>extreme importance</i> )	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Merupakan angka kompromi diantara penilaian diatas	Apabila ragu-ragu diantara dua nilai yang berdekatan

Sumber: Saaty (1993)

Dalam hal pengisian persepsi kelompok *expert* ada dua cara umum yang biasa dipakai yaitu:

1. seluruh *expert* berkumpul disuatu tempat dan mereka mengeluarkan satu persepsi untuk satu perbandingan dan;
2. cara pengisian kuisisioner.

Cara kedua ini akan menghasilkan  $n$  persepsi ( $n$  jumlah responden/ *expert*) untuk satu perbandingan.

Karena model *AHP* menghendaki satu persepsi dalam satu perbandingan, maka dari  $n$  persepsi harus dihasilkan satu persepsi yang mewakili seluruh *expert*. Cara umum yang dipakai pembuat

AHP adalah dengan cara mencari nilai rata-rata. Ada dua cara yang dipakai yaitu :

- (i) rata-rata hitung dan;
- (ii) rata-rata ukur.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

**(i) Rata-rata Hitung**

Untuk memperoleh rata-rata hitung ada dua asumsi. Asumsi pertama adalah peran setiap responden/*expert* adalah sama, sehingga nilai rata-rata yang diperoleh adalah:

$$aw = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n}$$

dimana: aw = penilaian akhir (penilaian gabungan).

$a_i$  = penilaian responden ke-i.

n = banyaknya responden.

Asumsi kedua peran tiap responden berbeda, tergantung pada bobot tertentu. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah:

$$aw = \frac{a_1w_1 + a_2w_2 + a_3w_3 \dots + a_nw_n}{n}$$

dimana: aw = penilaian akhir (penilaian gabungan).

$a_i$  = penilaian responden ke-i.

$w_i$  = bobot tertentu responden ke-i.

n = banyaknya responden.

**(ii) Rata-rata Ukur**

Rata-rata ukur adalah akar pangkat n dan hasil perkalian bilangan sebanyak n, sebagai berikut:

$$aw = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n}$$

dimana: aw = penilaian akhir (penilaian gabungan)

$a_i$  = penilaian responden ke- $i$ .  
 $n$  = banyaknya responden.

Rata-rata ukur lebih cocok untuk deret bilangan yang sifatnya perbandingan (rasio) dan mampu mengurangi gangguan yang ditimbulkan salah satu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Untuk setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif dapat dibandingkan sesuai dengan *judgement* yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas.

### 3. Penentuan Prioritas.

Hasil pengisian perbandingan berpasangan dari persepsi *expert* (responden) tersebut, disusun dalam bentuk matriks perbandingan (*Matrix Pairwise*). Kemudian dilakukan perhitungan vektor eigen (*eigen vector*) dan nilai eigen (*eigen value*) serta perhitungan konsistensi yang akan menentukan prioritas pilihan. *Eigenvector* adalah suatu vektor yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks hasilnya adalah vektor itu sendiri dikalikan sebuah bilangan skalar atau parameter, dimana bilangan itu adalah *eigenvalue*. Jika *eigenvector* tersebut kita beri simbol  $W$ , *eigenvalue* simbol  $\lambda$  dan matrik bujursangkar  $A$ , maka bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

$$A \cdot W = \lambda \cdot W$$

Keterangan:  $A$  = Matriks perbandingan (*Matrix Pairwise*).

$\lambda$  = Nilai Eigen (*Eigenvalue*).

$W$  = Vektor Eigen (*Eigenvector*).

Dari *eigenvector* yang diperoleh ditentukan *local priority*, yaitu prioritas untuk satu level. Prioritas keseluruhan diperoleh dengan mengalikan prioritas elemen pada level di atasnya sampai ke level akhir. Nilai eigen

maksimum yang menentukan prioritas local maupun keseluruhan.

4. Konsistensi Logis.

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Konsistensi berarti dua hal. Pertama menunjukkan pemikiran atau objek yang serupa dikelompokkan menurut homogenitas dan relevansinya. Yang kedua adalah intensitas relasi antar gagasan atau antar obyek yang dirasakan pada satu kriteria tertentu sating membenarkan secara logis. Pengukuran konsistensi dalam model *AHP* dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah mengukur konsistensi setiap matriks perbandingan dan tahap kedua adalah mengukur konsistensi keseluruhan hirarki. Setiap perbandingan dinyatakan *konsisten 100 %* apabila memenuhi:

$$a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$$

Setiap angka dalam matriks perbandingan pada dasarnya adalah sebuah rasio karena angka yang timbul didasarkan atas perbandingan antara dua elemen. Apabila tertulis angka atau skala 7 dalam sebuah matriks perbandingan, maka itu tidak lain adalah 7/1. Konsistensi dalam sebuah matriks perbandingan diukur melalui rumus

$$A.W = \sum \max.W$$

Indeks Konsistensi (CI) diperoleh dari:  $CI =$

Untuk mengetahui apakah CI dengan besaran tertentu cukup baik atau tidak, perlu diketahui rasio yang dianggap baik, yaitu apabila  $CR \leq 0,1$ .

Rumus CR adalah:  $CR = CI/RI$  di mana :  $RI = \text{Random Index}$

Nilai RI merupakan nilai random indeks yang dikeluarkan oleh *Oarkridge Laboratory* yang berupa tabel berikut ini:

Tabel 13  
Tabel Nilai RI

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,56

Sumber: Marimin (2004:84)

Setelah melalui tahap penyusunan hirarki, menetapkan prioritas dan menghitung konsistensi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sensitivitas. Analisis ini bertujuan untuk melihat seberapa sensitif dari prioritas yang dihitung apabila terjadi perubahan penilaian apabila tingkat inkonsistensi matriks yang bersangkutan lebih dari 10%. Diharapkan prioritas yang tidak terlalu berfluktuasi apabila ada perubahan kecil dalam penilaian. Analisis sensitivitas dipakai pula untuk memprediksi keadaan apabila terjadi suatu perubahan yang cukup besar, misalnya perubahan bobot prioritas atau urutan prioritas kriteria karena adanya perubahan kebijakan. Apabila dikaitkan dengan suatu periode waktu maka dapat dikatakan bahwa analisis sensitivitas adalah unsur dinamis dari sebuah hirarki. Artinya, penilaian yang dilakukan pertama kali dipertahankan untuk suatu angka waktu tertentu dan adanya perubahan kebijakan atau tindakan cukup dilakukan dengan analisis sensitivitas untuk melihat efek yang terjadi. Penggunaan teknik AHP dalam menentukan pilihan kebijakan dapat dibantu dengan menggunakan software komputer, diantaranya adalah *Criterion Decision Plus* dan *Expert Choice*.

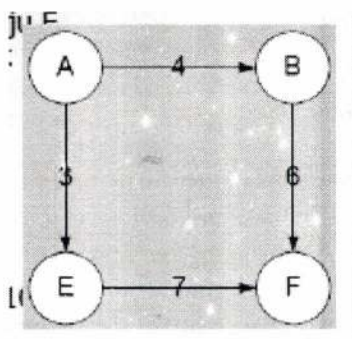
#### 4.6.8 Algoritma Rute Terpendek (Biaya Terendah)

Biasanya menggunakan Algoritma Heuristik, yang bisa diterapkan untuk:

- Pengambilan keputusan permasalahan sehari-hari.
- Pengambilan keputusan permasalahan yang kompleks.

Contoh persoalan sederhana:

Penentuan rute terpendek dari A menuju F, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 25  
Persoalan Sederhana Rute Terpendek

Dengan menggunakan Algoritma Heuristik, yang disebut *Nearest-neighbour*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari A ke B: 4.

Dari A ke E: 3.

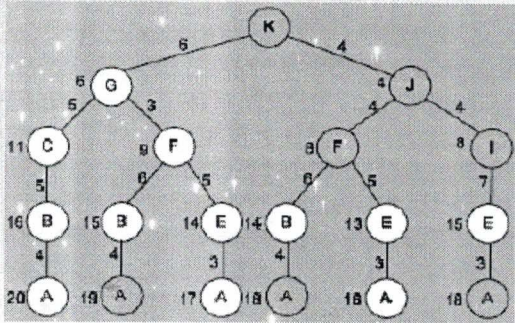
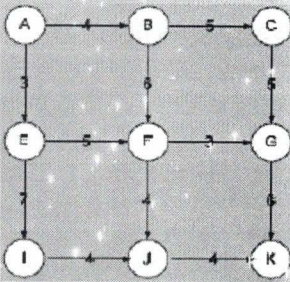
Pilih terdekat, yaitu A ke E.

Dari E ke F: 7.

Rute terpilih: A - E - F, jarak 10.

Contoh persoalan lebih kompleks bisa dilihat pada Gambar 26 berikut ini.

■ Penentuan rute terpendek dari A menuju K.



■ Solusi optimum:

A-E-F-J-K, jarak=16.

Gambar 27

Persoalan Rute Terpendek yang Lebih Kompleks

4.6.9. Latihan

1. Suatu wilayah memiliki tingkat konsumsi tahun 2009 sebesar Rp 50T. Pada tahun tersebut, tabungan masyarakat di wilayah tersebut setelah pembelajaan untuk konsumsinya mencapai Rp 40T. Berapa pendapatan masyarakat di wilayah tersebut tahun 2009?
2. Dengan menggunakan data wilayah X selama 10 tahun terakhir didapat rumusan bahwa  $I_p = 0.3\Delta PDB + 0.0025PDB(n-1) + 0.1 I_g(n)$ . Jika pada tahun 2010 diketahui PDB wilayah X sebesar Rp 10.000T, dengan investasi pemerintah sebesar Rp 1T, dan tahun 2009 besaran PDBnya sebesar Rp 9T, berapa perkiraan nilai investasi swasta pada tahun 2010? Berapa persen pertumbuhan investasi swasta tahun 2010 dibanding tahun 2009?
3. Jika pertumbuhan penduduk di suatu wilayah sebesar 2% per tahun, dan pertumbuhan GDB/PDRB nya 10% per tahun, maka berapa pertumbuhan pendapatan perkapita wilayah tersebut?
4. Proporsi tabungan suatu wilayah terhadap output totalnya: 10%.

- Rasio Modal-Output (COR) nya = 2. Berapa pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut?
5. Diketahui ICOR suatu wilayah adalah 2. Apabila wilayah tersebut merencanakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, maka berapa persen dari PDRB (GDB) nya yang harus diinvestasikan untuk kegiatan pembangunan? Jika GDB wilayah tersebut adalah sebesar Rp 10.000T, berapa rupiah yang harus diinvestasikan untuk kegiatan pembangunannya? (Asumsikan ini berlaku pada ekonomi tertutup).
  6. ICOR suatu wilayah pada tahun 2010 adalah 2. Bila wilayah tersebut ingin menaikkan output wilayahnya dari Rp 1000T ke Rp 1200 T pada tahun 2010. Berapa investasi yang harus dilakukan oleh wilayah tersebut?

#### 4.6.10 Kesimpulan

Beberapa model, metode, dan teknik yang biasa digunakan dalam analisis potensi wilayah dan daerah dari aspek Pertahanan dan Keamanan, Aspek Kebijakan, dan Aspek Kelembagaan, diantaranya adalah model sistem dinamik, *cost benefit analysis*, analisis SWOT, teknik optimasi, *analytical hierarchy process (AHP)*, dan beberapa algoritma rute terpendek.

#### 4.6.11 Test Formatif

1. Model Sistem Dinamik pertama kali diperkenalkan oleh:
  - a. a. Jay W. Forrester
  - b. b. Walter Isard
  - c. c. Sir Issac Newton
  - d. d. Bernoulli
1. Variabel yang merepresentasikan akumulasi atau integrasi suatu aliran dari waktu ke waktu dalam sistem dinamik disebut:
  - e. Variabel *auxiliary*
  - f. Variabel *rate*
  - g. Variabel *level*
  - h. Variabel *random*

2. Jika posisi perusahaan berada pada Kuadran I dalam Analisis SWOT, maka strategi yang sesuai untuk diterapkan adalah:
  - a. Strategi diversifikasi
  - b. Strategi agresif
  - c. Strategi turn-around
  - d. Strategi defensif
  
3. Susunan hirarki yang benar berturut-turut dari hirarki 1 sampai hirarki 3 dalam Analisis Hirarki Proses adalah:
  - a. Goal-Alternatif-Kriteria
  - b. Alternatif-Goal-Kriteria
  - c. Kriteria-Goal-Alternatif
  - d. Goal-Kriteria-Alternatif
  
4. Jawaban para ekspert dalam Analisis Hirarki Proses dianggap konsisten, jika:
  - a. Indeks Konsistensi  $\leq 1\%$
  - b. Indeks Konsistensi  $\leq 5\%$
  - c. Indeks Konsistensi  $\leq 10\%$
  - d. Indeks Konsistensi  $\leq 15\%$

#### **4.6.12 Jawaban Test Formatif**

##### **Sub Bab Model, Metode, dan Teknik (MMT) pada Aspek Fisik serta Aspek Ekonomi dan Keuangan**

1. b
2. c
3. a
4. d
5. c

##### **Sub Bab Model, Metode, dan Teknik (MMT) pada Aspek Sosial Budaya dan Kependudukan serta pada Ideologi dan Politik**

1. b

2. a
3. d
4. c
5. c

**Sub Bab Model, Metode, dan Teknik (MMT) pada Aspek Pertahanan dan Keamanan, Aspek Kebijakan, dan Aspek Kelembagaan**

1. a
2. c
3. b
4. d

# Bab V

## Penerapan Analisis Potensi Wilayah dan Daerah Dalam Berbagai Kepentingan

### 5.1 Pendahuluan

Bab ini akan membahas penerapan analisis potensi Wwlayah dan daerah dalam berbagai kepentingan, diantaranya:

- Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)
- Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa
- Penyusunan RT RW
- Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Khusus

### 5.2. Analisis Potensi Wilayah dan Daerah untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)

Perencanaan sebagai kegiatan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dalam konteks kota/kabupaten/provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan atau langkah yang berurutan dan berkaitan satu sama lain dalam suatu proses perencanaan.

Banyak model proses perencanaan yang dikemukakan berbagai ahli selama ini, namun secara generik proses perencanaan ini terdiri dari tahapan:

1. Pendefinisian persoalan;
2. Perumusan tujuan dan sasaran;
3. Pengumpulan data dan informasi;
4. Analisis;
5. Identifikasi dan evaluasi alternatif;
6. Implementasi;
7. Pemantauan; dan
8. Evaluasi.

Dalam hal ini perencanaan merupakan rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan secara spesifik di masa yang akan datang; produk dari suatu proses perencanaan dalam bentuk *blueprint* yang merepresentasikan tujuan atau apa yang ingin dicapai serta regulasi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Karakteristik utama dari proses perencanaan yang perlu diperhatikan, adalah: bersifat siklis, kesatuan dalam ragam kegiatan/tahapannya; serta tiap tahapan tidak selalu dilakukan secara sekuensial. Pemahaman terhadap konsep perencanaan sebagai suatu proses mempunyai beberapa implikasi penting yang berkaitan dengan rencana sebagai produknya, sifat kontinuitasnya, serta peranan perencana yang terlibat di dalamnya.

Dalam hal ini implikasi **pertama** adalah perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekedar membuat suatu dokumen rencana, karena rencana bukanlah tujuan akhir perencanaan, tetapi perangkat sebagai perwujudan cara untuk mencapai tujuan. Implikasi yang **kedua**, perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus, bukan suatu proses yang dikerjakan sekali saja. Implikasi yang **ketiga** berkaitan dengan peran perencana yang sesungguhnya menyangkut pengertian yang luas bagi siapa saja yang terlibat dalam suatu jenis kegiatan perencanaan sehingga setiap orang yang terlibat sebagai seorang perencana haruslah bekerja erat dengan orang-orang lain yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk di dalamnya

para politisi, administrator/birokrasi, dan masyarakat secara umum.

Pendefinisian persoalan titik mula dari siklus dalam proses perencanaan secara keseluruhan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan persoalan adalah kesenjangan (*gap*) antara apa yang ada dengan apa yang diinginkan. Berdasarkan pendefinisian persoalan secara benarlah kemudian tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) dapat dirumuskan. Tujuan dan sasaran dalam pengertian umum merupakan ekspresi prioritas yang ingin dicapai dari kegiatan perencanaan yang dilakukan, yang formulasinya dilakukan pada tahap awal dari siklus perencanaan. Kegiatan perumusan tujuan dalam perencanaan kota diarahkan untuk menghasilkan suatu pernyataan yang bersifat kualitatif berkenaan dengan pencapaian yang diinginkan dari hasil perencanaan/kebijaksanaan dan/atau keputusan, yang dapat menjadi pedoman nyata dalam menentukan tindakan yang sesuai untuk mencapainya.

Tahap pengumpulan data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perencanaan, karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang tidak dapat dilakukan tanpa didukung oleh informasi yang memadai. Dalam perencanaan, data atau informasi diperlukan untuk tiga tujuan utama, yaitu:

1. Identifikasi permasalahan dan perkembangan eksisting, sebagai dasar bagi perumusan kebijaksanaan/rencana;
2. Identifikasi dan evaluasi alternatif kebijaksanaan/rencana;
3. Sebagai umpan balik, untuk siklus proses perencanaan berikutnya.

Didasarkan pada hasil pengumpulan data dan informasi, dilakukan analisis yang pada dasarnya merupakan pendekatan, metode, prosedur, atau teknik yang dilakukan untuk menelusuri kondisi historis dan kondisi sekarang dari wilayah/daerah perencanaan, untuk menentukan apa yang dapat dilakukan dan kebijaksanaan, rencana atau program apa yang akan dirumuskan pada masa yang akan datang.

Tahapan analisis mencakup analisis data dasar, analisis prakiraan, dan analisis untuk penyusunan skenario di masa datang. Dengan melakukan analisis, diharapkan diperoleh alternatif atau pilihan tindakan yang

mungkin untuk memecahkan persoalan. Manakala terdapat serangkaian tindakan yang mungkin dapat diidentifikasi, tahap selanjutnya dalam proses perencanaan adalah membandingkan secara rinci terhadap kelebihan dan kekurangan antar alternatif sehingga dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik, yang lazim disebut sebagai evaluasi alternatif. Alternatif terpilihlah yang kemudian diimplementasikan.

Perencanaan pembangunan dilakukan dalam satu sistem, yang berarti satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. P

Dalam sistem perencanaan pembangunan, dikembangkan berbagai jenis perencanaan pembangunan yang dapat dibedakan:

1. Perencanaan menurut jangkauan jangka waktu;
2. Perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi;
3. Perencanaan menurut proses/hierarki penyusunan.

Perencanaan pembangunan berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi meliputi:

1. perencanaan makro,
2. perencanaan sektoral,
3. perencanaan regional,
4. perencanaan mikro.

Di antara keempat jenis perencanaan tersebut, perencanaan sektoral dan perencanaan regional adalah yang paling dikenal. Perencanaan sektoral merupakan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada sektor atau kelompok program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian suatu kelompok tujuan atau sasaran sektor tertentu; sedangkan perencanaan regional perencanaan dengan dimensi pendekatan regional yang menitikberatkan pada aspek kegiatan yang dilakukan.

Dalam praktik perencanaan pembangunan di Indonesia, dikembangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP, 20 tahun) jangka menengah (RPJM, 5 tahun), dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Hal ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Tahapan yang dilakukan adalah :

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Berdasarkan dimensi waktunya, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJP Nasional; dan
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah;

Ditinjau berdasarkan prosesnya, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJP dan RPJM) dilakukan melalui empat pendekatan mendasar dalam suatu rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan Politik, yaitu memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih

- menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah;
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
  3. Pendekatan Partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
  4. Pendekatan Atas-Bawah (*Top-Down*) dan Bawah Atas (*Bottom Up*), yaitu dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselarasakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan

- Menentukan: menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan)
- Tindakan: spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
- Tepat: dikaitkan dengan tindakan
- Pilihan-pilihan:
  1. Pemilihan tujuan dan kriteria
  2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
  3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan.

### 5.2.1 Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan :

1. Tujuan akhir yang dikehendaki
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif)
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut
4. Masalah-masalah yang dihadapi

5. Modal atau sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
6. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya
7. Orang, organisasi atau badan pelaksananya
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya

### **5.2.2 Fungsi/manfaat perencanaan**

- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas

### **5.2.3 Kegagalan Perencanaan :**

1. **Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena :**
  - Informasinya kurang lengkap
  - Metodologinya belum dikuasai
  - Perencanaanya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah terlaksana
  - Pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan teknis perencanaan diabaikan
2. **Perencanaanya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya**
  - Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya
  - Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten
  - Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya
3. **Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang**
  - Misalnya orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan

- Dengan demikian yang keliru bukan semata-mata perencanaanya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
4. **Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun**
- Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh
  - Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya
  - Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (*centrally planned system*)

#### 5.2.4 Sistem perencanaan yang berhasil

- Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
- Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

#### 5.2.5 Perencanaan yang ideal

- Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan. Dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, serta dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*)
- Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).

## 5.2.6 Tahapan Perencanaan Pembangunan

- Penyusunan Kebijakan: tahapan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan
- Perumusan Program:

Lima tahunan: Repenas, Repeda  
Renstra Kementerian/Lembaga  
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahunan: Repetada, Repetada, Rencana Kerja Pemerintah

- Koordinasi Perencanaan  
Jenis : Horisontal dan Vertikal  
Bentuk : Rakorbang/Musrenbang Kabupaten/Kota  
Rakorbang/Musrenbang Propinsi  
Rakorbang/Musrenbang Pusat  
Rakorbang /Musrenbang Nasional

## 5.2.7 Penyempurnaan Program Pembangunan

- Lingkup pusat dan nasional koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan nasional
- Lingkup provinsi, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan provinsi
- Lingkup kabupaten/kota, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan kabupaten/kota

## 5.2.8 Pengendalian Program Pembangunan

Pengendalian di tingkat nasional dan daerah, akan dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur-unsur perencanaan, pengendalian, pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pendataan dan informasi, dengan pendekatan instrumen kebijakan dan anggaran pembangunan di pusat dan daerah.

### 5.2.9 Dokumen Perencanaan

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJP)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Repernas)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Repeda)
4. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra – KL)
5. Rencana Pembangunan Nasional (Repernas) Transisi
6. Rencana Kerja Pemerintah
7. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja – KL)
8. Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA – KL)
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD)

### 5.2.10 Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Jelaskan secara rinci rencana pembangunan daerah menurut jangkauan jangka waktu
3. Berdasarkan prosesnya, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJP dan RPJM) dilakukan melalui empat pendekatan mendasar dalam suatu rangkaian perencanaan, jelaskan secara lengkap
4. Jelaskan penyebab kegagalan perencanaan, dan bagaimanakah sistem perencanaan yang berhasil?
5. Sebutkan dokumen perencanaan secara lengkap

### 5.2.11 Kesimpulan

Proses perencanaan pembangunan daerah terdiri dari : (1) Pendefinisian persoalan; (2) Perumusan tujuan dan sasaran; (3) Pengumpulan data dan informasi; (4) Analisis; (5) Identifikasi dan evaluasi alternatif; (6) Implementasi; (7) Pemantauan; dan (8) Evaluasi.

Perencanaan pembangunan dilakukan dalam satu sistem, yang berarti

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan, dikembangkan berbagai jenis perencanaan pembangunan yang dapat dibedakan dalam (1) Perencanaan menurut jangkauan jangka waktu; (2) Perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi; (3) Perencanaan menurut proses/hierarki penyusunan.

Berdasarkan dimensi waktunya, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

Ditinjau berdasarkan prosesnya, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJP dan RPJM) dilakukan melalui empat pendekatan mendasar dalam suatu rangkaian perencanaan, yaitu: Pendekatan Politik, Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Atas-Bawah (*Top-Down*) dan Bawah Atas (*Bottom Up*)

### **5.2.12 Test Formatif**

1. Sub Bab Analisis Potensi Wilayah dan Daerah untuk Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa
  - a. Latihan
  - b. Kesimpulan (Rangkuman)
  - c. Test Formatif

## **5.3 Analisis Potensi Wilayah dan Daerah untuk Penyusunan RTRW**

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni:

1. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Disamping sebagai "*guidance of future actions*" RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*).
2. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri,
3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (*legal instrument*) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui UU No.24/1992 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Berdasarkan UU No.24/1992, khususnya pasal 3, termuat tujuan penataan ruang, yakni terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya. Sedangkan sasaran penataan ruang adalah :

1. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera,
2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia,
3. Mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kesejahteraan dan keamanan,
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sesuai dengan UU 24/1992 tentang penataan ruang, sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara berhirarkis menurut kewenangan administratif, yakni dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci. RTRWN disusun dengan memperhatikan wilayah Nasional sebagai satu kesatuan wilayah yang lebih lanjut dijabarkan kedalam strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang pada wilayah propinsi (RTRWP), termasuk di dalamnya penetapan sejumlah kawasan tertentu dan kawasan andalan yang diprioritaskan penanganannya

Aspek teknis perencanaan tata ruang wilayah dibedakan berdasarkan hirarki rencana. RTRWN merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan horizon waktu hingga 25 - 50 tahun ke depan dengan menggunakan skala ketelitian 1 : 1,000,000. RTRW Propinsi merupakan perencanaan makro strategis jangka menengah dengan horizon waktu 15 tahun pada skala ketelitian 1 : 250,000. Sementara, RTRW Kabupaten dan Kota merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah (5-10 tahun) dengan skala ketelitian 1 : 20,000 hingga 100,000, yang kemudian diikuti dengan rencana-rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek dengan skala ketelitian dibawah 1 : 5,000.

Selain penyiapan rencana untuk wilayah administratif, maka disusun pula rencana pengembangan (*spatial development plan*) untuk kawasan-kawasan fungsional yang memiliki nilai strategis. Misalnya, untuk kawasan dengan nilai strategis ekonomi, maka disusun rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan andalan. Sementara itu untuk kawasan dengan nilai strategis pertahanan keamanan (*security*), disusun rencana pengembangan kawasan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan agropolitan (sentra-sentra produksi pertanian), dan sebagainya

Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem permukiman, maka di dalam RTRWN sendiri telah ditetapkan fungsi kota-kota secara nasional berdasarkan kriteria tertentu (administratif, ekonomi, dukungan prasarana, maupun kriteria strategis lainnya) yakni sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk mewujudkan fungsi-fungsi kota

sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN secara bertahap dan sistematis, maka pada saat ini tengah disusun review Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP). Dengan kata lain, SNPP dewasa ini merupakan bentuk penjabaran dari RTRWN.

### 5.3.1 Isu Strategis Penataan Ruang di Indonesia

Pada era otonomi daerah, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung diselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi. Di Pulau Jawa misalnya, hutan lindungnya telah terkonversi dengan laju sebesar 19.000 ha/tahun (BPS,2001).

Bahkan Badan Planologi Kehutanan menyebutkan bahwa hingga 2001 penjarahan hutan di Jawa telah mencapai 350.000 ha sehingga luas hutan tersisa 23% saja dari luas daratan Pulau Jawa. Selain itu, terjadi konversi lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian seperti untuk industri, permukiman dan jasa di Pulau Jawa yang mencapai 1.002.005 ha atau 50.100 ha/tahun antara 1979 – 1999 (Deptan, 2001).

Contoh lainnya adalah penurunan luas kawasan resapan air pada pulau-pulau besar yang signifikan. Hutan tropis, misalnya, sebagai kawasan resapan air telah berkurang luasannya baik akibat kebakaran dan penjarahan/penggundulan. Data yang dihimpun dari *The Georgetown – International Environmental Law Review* (1999) menunjukkan bahwa antara tahun 1997 – 1998 saja tidak kurang dari 1,7 juta hektar hutan terbakar di Sumatra dan Kalimantan. Bahkan WWF (2000) menyebutkan angka yang lebih besar, yakni antara 2 hingga 3,5 juta hektar pada periode yang sama. Dengan kerusakan hutan yang berfungsi lindung tersebut maka akan menimbulkan *run-off* yang besar, mengganggu siklus hidrologis, memperluas kelangkaan air bersih pada jangka panjang, serta meningkatkan resiko pendangkalan dan banjir pada kawasan pesisir, 16. Selain itu kondisi satuan-satuan wilayah sungai di Indonesia telah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Dari keseluruhan 89 SWS yang ada di Indonesia, hingga tahun 1984 saja telah

terdapat 22 SWS berada dalam kondisi kritis. Pada tahun 1992, kondisi ini semakin meluas hingga menjadi 39 SWS. Perkembangan yang buruk terus meluas hingga tahun 1998, dimana 59 SWS di Indonesia telah berada dalam kondisi kritis, termasuk hampir seluruh SWS di Pulau Jawa.4 (periksa Gambar 1 berikut).

Seluruh SWS kritis tersebut selain mendatangkan bencana banjir pada musim hujan, sebaliknya juga menyebabkan kekeringan yang parah pada musim kemarau. Dari sisi ketahanan pangan, bilamana kecenderungan negatif dalam pengelolaan SWS tersebut terus berlanjut, maka produktivitas sentra-sentra pangan yang terletak di SWS-SWS potensial (seperti Citarum, Sadang, Brantas, dsb) akan terancam pula.



Gambar 28 Perkembangan SWS Kritis di Indonesia (1984 – 1998).

Berbagai fenomena bencana (*water-related disaster*) seperti banjir, longsor dan kekeringan – yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada awal tahun 2002 dan 2003 ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Penyebab terjadinya bencana sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, yakni : (1) kondisi alam yang bersifat statis, seperti kondisi geografi, topografi, dan karakteristik sungai, (2) peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti : perubahan iklim (pemanasan) global, *land subsidence*, sedimentasi, dan sebagainya, serta (3) aktivitas sosial-ekonomi manusia yang dinamis, seperti penggundulan hutan, konversi lahan pada

kawasan lindung, pemanfaatan sempadan sungai untuk permukiman, pemanfaatan wilayah retensi banjir, perilaku masyarakat, dan sebagainya.

Pada kawasan pesisir pun, telah terjadi degradasi kualitas lingkungan yang serius. Pertama adalah penurunan luas mangrove di Indonesia dari 5.209.543 ha (1982) menjadi 3.235.700 ha (1987) hingga 2.496.185 ha (1993). Dalam 10 tahun (1982-1993), terjadi penurunan mangrove ~~50~~50% dari total luasan semula. Apabila mangrove tidak dapat dipertahankan maka : abrasi pantai, pencemaran dari sungai ke laut, dan zona *aquaculture* pun akan terancam. Kedua adalah intrusi air laut yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut serta land subsidence akibat penghisapan air tanah secara berlebihan. Contoh, antara 2050 hingga 2070, intrusi air laut akan mencakup 50% dari luas wilayah Jakarta Utara.

Ketiga adalah hilangnya ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan (*breeding and nursery ground*) bagi perkembangbiakan ikan-ikan. Keempat adalah ancaman dampak *global warming* berupa gangguan terhadap kondisi sosial-ekonomi kawasan, diantaranya adalah : (a) *jalan lintas* dan KA di Pantura Jawa dan Timur-Selatan Sumatera ; (b) permukiman penduduk pada wilayah Pantura Jawa, Sumatera bagian Timur, Kalimantan bagian Selatan, Sulawesi bagian Barat Daya, dan beberapa *spot* pesisir di Papua ; (c) hilangnya sawah, payau, kolam ikan, dan mangrove seluas 3,4 juta ha; sentra produksi pangan (4 %) terancam alih fungsi lahan,5 dan (d) penurunan produktivitas sentra-sentra pangan, seperti di DAS Citarum, Brantas, dan Sadang.



Gambar 1. Daerah yang Potensial Terkena Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut

Gambar 29 Sebaran Wilayah yang Terkena Dampak Global Warming

Isu berikutnya yang sangat serius adalah mengenai kenaikan jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya fenomena urbanisasi akibat migrasi desa – kota. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari 32,8 juta atau 22,3% dari total penduduk nasional (1980), meningkat menjadi 55,4 juta atau 30,9% (1990), menjadi 74 juta atau 37% (1998), menjadi 90 juta jiwa atau 44% (2002), dan diperkirakan akan mencapai angka 150 juta atau 60% dari total penduduk nasional (2015) dengan laju pertumbuhan penduduk kota rata-rata 4,49% (1990-1995). Dengan kecenderungan urbanisasi yang terus meningkat, perhatian pada penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, misalnya melalui penerapan *zoning regulation*, mekanisme insentif dan disinsentif, dan sebagainya.

Perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk pola linear yang dikenal dengan *ribbon development* seperti yang terjadi di Pantai Utara Jawa secara intensif pun mulai terjadi di Pantai Timur Sumatera. Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan yang memanjang pada kedua Pulau utama tersebut telah menimbulkan kesenjangan antar wilayah pulau yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan sarana-prasarana. Sebagai gambaran konsentrasi kegiatan ekonomi di Pantura Jawa mencapai 85% jauh meninggalkan Pantai Selatan (15%). Hal ini pun dicirikan dengan intensitas pergerakan orang dan barang yang sangat tinggi, seperti pada lintas utara Jawa dan lintas Timur Sumatera.

Isu lainnya adalah menyangkut perkembangan kota-kota yang tidak terarah, cenderung membentuk konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Konurbasi dimaksud dicirikan dengan munculnya 9 (Sembilan) kota metropolitan dengan penduduk diatas 1 juta jiwa (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi, Tangerang, Semarang, Palembang dan Makassar) dan 9 kota besar (Bandar Lampung, Malang, Padang, Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar). Konurbasi yang terjadi pada kota-kota tersebut menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, seperti kemiskinan perkotaan, pelayanan prasarana dan sarana kota yang terbatas, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan.

Pengembangan kota-kota pada kawasan perbatasan negara – baik yang berada di *mainland* ataupun di pulau-pulau kecil – sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan beranda depan negara (*frontier region*) pada saat ini masih jauh dari harapan. Keteringgalan, keterisolasian dan keterbatasan aksesibilitas, serta keterbatasan pelayanan merupakan kondisi yang tipikal terjadi. Walaupun telah diatur melalui PP No.69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat yang merupakan derivasi dari UU No.24/1992 dan karenanya telah menjadi *common interests*, proses pelibatan masyarakat sebagai subyek utama dalam penataan ruang wilayah masih belum menemukan bentuk terbaiknya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyaluran hak-hak masyarakat dalam penataan ruang saja belum terjamin sepenuhnya, terlebih pelaksanaan kewajibannya masih jauh dari yang diharapkan. Persepsi yang berbeda mengenai hak dan kewajiban dari masyarakat seringkali juga menghadirkan konflik pemanfaatan ruang yang sulit dicarikan solusinya, tingginya *transaction cost*, dan cenderung merugikan kepentingan publik. Hal lainnya adalah menyangkut **tatacara** penyampaian aspirasi agar berbagai kepentingan seluruh stakeholders dapat terakomodasi secara adil, efektif, dan seimbang. Keterlibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati bersama serta dengan memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat (*local unique*).

Dukungan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan penataan ruang belum dioptimalkan pemanfaatannya, walaupun kompleksitas permasalahan pengembangan wilayah yang dihadapi telah nyata. Era otonomi daerah akan menempatkan masing-masing wilayah otonom dalam iklim kompetisi yang ketat. Eksistensi suatu wilayah dalam hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan para pengambil keputusan dalam mengatasi kekurangan dan memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya dengan optimal. Untuk itu, salah satu kunci sukses terletak pada kecepatan mengakses informasi, melakukan analisis dan penyesuaian kebijakan pembangunan wilayahnya.

Kompatibilitas dan kesesuaian standar peta yang digunakan dalam perencanaan tata ruang wilayah di masing-masing wilayah otonom merupakan salah satu prasyarat terwujudnya keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya. Untuk itu, PP No. 10 tahun 2000 tentang Ketelitian Peta diharapkan dapat mensinergikan peta-peta yang digunakan untuk penataan ruang wilayah sehingga ke depan dapat menjadi sistem informasi yang handal untuk penataan ruang wilayah tersebut. Selanjutnya, PP No. 10 tahun 2000 ini masih perlu disosialisasikan agar jelas manfaatnya dengan mendorong BAKOSURTANAL dan instansi terkait dengan penataan ruang untuk siap melayani kebutuhan akan pengadaan peta dasar wilayah, peta tematik dan informasi digital lainnya.

Dengan memperhatikan keseluruhan uraian diatas, untuk mengatasi berbagai permasalahan aktual dalam pembangunan, maka prinsip-prinsip penataan ruang tidak dapat diabaikan lagi. Dalam konteks ini upaya pengendalian pembangunan dan berbagai dampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu lintas sektor dan lintas wilayah melalui instrumen penataan ruang. Melalui instrumen ini pula, maka daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting.

Secara garis besar, semua ilustrasi kesenjangan-kesenjangan di atas bisa disimpulkan kedalam isu pokok berikut ini:

1. Terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya,
2. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi,
3. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan sehingga terjadi degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut, dan udara.
4. Belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRWN,
5. Belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang.

- Hal ini dibuktikan dengan belum optimalnya dukungan kebijakan sektoral terhadap pengembangan kawasan strategis nasional, misalnya kawasan perbatasan negara, kawasan andala, dan KAPET, serta
6. Kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.

### 5.3.2 Penataan Ruang di Era Otonomi Daerah

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal pada tahun 2001, dimulailah era baru dalam sistem pembangunan di daerah. Pada hakekatnya otonomi daerah mengandung makna yaitu diberikannya kewenangan (*authority*) kepada pemerintah daerah menurut kerangka perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur kepentingan (*interest*) daerah masing-masing. Melalui kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah telah mendesentralisasikan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Secara konseptual, desentralisasi dapat dibedakan atas 4 (empat) bentuk dengan turunan yang berbeda: (1) devolusi, yang merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atasnya kepada pemerintah di bawahnya sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah; (2) dekonsentrasi, yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasannya kepada para pejabat mereka di daerah; (3) delegasi, yang merupakan penunjukkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah atasannya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya; (4) privatisasi, yang merupakan pengalihan kewenangan dari pemerintah kepada organisasi non-pemerintah baik yang berorientasi *profit* maupun *non-profit*. Lazimnya prinsip *devolusi* mengacu kepada desentralisasi politik, dekonsentrasi pada pengertian desentralisasi administrasi, dan delegasi maupun privatisasi sebagai tugas *subcontracting*.

Dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah, pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan pendekatan *bottom-up* dan melibatkan semua

pelaku pembangunan (*stakeholders*) pada setiap tahap pembangunan. Pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga aktivitas perekonomian dalam wilayah atau kawasan dapat berjalan dengan baik, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan.

Berlakunya kebijaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 berimplikasi pada biasanya hirarki dalam sistem perencanaan tata ruang wilayah. Dengan tidak adanya hirarki antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, RTRW Nasional dan RTRW Propinsi yang sebelumnya menjadi pedoman bagi daerah tingkat bawahannya (ps.20 (3c) dan ps 21 (3d) UU 24/1992 dapat menjadi tidak efektif karena daerah mempunyai kewenangan penuh dalam penataan ruang daerahnya. Dalam PP No 25/1999, bahkan disebutkan bahwa penyusunan RTRWN berdasarkan tata ruang kabupaten/kota dan propinsi (ps.2 (3) butir 13.c. Sementara penyusunan RTRWP harus berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan Kabupaten/Kota (ps.3 (5) butir 12.a). Meskipun pada satu sisi penataan ruang yang paling fundamental merupakan kewenangan daerah, namun pada sisi lain RTRW Propinsi bukanlah mosaik dari Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat. Pertama, adalah dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah memfasilitasi dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Salah satu contoh penting untuk tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh instansi kementerian terkait. Dengan adanya standar tersebut, maka pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan minimal warganya dalam kebutuhan prasarana maupun bidang penataan ruang antara lain: keharusan adanya RTRW Kota dan RDTR pada kawasan strategis, fasilitas perizinan (IMB dan izin lokasi), sistem informasi, unit pengaduan, dan pemeriksaan berkala dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, fasilitasi tersebut

secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli (*genuine*) yang bersumber dari masyarakat dan pelaku pembangunan perkotaan.

Pemerintah pusat merupakan “penjaga” kepentingan nasional. Karena itu, peran yang kedua adalah pemerintah pusat juga mengeluarkan kerangka perencanaan makro seperti struktur tata ruang nasional. Pada tingkatan rencana makro tersebut, yang merupakan fokus penataan adalah bagaimana mewujudkan struktur perwilayahan melalui upaya mensinergikan antar kawasan yang antara lain dicapai dengan pengaturan hirarki fungsional yaitu: sistem kota-kota, sistem jaringan prasarana wilayah, serta fasilitasi kerjasama lintas propinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam konteks pengembangan wilayah, Pemerintah Kabupaten/ Kota harus memosisikan dirinya sebagai “pengembalian amanat” di wilayahnya. Strategi pembangunan wilayah dan perkotaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses pembangunan berakar pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan.

Terkait dengan prinsip dasar di atas, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian *community driven planning* tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pengembangan wilayah dan kota diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui kegiatan penataan ruang.

Dalam konteks ini, perhatian Pemerintah Pusat dalam bidang penataan ruang adalah untuk menjamin:

1. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan ruang makro antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antar wilayah dan antar sektor
2. Tercapainya pemulihan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan
3. Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas provinsi dan lintas sektor untuk optimasi dan sinergi struktur pemanfaatan ruang

4. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) akan pelayanan publik yang memadai

Di sisi lain, menurut PP 25 tahun 2000, kewenangan pusat dalam bidang tata ruang meliputi:

1. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, serta (penetapan) pola dan struktur pemanfaatan ruang nasional.
2. Fasilitasi kerjasama atau penyelesaian masalah antar propinsi/daerah, misal melalui penyusunan RTRW Pulau atau RTRW Kawasan Jabodetabek.
3. Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 mil dan kriteria penataan perwilayah ekosistem daerah tangkapan air
4. Penyiapan standar, kriteria dan fasilitasi kerjasama penataan ruang

Berkenaan dengan hal tersebut, instrumen pengikat yang dapat digunakan sebagai acuan sekaligus alat keterpaduan dan kerjasama pembangunan antar-daerah adalah melalui :

1. Instrumen perundang-undangan yang mengikat
2. Kebijakan-kebijakan yang jelas dan responsif sesuai dengan kebutuhan daerah
3. Bantuan dan kompensasi dalam bentuk fiskal
4. Penyediaan langsung prasarana berfungsi lintas wilayah dan "backbone" pengembangan wilayah
5. Mendorong kemitraan secara vertikal dan horisontal yang bersifat kerjasama pengelolaan (*co-management*) dan kerjasama produksi (*co-production*)

### **5.3.3 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Dalam merespons berbagai isu dan tantangan pembangunan yang aktual dalam era otonomi daerah, maka keberadaan visi penyelenggaraan penataan ruang yang tegas menjadi sangat penting. Dalam RAKERNAS – BKTRN di Surabaya yang lalu, Menko Perekonomian selaku Ketua BKTRN telah menjabarkan *keywords* yang menjadi jiwa daripada visi

tata ruang ke depan. Adapun *keywords* dimaksud adalah : “integrasi tata ruang darat, laut dan udara”, “pengelolaan pusat pertumbuhan baru”, “pengembangan kawasan perbatasan”, “pengendalian dalam pengelolaan tata ruang” dan “peningkatan aspek pertahanan dan keamanan dalam penataan ruang (demi keutuhan NKRI).”

Adalah menjadi tugas Ditjen Penataan Ruang – Depkimpraswil untuk menjabarkan jiwa dari visi tata ruang ke depan tersebut ke dalam bentuk kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu perumusan kebijakan dan strategi tersebut tidak dapat pula dilepaskan dari 2 (dua) pokok kesepakatan yang dicapai dalam RAKERNAS – BKTRN, yaitu : pengaturan penataan ruang nasional dan penguatan eran daerah dalam penataan ruang.

Berpijak pada jiwa daripada visi tata ruang ke depan dan kesepakatan RAKERNAS –BKTRN tersebut, maka telah dihasilkan rumusan kebijakan dan strategi pokok penataan ruang tahun 2004 dan pasca 2004, yakni :

1. Memfungsikan kembali (revitalisasi) penataan ruang yang mampu menangani agenda-agenda aktual, terbuka, akuntabel dan mengaktifkan peran masyarakat.
2. Memantapkan RTRWN sebagai acuan pengembangan wilayah, yang ditempuh melalui : (1) operasionalisasi RTRWN (melalui RTRW Pulau, Propinsi, Kabupaten dan RTRW Kota) sebagai produk yang mengintegrasikan rencana pemanfaatan ruang darat, laut dan pesisir, serta udara ; (2) koordinasi lintas sektor dan lintas daerah, dan (3) pengembangan sistem penataan ruang. Dalam kaitan ini RTRWN diharapkan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menjadi landasan dalam penyusunan program pembangunan lima tahunan (*five-years development plan*). RTRWN juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem kota-kota yang efisien, sesuai dengan fungsi-fungsi yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pembinaan pengelolaan KAPET (sebagai pusat pertumbuhan baru) dan Kawasan Tertentu (sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis nasional, seperti kawasan perbatasan negara,

- kawasan kritis lingkungan, kawasan metropolitan, dsb). Keduanya ditempuh melalui upaya fasilitasi yang konsisten dan sistematis.
4. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang di daerah dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Adapun upaya yang ditempuh adalah melalui: (1) penyelenggaraan BinteK Penyusunan dan Evaluasi RTRW Propinsi, Kabupaten dan Kota, (2) penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya kemitraan dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, (3) peningkatan kepastian hukum dan transparansi dalam penataan ruang, dan (4) penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM).
  5. Terkait dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang di daerah, maka langkah strategis yang menjadi penting adalah : (1) memperkuat peran Gubernur dalam penyelenggaraan penataan ruang, khususnya untuk memfasilitasi kerjasama penataan ruang antardaerah otonom dan mengendalikan pembangunan (pemanfaatan ruang) secara lebih efektif, (2) memberdayakan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, inisiasi, supervisi, dan mediasi (*conflict resolution body*).

### 5.3.4 Test Formatif

1. Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui...
  - a. a. UU No. 31/2004
  - b. b. UU No. 24/1992
  - c. c. UU No. 32/1999
  - d. UU No. 20/2000
2. Berikut ini adalah contoh kota-kota metropolitan dengan penduduk diatas 1 juta jiwa...
  - a. Bandar Lampung, Malang, Padang, Samarinda, dan Pekanbaru
  - b. Banjarmasin, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar
  - c. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi, Tangerang, Semarang,

- Palembang dan Makassar
- d. Jakarta, Surabaya, Bandung, Bandar Lampung, dan Banjarmasin

## 5.4 Analisis Potensi Wilayah dan Daerah untuk Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Khusus

### 5.4.1 Kawasan Agropolitan

Sebagai sebuah konsepsi pembangunan kawasan perdesaan, agropolitan dikembangkan oleh Friedman dan Douglas (1975). Secara etimologis agropolitan (Agro = pertanian : Politan = kota) adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya sistem & usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (<http://www.deptan.go.id>). terdiri dari Kota Pertanian dan Desa-Desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi Pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Dengan kata lain Kawasan Agropolitan adalah Kawasan Agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan. wilayah perkotaan yang berbasis pertanian. Beberapa daerah menerapkan konsep agropolitan untuk kemajuan daerah. Hal ini didasarkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan agraris/pertanian. Agropolitan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan daerah melalui optimalisasi sumber daya tumbuhan dan hewan, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan (<http://www.wikipedia.org>).

Pembangunan, pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan perdesaan dan pertanian, dimana kota sebagai pusat kawasan dengan ketersediaan sumberdayanya, tumbuh dan berkembang dengan membuka kemudahan dalam melayani, mendorong dan menghela usaha agribisnis di desa-desa *hinterland* dan desa-desa sekitarnya. Keterkaitan dalam sistem dan usaha agribisnis antara kota dan desa tersebut juga dimaksudkan untuk mempercepat

pembangunan ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat di kawasan agropolitan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan langkah terobosan berupa program pengembangan kawasan agropolitan, yang mana program ini perlu melibatkan berbagai pihak (stakeholder) yang bekerjasama secara terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan.

Agropolitan pada dasarnya sebuah gerakan untuk kembali membangun desa. Desa yang baik idealnya harus bisa menjadi suatu tempat yang nyaman, bermartabat dan mensejahterakan masyarakatnya. Jangan beranggapan desa yang maju itu harus menjadi kota. Akan tetapi menjadikan desa itu menjadi tempat yang layak. Sebenarnya hal inilah yang melahirkan ide agropolitan. Konsep agropolitan ini basisnya pada membangun fungsi kota pertanian dalam artian luas. Dimana pertanian itu tidak dilihat dari sisi bercocok tanam dan mencangkul saja. Di dalam kawasan agropolitan harus terdapat sektor industri, jasa, pariwisata, dan sebagainya, namun basisnya pertanian dalam arti yang luas (<http://ciptakarya.pu.go.id> : Penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan). Kawasan agropolitan adalah kawasan pertanian yang terdiri dari kota pertanian, desa-desa sentra produksi pertanian dan desa peyangga yang ada di sekitarnya, yang memiliki fasilitas untuk berkembangnya pertanian industri.

Sebaiknya kawasan pertanian yang dipilih adalah kawasan pertanian yang sudah ditumbuhkembangkan oleh pemerintah daerah dan Departemen Pertanian. Kawasan tersebut antara lain Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Kawasan Peternakan, Kawasan Hortikultura atau Kawasan Tanaman Pangan. Program untuk kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, swasta serta kerjasama lintas sektoral dan lintas pusat dan daerah yang diorganisasikan oleh manajemen yang efisien, dan harus menjadi komitmen dari pemerintah daerah (Bupati/ Walikota, DPRD, masyarakat setempat). Untuk berkembangnya kawasan pertanian menjadi kawasan pertanian industri maka kawasan desa sentra produksi pertanian dan kota pertanian yang ada dikawasannya, harus dirancang agar memiliki fasilitasi perkotaan, lembaga pendidikan, lembaga penyuluhan

dan alih teknologi pertanian, lembaga kesehatan, jaringan jalan, irigasi, transportasi, telekomunikasi serta prasarana dan sarana umum lainnya.

Pada kawasan ini peranan masyarakat cukup dominan dan berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraannya, sedangkan peranan pemerintah bersifat memberikan fasilitasi, memberikan dukungan iklim kondusif dan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk berkembangnya dinamika pembangunan dan melindungi eksistensi program. Masyarakat disodorkan agar berperilaku selalu berorientasi bahwa produk yang dihasilkan adalah produk untuk selanjutnya dipasok ke proses industri. Kebijakan untuk mewujudkan pertanian industri ini perlu dilakukan secara konsisten, terarah dan transparan. Tanpa adanya perlindungan dari pemerintah eksistensi kawasan agropolitan sulit untuk ditegakkan, bertahan dan berlanjut.

Agropolitan adalah pendekatan pembangunan kawasan perdesaan (*rural development*) yang menekankan pembangunan perkotaan (*urban development*) pada tingkat lokal perdesaan.

Tiga isu utama mendapat perhatian penting dalam konsep ini:

1. akses terhadap lahan pertanian dan air,
2. devolusi politik dan wewenang administratif dari tingkat pusat ke tingkat lokal, dan
3. perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian.

Memperhatikan kota desa sebagai *site* utama untuk fungsi-fungsi politik dan administrasi, pengembangan agropolitan lebih cocok dilakukan pada skala kabupaten (*district scale*). Alasannya, skala kabupaten akan memungkinkan akses lebih mudah bagi rumah tangga atau masyarakat pedesaan untuk menjangkau kota, sementara cukup luas untuk meningkatkan atau mengembangkan wilayah pertumbuhan ekonomi (*scope of economic growth*) dan cukup luas dalam upaya pengembangan diversifikasi produk dalam rangka mengatasi keterbatasan-keterbatasan pemanfaatan desa sebagai unit ekonomi. Selain itu, dengan begitu pengetahuan lokal (*local knowledge*) akan mudah digabungkan dalam proses perencanaan jika proses itu dekat dengan rumah tangga dan produsen pedesaan. Pendekatan agropolitan sangat sesuai dengan semangat desentralisasi (transformasi

wewenang dari pusat ke daerah) dan demokratisasi sebagai bagian dari perubahan politik di Indonesia kini.

Agropolitan memberikan ruang yang layak terhadap perencanaan pembangunan pedesaan yang mengakomodir dan mengembangkan kapasitas lokal (*local capacity building*) dan partisipasi masyarakat dalam suatu program yang menumbuhkan manfaat timbal balik bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan (Douglas, 1998). Agropolitan adalah strategi pengembangan kawasan dengan tujuan untuk membangun sebuah agropolis (kota pertanian) yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Departemen Pertanian (2002). Agropolis ini disebut kawasan agropolitan. Karena konsep yang mendasarinya adalah konsep spasial, kawasan agropolitan tidak harus identik dengan dengan sebuah kota dalam batasan administrasi pemerintahan yang kini ada, adalah dimungkinkan bahwa sebuah kawasan agropolitan meliputi irisan wilayah dari beberapa kota/kabupaten yang berdekatan.

Secara ilustratif kawasan agropolitan digambarkan oleh batasan teknik berikut:

1. Adalah kawasan pertanian yang meliputi distrik-distrik agropolitan;
2. Memiliki kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per km<sup>2</sup>;
3. Berbatas radius maksimal 10 km, sehingga ;
4. Merupakan kawasan yang berpenduduk antara 50.000 – 150.000 jiwa;\
5. Selain memfokuskan kegiatan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (untuk menjamin tercapainya keamanan pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan), pengembangan kawasan agropolitan juga mengarah pada terbentuknya kemampuan agribisnis untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sehingga produk yang dikembangkan harus mempunyai kemampuan daya saing yang kuat.

Keberadaan agropolitan dengan demikian dicirikan oleh berfungsinya sistem agribisnis yaitu sub-sistem pengadaan sarana pertanian (input produksi), sub.sistem produksi, sub-sistem pengolahan, sub-sistem pemasaran dan subsistem pendukung, di kawasan agropolitan.

Dengan menekankan aspek keberfungsian ini, kawasan agropolitan dapat berupa kota menengah, kota kecil, kota kecamatan, kota pedesaan atau nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pusat pertumbuhan ekonomi ini menjadi faktor pendorong (*push factor*) untuk berkembangnya wilayah-wilayah di sekitarnya, tidak hanya ditinjau dari sudut produksi pertanian namun juga sektor industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan dan lain-lain.

Pengembangan kawasan agropolitan ini dilandasi oleh:

1. Kebijakan agropolitan bersumber hukum UUD 1945 khususnya pasal 33.
2. Selain itu agropolitan juga berlandaskan ketentuan hukum berupa:
  - a. Undang Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000 – 2004.
  - b. Undang Undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
  - c. Undang Undang no. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
  - d. Peraturan dan Keputusan Pemerintah: Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonomi.

#### **5.4.2 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)**

BAPPENAS menterjemahkan KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya. Penetapannya lokasi dan Badan Pengelolanya dilakukan melalui Keputusan Presiden. Definisi ini didasarkan pada Keppres 89/1996, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan :

1. Memiliki potensi untuk cepat tumbuh;
2. Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan/atau
3. Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

KAPET ini didasari oleh Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP KTI) merupakan kebijakan embrio terbentuknya KAPET. Dewan ini bertugas menggagas dan merumuskan konsepsi pengembangan KTI, termasuk kebijakan yang diperlukan untuk mendukungnya. Sebagai wujudnya, tersusun Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1996 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Berdasarkan Keputusan Presiden ini, kemudian lahir Keputusan Presiden lainnya tentang penetapan lokasi KAPET, yaitu 13 KAPET, 12 KAPET di KTI dan 1 KAPET di KBI.

1. Keppres No. 10 Tahun 1996 jo Keppres 90 Tahun 1996 tentang Pembentukan KAPET Biak.
2. Keppres 11/1998 tentang Pembentukan KAPET Batulicin.
3. Keppres 12/1998 tentang Pembentukan KAPET Sasamba.
4. Keppres 13/1998 tentang Pembentukan KAPET Sanggau.
5. Keppres 14/1998 tentang Pembentukan KAPET Manado Bitung.
6. Keppres 15/1998 tentang Pembentukan KAPET Mbay.
7. Keppres 164/1998 tentang Pembentukan KAPET Parepare.
8. Keppres 165/1998 tentang Pembentukan KAPET Seram.
9. Keppres 166/1998 tentang Pembentukan KAPET Bima.
10. Keppres 167/1998 tentang Pembentukan KAPET Batu.
11. Keppres 168/1998 tentang Pembentukan KAPET Bukari.
12. Keppres 170/1998 tentang Pembentukan KAPET DAS Kakab.
13. Keppres 171/1998 tentang Pembentukan KAPET Sabang

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pada akhirnya kebijakan KAPET disempurnakan kembali melalui Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000. Ada pun tujuan dari pembentukan KAPET adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di KTI yang relatif tertinggal dan beberapa lainnya di KBI. Inti dari pendekatan KAPET adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai

penggerak utama (*prime mover*) pengembangan wilayah. Pemilahan kawasan-kawasan pembangunan dengan menentukan prioritas atas suatu kawasan merupakan strategi agar percepatan pembangunan dapat dilakukan.

Terkait dengan fasilitas dan kemudahan yang dijanjikan KAPET, berdasarkan Keppres 9/1998, kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha adil dalam KAPET diberikan peralukan di bidang Pajak Penghasilan, berupa:

1. Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku, dan peralatan lain, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
2. Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan.
3. Kompensasi kerugian, mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun.
4. Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen, sebesar 50% dari jumlah yang harus seharusnya dibayar.
5. Pengurangan biaya sebagai berikut :
  - Berupa natura yang diperoleh karyawan, dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan.
  - Biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat, yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati umum.

Selain perlakuan perpajakan, dengan memperhatikan kondisi masing-masing KAPET, kepada pengusaha KAPET dapat diberikan perlakuan perpajakan tambahan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atas:

1. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
2. Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET

kepada pengusaha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut.

4. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antarpengusaha di dalam KAPET yang sama atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET.
5. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET.
6. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET kepada atau antar pengusaha di KAPET, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET.
7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan KAPET.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dilakukan di KAPET.

Kelembagaan KAPET di pusat berbentuk Badan Pengembangan (Bapeng) KAPET, yang diketuai oleh Menko Perekonomian dengan Wakil Ketua adalah Menteri Kimpraswil, serta Sekretaris adalah Menteri Bappenas. Anggota Bapeng KAPET adalah Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Perindag, Menteri Perhubtel, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Otda, Menteri Budpar, Menteri Muda Urusan PPKTI, dan Kepada BPN.

Tugas Bapeng KAPET adalah :

1. Memberikan usulan kepada Presiden untuk kawasan yang akan ditetapkan sebagai KAPET setelah memperhatikan usulan dari Gubernur yang bersangkutan.
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk

- mempercepat pembangunan KAPET.
3. Merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong dan mempercepat masuknya investasi dunia usaha di KAPET.
  4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan KAPET.
  5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan KAPET.

Sementara untuk di tingkat daerah, kelembagaan KAPET adalah Bidang Pengelola (BP) KAPET. Ketua BP KAPET adalah Gubernur dan anggotanya meliputi tenaga ahli profesional. Tugasnya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perizinan kegiatan investasi pada KAPET.

Dalam penyelenggaraannya, ada beberapa kendala/isu yang dihadapi pemerintah, yaitu:

1. Kelembagaan pengelola dan pelaksana: kurangnya komitmen dan konsistensi implementasi kebijakan KAPET, kurang efektifnya Keppres 150/2000, BP KAPET tidak memiliki kewenangan eksekutif, kurangnya dukungan kementerian dan SKPD terkait.
2. Kebijakan insentif fiskal dan non fiskal: tidak menariknya insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam upaya menarik investor, belum memadainya kondisi sarana prasarana.
3. Iklim investasi belum kondusif: proses perijinan usaha yang berbelit-belit, lambat, mahal, tidak transparan, banyaknya Perda yang menghambat pengembangan dunia usaha seperti pungutan liar, pungutan berganda, dan sebagainya. Kondisi tersebut mengakibatkan lambatnya perkembangan dunia usaha dalam mendorong pengembangan industri sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.
4. Terbatasnya aksesibilitas penduduk kelancaran pengembangan usaha di kawasan seperti kurangnya sarana prasarana/infrastruktur, tidak berkembangnya jaringan pasar, kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha, kurangnya transfer teknologi bagi pelaku usaha sehingga produk kurang berkualitas dan kurang efisien, data dan informasi yang diperlukan tidak akurat dan tidak lengkap.

### 5.4.3 Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

#### Definisi

Pengembangan ekonomi lokal bukan hanya retorika baru tetapi mewakili suatu perubahan fundamental pada aktor dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi, sebagaimana definisinya:

*"LED is the process by which actors within cities/districts (public, business and civil society partners) work collectively to enhance the quality of life by creating better conditions for economic growth, employment generation and assist local government to provide better services to its residents."* (LGSP-USAID)

PEL pada hakekatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru.

Ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah pada titik beratnya pada kebijakan "endogenous development" mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. (Blakely, 1989).

Apa pun bentuk kebijakan yang diambil, PEL mempunyai satu tujuan, yaitu: meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja tersedia untuk penduduk setempat. Dalam mencapai itu, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif saja. Setiap kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus pro-PEL, atau sinkron dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain kegiatan pengembangan ekonomi lokal, sebagaimana kegiatan publik lain, sifatnya tidak berdiri sendiri atau saling terkait dengan aspek publik lainnya.

### Pergeseran Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Lapangan kerja	Lebih banyak perusahaan = lebih banyak lapangan kerja	Perusahaan yang mengembangkan pekerjaan berkualitas yang sesuai untuk penduduk setempat
Basis pembangunan	Pembangunan sektor ekonomi	Pembangunan kelembagaan ekonomi baru
Aset lokasi	Keuntungan komparatif berdasar aset fisik	Daya saing berdasarkan kualitas lingkungan
Sumber daya	Ketersediaan tenaga kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Blakely, *ibid.*, h. 69

#### 5.4.4 Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal

Sejalan dengan perkembangan permasalahan dan beberapa isu kebijakan tersebut, catatan dari *World Bank* menyebutkan bahwa fokus dari PEL juga telah mengalami pergeseran dalam tiga dekade belakangan ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pergeseran Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal

Focus	Tools
<b>1960an – 1980an (public sector only)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menarik investasi manufaktur dari luar daerah</li> <li>- Menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI)</li> <li>- Membangun / investasi prasarana fisik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah besar, keringanan pajak, pinjaman bersubsidi bagi investasi manufaktur</li> <li>- Subsidi investasi prasarana fisik</li> <li>- Penekanan biaya produksi dengan teknik seperti buruh murah.</li> </ul>

1980an – 1990an ( <i>public sector driven</i> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi dan menumbuhkan bisnis lokal saat ini</li> <li>- Melanjutkan titik berat pada menarik investor dalam negeri tapi biasanya lebih pada sektor spesifik atau pada area tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran langsung kepada bisnis individu-Inkubasi bisnis/ tempat kerja</li> <li>- Bimbingan dan pelatihan kepada UKM</li> <li>- Bantuan teknis</li> <li>- Bantuan start-up usaha</li> <li>- Investasi fisik dan non-fisik</li> </ul>
Akhir 1990an – seterusnya ( <i>public sector led</i> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat keseluruhan lingkungan bisnis kondusif</li> <li>- Investasi non-fisik (pengembangan SDM, rasionalisasi peraturan)</li> <li>- Kemitraan pemerintah-swasta</li> <li>- Mendorong investasi sektor swasta ke barang publik</li> <li>- Target tinggi untuk menarik investasi, membangun daya saing lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi holistik untuk menyediakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan rangsangan bagi pertumbuhan bisnis setempat</li> <li>- Networking dan kerjasama antar komunitas</li> <li>- Memfasilitasi <i>business clusters</i> (kumpulan bisnis yang saling berkaitan)</li> <li>- Pengembangan SDM</li> <li>- Menunjang peningkatan kualitas hidup.</li> </ul>

WB, 2001

Dari tabel tersebut dapat ditangkap bahwa fokus pendekatan dan tools yang digunakan mengarah pada pendekatan yang holistik guna membangun lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, mengutamakan networking kemitraan antar pelaku bisnis dan *stakeholders* pembangunan, pengembangan *business clusters* guna membentuk daya saing kegiatan ekonomi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Di bawah ini akan disinggung sebagian mengenai suatu pendekatan perencanaan PEL yang pada hakekatnya masih mendekati cara berfikir dan pendekatan yang biasa digunakan dalam perencanaan PWK yang telah diaplikasikan selama ini.

### 5.4.5 Pendekatan Perencanaan Ekonomi Lokal Pengembangan Daya Saing

Mengembangkan ekonomi lokal berarti bekerja secara langsung membangun *economic competitiveness* (daya-saing ekonomi) suatu kota untuk meningkatkan ekonominya. Prioritas ekonomi lokal pada peningkatan daya saing ini adalah krusial, mengingat keberhasilan (kelangsungan hidup) komunitas ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan yang cepat dan meningkatnya kompetisi pasar.

Setiap komunitas mempunyai kondisi potensi lokal yang unik yang dapat membantu atau menghambat pengembangan ekonominya. Atribut-atribut lokal ini akan membentuk benih, yang dari situ strategi PEL dapat tumbuh memperbaiki daya saing lokal. Untuk membangun daya saing tiap komunitas perlu memahami dan bertindak atas dasar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk membuat lokasi/ kotanya menarik bagi kegiatan bisnis, kehadiran pekerja dan lembaga yang menunjang. Daya saing dapat diukur dengan beberapa kategori indikator. Tiap ukuran mencerminkan insentif penting untuk berinvestasi di daerah tersebut. Setidaknya ada empat kategori penilaian yang digunakan untuk mengukur daya saing:

1. Struktur ekonomi: komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta tingkat investasi asing atau domestic. Beberapa teknik analisis yang biasa digunakan perencana, termasuk: *location quotient (LQ)*, *shift-share analysis*, *economic base analysis*, *regional income indicators*, dst.
2. Potensi wilayah: yang non-tradeable seperti lokasi, prasarana, sumber daya alam, amenity, biaya hidup dan bisnis, citra daerah
3. Sumber daya manusia: kualitas SDM yang mendukung kegiatan ekonomi
4. Kelembagaan: konsistensi kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang pro-PEL, serta budaya yang mendukung produktivitas.

Dalam hal ini ada tiga metode penilaian yang dapat digunakan,

yaitu: ekonomi wilayah, benchmarking, analisis SWOT. Tiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, sebagaimana di bawah ini:

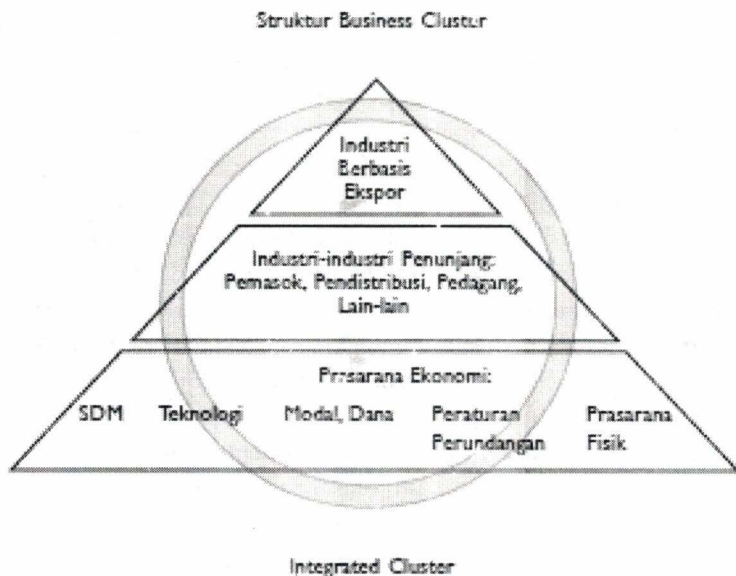
1. **Ekonomi wilayah.** Berfokus pada analisis kuantitatif dari ekonomi kota. Variabel kuncinya termasuk struktur ekonomi dan biaya produksi di lokasi terutama biaya transport dan buruh. Kelebihan dari metode ini adalah efektivitasnya untuk menilai industri tradisional, labor intensif, mengidentifikasi keunggulan komparatif dan faktor harga. Kelemahannya kurang mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti: stabilitas politik, dan produktivitas buruh, dan kontribusi dari sektor informal.
2. **Benchmarking.** Identifikasi kota-kota sebagai acuan perbandingan untuk menyusun tujuan dan menggunakannya sebagai visi dan panduan. Seiring dengan perubahan pada kota acuan, kota yang mengacu juga dapat secara dinamis merubah visi masa depan kotanya. Metode ini dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat di antara kebijakan, perilaku dan outcomes di kota acuan, namun tidak mampu mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan akhir.
3. **Analisis SWOT.** Analisis yang biasa digunakan dalam perencanaan strategis untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal. Kelebihan dari metode ini adalah tidak membatasi tujuan dan informasi yang digunakan, dapat menggunakan informasi dari media masa, hasil interview dst. Kelemahannya hasilnya dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang atau variasi dari personel yang terlibat. (World Bank, 2001)

Sesuai dengan perkembangan kota, diperlukan penilaian daya saing yang dinamis dan strategis.

#### **5.4.6 Pengembangan Business Cluster**

Kluster industri sering disebut sebagai mesin dari ekonomi lokal. Suatu kluster mempunyai tiga dimensi yang menyangkut: produsen pengeksport, pemasok dan perantara, dan institusi dasar yang memberikan input, seperti ide, inovasi, modal dan prasarana (lihat Gambar). Kluster industri

dimaksudkan sebagai lokomotif untuk mendorong perkembangan sistem industri di daerahnya melalui fokus pada dukungan terhadap jenis-jenis industri setempat yang potensial sebagai basis ekspor ke luar daerah.



Sumber: Le Maroc, 1997

Hubungan keterkaitan antar industri dan meningkatnya pendapatan daerah, dapat merangsang kebutuhan atau permintaan akan jasa dan produk lokal yang lebih luas lagi (*multiplier effects*). Pengembangan cluster berfokus pada fasilitasi atau penguatan keterkaitan dan saling ketergantungan antar unit usaha (hubungan pemasok dan pembeli) dalam suatu network produksi dan penjualan produk dan jasa. Dengan mendorong industri yang prospek pasarnya tinggi, mampu berkompetisi diharapkan akan meningkatkan perolehan devisa ( $X > M$ ) dan menciptakan kebutuhan akan produk industri setempat atau sekitarnya. Demikian pula peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan produk dan jasa dari kegiatan ekonomi setempat pula (*domestic demand = C*). Demikian selanjutnya, mata rantai ini jika berhasil

diperluas akan mengembangkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kluster berarti bahwa inisiatif PEL dikonsentrasikan pada mendorong dan mendukung kerjasama antar perusahaan, pengembangan kelembagaan dan mendukung sektor industri yang dipilih. Pengembangan cluster dilaksanakan dibawah strategi PEL akan menyangkut beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pengembangan network. Perhatian khusus diberikan untuk mendorong kerjasama penduduk setempat dalam cluster yang sama untuk secara bersama untuk meningkatkan peluang pengembangan bisnis. Network ini dapat pemasaran produk bersama dan kemudian memulai perdagangan antar perusahaan dalam satu cluster.
2. Mengembangkan upaya pemasaran bersama cluster. Identifikasi dan pengembangan cluster membentuk basis untuk promosi investasi dan pemasaran, sebagai bagian dari program city marketing.
3. Menyediakan informasi yang spesifik untuk cluster. Kegiatan yang dapat segera dilakukan adalah mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang kegiatan bisnis dan system pendukung kebijakan. Dengar. pertukaran informasi ini keterkaitan pembeli-pemasok dapat dikembangkan.
4. Mendukung riset bersama. Perguruan tinggi yang ada dapat dilibatkan dalam riset yang bermanfaat bagi kluster, pengembangan inkubasi bisnis.
5. Mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Kunci untuk networking bisnis di dalam suatu inisiatif cluster adalah apresiasi keterampilan di dalam sektor. Bila sejumlah bisnis mengekspresikan kebutuhan, sehingga pelatihan yang sesuai akan dapat diberikan.

Pemerintah daerah dapat berkolaborasi secara regional, menjadi fasilitator dari networking antar industri, dan katalis yang menjalin tiap pelaku ekonomi untuk bekerjasama. Di samping itu, pemerintah daerah juga dapat berperan besar dalam menumbuhkan permintaan (*government expenditure=G*), mengingat di kebanyakan daerah belanja pemerintah masih dominan. Ini penting, karena biasanya sulit bagi unit

UKM setempat untuk bersaing; mendapatkan kesempatan, mengingat keterbatasan kelembagaan, biaya pemasaran serta akses ke sumber dana.

### 5.4.7 Pengembangan Kelembagaan yang Menunjang PEL

Pesan berikut dari Geddes adalah menyangkut *community education*. Ini dapat dikaitkan dengan pendapat bahwa perencanaan dan pembangunan adalah proses pembelajaran, yang bukan mengajari masyarakat, namun belajar bersama masyarakat. Proses perencanaan adalah proses “belajar bersama”, tidak memberi tekanan pada pembuatan dokumen, tetapi pada dialog (Friedman, 1981).

- **Kemitraan;** Proses perencanaan dan implementasi pengembangan ekonomi lokal dilaksanakan secara kolektif antara ketiga unsur: pemerintah – swasta – masyarakat. Antara ketiganya saling terkait dalam menentukan keberhasilan kebijakan PEL. Kegiatan usaha yang sukses menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Agar sukses kegiatan usaha tergantung pada kondisi lokal. Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha. Pada skala kota (*urban wide*), berarti menjalin kemitraan antar *stakeholders*, pihak pemerintah daerah dan instansi terkaitnya; pihak swasta yang menyertakan pelaku industri besar-menengah-kecil, asosiasi-asosiasi; dan pihak masyarakat yang menyertakan wakil-wakil kelompok, NGO. Masing-masing dengan potensi dan aspirasinya membentuk visi, misi dan tujuan PEL bagi daerahnya. Pada skala komunitas (*community base*), juga dijalin kerjasama antara pihak warga, CBO (*community based organization*), unit-unit usaha di lingkungan yang sama, dan aparat pemerintah yang fungsinya langsung melayani masyarakat. Masing-masing difalिसitasi untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.
- **Kontrol;** Pada sisi lain, proses dialog antar *stakeholder* tersebut juga mempunyai fungsi kontrol. Kebijakan PEL akan dapat sukses kalau dilaksanakan sesuai dengan azas *good governance*, ada untuk kepercayaan, keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk itu lembaga *self-*

*control* melalui forum PEL pada tingkat kota maupun komunitas akan diperlukan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penyimpangan dari asumsi berjalannya konsep yang dikembangkan, bekerjanya mekanisme pasar, yang ternyata meleset karena terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan, karena tidak adanya lembaga kontrol yang efektif, yang menyuarakan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha (UKM). Sehingga banyak instrumen kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi lokal yang disalah gunakan. Banyak kegiatan bisnis swasta yang dibiarkan membebankan biaya atau kewajiban internalnya, menjadi beban eksternal yang harus ditanggung publik. Dengan menggunakan perencanaan sebagai proses pembelajaran, maka perencana dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat, membantu masing-masing *stakeholder* menyadari hak dan kewajibannya dalam pemberdayaan kegiatan ekonomi di daerahnya.

#### **5.4.8 Kerjasama Pembangunan Regional**

##### **JABODETABEKJUR**

Dalam upaya meningkatkan keserasian dan keterpaduan pembangunan serta pemecahan masalah bersama di wilayah JABOTABEK, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat untuk mengembangkan kerjasama dan membentuk suatu wadah kerjasama. Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan JABODETABEKJUR yang saling terkait, saling mempengaruhi, saling ketergantungan dan saling menguntungkan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama Daerah.

Dengan mengacu pada Rencana Induk DKI Jakarta tahun 1965-1985, dimana salah satu pasalnya menyebutkan pengeramban pembangunan yang ada di wilayah DKI Jakarta juga diarahkan ke wilayah BOTABEK dan perlunya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

151 Tahun 1975 tentang Perubahan Batas Wilayah DKI Jakarta. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang 16 Desa dari Provinsi Jawa Barat masuk menjadi wilayah Provinsi DKI Jakarta dan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Benda masuk ke wilayah Kota Tangerang.

Penyelesaian lebih lanjut dan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 ini diselesaikan oleh Tim Pelaksana Penetapan Batas-batas Wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1975. Mengingat kerjasama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat dianggap telah mendesak untuk dilaksanakan, maka dengan Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6375/A-1/1975 dan 2450/A/K/BKD/75 dibentuk Badan Persiapan Daerah untuk Pengembangan Metropolitan JABOTABEK. Untuk melaksanakan kerjasama dimaksud maka keluarlah Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/76 dan 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEKK dan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.IV-320/d/II/76 dan 197.Pem.121/SK/76 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (JABOTABEK) yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem. 10/34/16-282 tanggal 26 Agustus 1976.

Badan ini diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibantu Kelompok Pembantu Pimpinan dan Sekretariat Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Selanjutnya status Badan yang dibentuk oleh Keputusan Bersama ditingkatkan dengan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1990 dan 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bersama Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/76 dan 3 Tahun 1976 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1991 tertanggal 13 Nopember 1991 yang

mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan atas dasar hal wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II serta urusan yang tumbuh dan berkembang di JABOTABEK.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan status kelembagaan dan memberikan eselonering untuk menjamin pengembangan karier bagi pejabat dan staf yang ada di dalamnya, dengan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 dan 7 Tahun 1994, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1994.

Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan ini berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK. Yang memiliki tugas pokok menyusun dan menetapkan rancangan kebijaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama pembangunan di wilayah JABOTABEK

Organisasi Badan terdiri dari Forum Kerjasama dan Sekretariat. Forum terdiri dari:

1. Ketua, yaitu Gubernur Kepala Daerah,
2. Sekretaris, yaitu Sekretaris Wilayah,
3. Wakil Sekretaris, yaitu Ketua BAPEDA,
4. Anggota terdiri dari :
  - Walikotamadya Jakarta Timur
  - Walikotamadya Jakarta Barat
  - Walikotamadya Jakarta Pusat
  - Walikotamadya Jakarta Selatan
  - Walikotamadya Jakarta Utara
  - Walikotamadya KDH TK. II Bogor
  - Bupati KDH TK. II Bogor
  - Walikotamadya KDH TK. II Tangerang
  - Bupati KDH TK. II Tangerang
  - Bupati KDH TK. II Bekasi

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan diberikan Eselonering IIIA. Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Forum.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rancangan meliputi koordinasi analisis perencanaan, analisis pelaksanaan, analisis evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan layanan teknis administratif kepada Forum Kerjasama. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka Kotamadya DT. II Depok yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian dalam kerjasama regional ini.

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 87, pada Rapat Kerja Forum Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK yang diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2000, ditandatangani Kesepakatan Bersama Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Walikota Depok tentang Tindak Lanjut dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Bekasi, pemerintah Kota Bekasi (JABOTABEK) dan Pemerintah Kota Depok.

Setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kerjasama, Sekretariat BKSP JABOTABEK bersama-sama dengan unsur terkait dari Provinsi dan Kabupaten / Kota yang bekerja sama membahas upaya peningkatan lembaga kerjasama ini, mengingat permasalahan di JABODETABEK sudah sangat kompleks. Maka disepakatilah bahwa Eselonering Sekretariat BKSP JABOTABEK perlu ditingkatkan mengingat Dinas/Instansi yang dikoordinasikan memiliki eselon yang lebih tinggi. Dengan terbentuknya Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 dan posisi strategis

Kabupaten Cianjur pada kawasan penanganan tata ruang, konservasi dan penyeimbang pembangunan di daerah Puncak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, dipandang perlu untuk mengikutsertakan Provinsi Banten dan Kabupaten Cianjur.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Badan Kerjasama dituangkan dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 065/Kep.296-Pem/2002 tentang Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Badan Kerjasama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK). Maka disusun rancangan Keputusan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (JABODETABEKJUR) di mana dalam rancangan tersebut Badan sebagai wadah kerjasama antar Daerah, merupakan lembaga koordinasi yang mewakili kepentingan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Forum dan disetarakan dengan Eselon II b.

Sebagai payung dalam pelaksanaan kerjasama antar Daerah JABODETABEKJUR maka pada tanggal 16 Juni 2005 yang difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi Dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi Dan Kabupaten Cianjur, salah satu isi di dalamnya menegaskan untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur dengan ruang lingkup kerjasama meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan

daerah otonom yang saling keterkaitan, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat antara lain mengenai keselarasan, keserasian dan keseimbangan di dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan dasar Kesepakatan Bersama tanggal 16 Juni 2005 tersebut, kemudian disusun draft Peraturan Bersama tentang peningkatan Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK. Dengan beberapa kali pertemuan dengan Instansi Pusat dan Daerah terkait maka disepakatilah draft akhir yaitu Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Dan Kabupaten Cianjur, yang kemudian ditandatangani pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Forum I pada tanggal 14 September 2006 di Hotel Horison Bandung.

Yang menjadi dasar hukum dari pengembangan program kerjasama pembangunan regional JABODETABEKJUR ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan

- Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

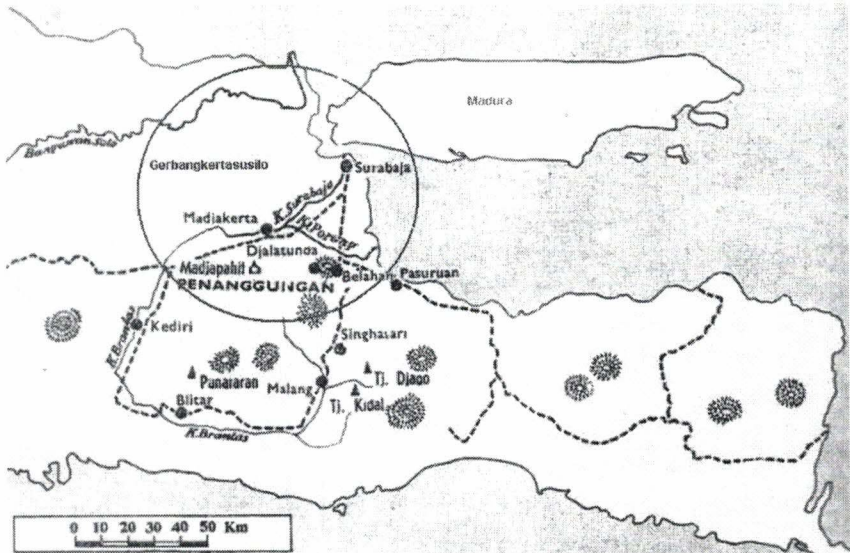
Ruang lingkup dari kegiatan kerja sama dari JABODETABEKJUR ini meliputi:

- Penataan Ruang
- Permukiman, Sarana & Prasarana
- Sumber Daya Air, Kebersihan dan LH
- Transportasi, Perhubungan dan Pariwisata
- Agribisnis, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Investasi
- Kependudukan, Ketentraman & Ketertiban
- Kesehatan dan Pendidikan
- Sosial dan Tenaga Kerja

## **Gerbangkertosusilo**

Gerbangkertosusila adalah akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Kawasan ini dimaksudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur sebagai kawasan perkembangan ekonomi dengan pusatnya di Surabaya. Kawasan ini serupa dengan istilah Jabodetabek dengan pusat di Jakarta. Dengan perkembangan yang sangat pesat, yang meliputi jumlah penduduk dan ekonomi, dari wilayah urban megapolitan Gerbangkertosusila, maka kemungkinan adanya pengembangan wilayah sendiri menjadi Daerah Khusus Metro Sutabaya, setingkat dengan provinsi terpisah dari wilayah Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pemisahan ini untuk mengurangi beban Jawa Timur sebagai provinsi paling besar jumlah penduduknya. Dengan adanya Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan

Bangkalan (Madura), maka makin jelas arah dari wilayah megapolitan Gerbangkertosusilo sebagai wilayah provinsi tersendiri.



#### 5.4.9 Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan kawasan agropolitan? Berikan contoh penerapannya di Indonesia.
2. Sebutkan tiga isu utama dalam pengembangan kawasan agropolitan.
3. Apa yang dimaksud dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)? Sebutkan juga tujuan pengembangan kawasan ini.
4. Apa yang dimaksud dengan Pengembangan Ekonomi Lokal? Bagaimana perkembangannya di Indonesia?
5. Apa yang dimaksud dengan kawasan 'business clusters'? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia.

### 5.4.10 Kesimpulan

Dalam implementasi di Indonesia, ada banyak program yang telah dilakukan, yaitu pengembangan kawasan agropolitan, KAPET, PEL, dan Program kerjasama pembangunan regional lainnya, misalnya JABODETABEKJUR dan Gerbangkertosusilo.

### 5.4.11 Test Formatif

1. Kawasan Gerbangkertosusilo yang sama dengan JABODETABEKJUR, terletak di Provinsi...
  - a. Jawa Barat
  - b. Jawa Tengah
  - c. Jawa Timur
  - d. DI Jogjakarta
2. Dalam penyelenggaraan KAPET, ada beberapa kendala/isu yang dihadapi pemerintah, kecuali...
  - a. Tidak menariknya insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam upaya menarik investor
  - b. Iklim investasi belum kondusif
  - c. Kondisi di KAPET tidak aman
  - d. Kurangnya dukungan kementerian dan SKPD terkait
3. Menumbuhkan permintaan pemerintah yang bisa dipenuhi oleh UKM merupakan salah satu konsep yang dikembangkan dalam...
  - a. PEL
  - b. KAPET
  - c. JABODETABEKJUR
  - d. Kawasan agropolitan
4. Setidaknya ada empat kategori penilaian yang digunakan untuk mengukur daya saing, yaitu...
  - a. Struktur ekonomi, potensi wilayah, faktor produksi, dan

- lingkungan hidup
- b. Struktur ekonomi, potensi wilayah, sumber daya manusia, dan kelembagaan
  - c. Potensi wilayah, daya beli masyarakat, kesehatan, dan pendidikan
  - d. Sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan factor sosial
5. Kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan adalah kawasan yang sebaiknya telah ditumbuhkembangkan oleh pemerintah, seperti...
- a. Daerah Aliran Sungai (DAS)
  - b. Kawasan industri terpadu
  - c. Kawasan hutan lindung
  - d. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Kawasan Peternakan, Kawasan Hortikultura atau Kawasan Tanaman Pangan

## 5.5 Jawaban Test Formatif

Sub Bab Analisis Potensi Wilayah dan Daerah untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)

Sub Bab Analisis Potensi Wilayah dan Daerah untuk Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa

Sub Bab Analisis Potensi Wilayah dan Daerah untuk Penyusunan RTRW

Sub Bab Analisis Potensi Wilayah dan Daerah untuk Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Khusus

# Bab VI

## Perundangan dan Kelembagaan

### 6.1 Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas peraturan –peraturan terkait Analisis Potensi Wilayah dan Daerah dan kelembagaan terkait Analisis Potensi Wilayah dan Daerah. Untuk kelembagaan diuraikan tentang lembaga-lembaga yang menangani Analisis Potensi Wilayah dan Daerah sedangkan untuk mempertajam pembahasan peraturan terkait Analisis Potensi Wilayah dan Daerah dilengkapi dengan contoh-contoh penerapan di beberapa kabupaten/kota.

### 6.2 Perundangan Terkait Anpotwilda

1. Perundangan Terkait Anpotwilda untuk PPD
2. Perundangan Terkait Anpotwilda untuk Penyusunan Dok RTRW
3. Perundangan Terkait Anpotwilda untuk Pemekaran Wilayah
4. Perundangan Terkait Anpotwilda untuk Kepentingan Khusus

#### 6.2.1 Perundangan Terkait Anpotwilda Di Daerah

1. Untuk Kepentingan Penyusunan Dokumen PPD

2. Untuk kepentingan Pemekaran Wilayah
3. Untuk kepentingan Penyusunan Dok RTRW
4. Untuk Kepentingan Perenc Sektoral
5. Untuk Kepentingan Pengembangan Khusus (agropolitan, KAPET, Kawasan Pertumbuhan, dll.)

### **6.2.2 Perundangan Terkait Yang Mengatur Anpotwilda Dalam Penyusunan dokumen ppd**

Pada dasarnya Peraturan perundangan yang mengatur tentang PPD, juga memiliki ketentuan terkait dengan Anpotwilda yang harus dilakukan. Diantara peraturan yang ada, diantaranya:

1. UU 25/2004 ttg SPPN § psl 28 (kewenangan analisis), psl 31 (data & info)
2. UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah § psl 152 ttg keakuratan serta jenis data dan informasi untuk penyusunan dok PPD
3. PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah § psl 29 mengatur jenis data dan info untuk penyusunan dok PPD

### **6.2.3 Pengaturan Terkait Anpotwilda Untuk PPD (Berdasar Pasal 152 uu 32/2004 Dan Pasal 29 PP 08/2008)**

A. Menurut UU 32/2004 Pasal 152:

- Pasal 152 (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 152 (2) mencakup:
  1. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
  3. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
  4. keuangan daerah;
  5. potensi sumber daya daerah;

6. produk hukum daerah;
  7. kependudukan;
  8. informasi dasar kewilayahan; dan
  9. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

## **B. Menurut PP 8/2008 Pasal 29'**

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 (2) PP 08/2008, meliputi:

1. penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
3. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
4. keuangan daerah;
5. potensi sumber daya daerah;
6. produk hukum daerah;
7. kependudukan;
8. informasi dasar kewilayahan; dan
9. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **C. Berdasar PP 18/2008 pasal 29-39**

1. Pengumpulan Data dan Informasi serta Rencana Tata Ruang (Pasal 29)
2. Pengolahan Sumber Data, mencakup (Pasal 32):
  - a. analisis daerah
  - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah
  - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
  - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber

pendanaan; dan

e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

3. Pasal 33, PP 8/2008:

- Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan.
- Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

#### **6.2.4 Perundangan Terkait Untuk Penyusunan Dokumen RT RW**

1. UU 32/2004 ttg Pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang § psl 18 (kewenangan perencanaan tata ruang),
2. Undang-Undang Republik No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang § psl
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
6. Permen PU No.: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
7. Permen PU No.: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
8. Permen PU No.: 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan

rencana Tata Ruang Wilayah Kota

9. Permen PU No.: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota Beserta Rencana Rincinya.

### **6.2.5 Perundangan Utama Terkait Untuk Pemekaran Wilayah**

1. UU 32/2004 §psl 4(3) (kemungkinan pemekaran), psl 5 (syarat pemekaran), psl 6 (2-3) (dasar evaluasi/kajian pemekaran). Psl 10 (3) fasilitasi Peta wilayah. Psl 12 (Penetapan lokasi ibukota dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya).
2. PP 78/2007 ttg Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah § psl 6 (1), 6 (2) dan lampiran (ttg kajian teknis sbg dasar pemekaran), psl 10 (penggunaan peta dasar akurat)

### **6.2.6 Perundangan Terkait Anpotwilda Untuk Kepentingan Khusus (Agropolitan, Kapet, dll)**

Pada dasarnya Untuk kepentingan khusus ini biasanya ketentuan terkait Anpotwildanya diatur dalam peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, atau Peraturan Menteri yang terkait dengan kepentingan khusus yang terkait Wilayah tsb.

Misal Terkait Agropolitan, diatur dalam:

- Undang-Undang Republik No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang § psl 48 (5) (pengaturan rinci pd PP), psl 51 (1-2) (kedudukan dan rincian rencana agropolitan,

Untuk KAPET:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 Tahun 2000 tanggal 19 Oktober 2000, tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) § (pembentukan Badan Pengelola KAPET, dan pertimbangan teknis yang harus diberikan)

### **6.3 Kelembagaan Terkait Dalam Anpotwilda**

1. Kelembagaan Terkait Anpotwilda untuk PPD
2. Kelembagaan Terkait Anpotwilda untuk Penyusunan Dok RTRW
3. Kelembagaan Terkait Anpotwilda untuk Pemekaran Wilayah
4. Kelembagaan Terkait Anpotwilda untuk Kepentingan Khusus

#### **6.3.1 kelembagaan terkait dalam penyusunan dok ppd dan anpotwilda di daerah**

1. Pimpinan Daerah (Kepala dan Wakil Kepala Daerah), sebagai penanggung jawab PPD
2. BAPEDA dan PM (BP4MD), sebagai:
  - KOORDINATOR DAM FUNGSI PERENCANAAN DAERAH
  - Penyusun rancangan awal dokumen PPD & laksanakan ANPOTWILDA
  - Menyelenggarakan MUSRENBANG
  - Perumusan Penyusun rancangan akhir dokumen PPD
3. SKPD, Sebagai lembaga yg menindaklanjuti dok ppd dalam renc pembangunan yang lebih operasional & laksanakan ANPOTWILDA SEKTORAL
4. DPRD, sebagai lembaga yg melakukan pembahasan dan persetujuan dokumen PPD termasuk evaluasi hasil ANPOTWILDA
5. Masyarakat secara perseorangan maupun terorganisasi dapat menyampaikan data, opini, aspirasi dalam proses analisis potensi wilda, pada forum Musrenbang

#### **6.3.2 Tupoksi Bapeda Dalam Penyusunan Dokumen PPD**

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah, berdasar permendagri 57/2007 ttg petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah

### **6.3.3 Tugas Bappeda dalam Tahapan Perencanaan Daerah**

#### 1. Penyusunan Rencana

- Rancangan Rencana Pembangunan Daerah
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah

#### 2. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

- Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### 3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 5 berikutnya.

### **6.3.4. Kelembagaan Terkait Dalam Anpotwilda Untuk Penyusunan RT RW**

1. Penyusunan ANPOTWILDA untuk penyusunan RTRW DISIAPKAN OLEH BAPPEDA SECARA SWAKELOLA MAUPUN KONTRAKTUAL DENGAN PENYEDIA JASA
2. Semua dinas terkait menyampaikan tanggapan atas hasil anpotwilda yg telah dibuat (Swakelola/kontraktual) untuk keakuratan data maupun pengambilan kesimpulan atas analisis yg dilakukan (dalam Rapat BKPRD maupun dalam konsultasi publik).
3. DPRD membahas hasil analisis dan perencanaan yang telah dilakukan oleh Pemda dalam bentuk RAPERDA beserta lampiran dokumen teknis RTRW (Buku I Data dan Analisis dan Buku II Rencana)

4. Masyarakat secara perseorangan maupun ter-Organisasi dapat menyampaikan data, opini, aspirasi dalam proses analisis potensi wilda, pada masa pengumpulan data maupun forum Konsultasi Publik

### **6.3.5 Kelembagaan Terkait Dalam Anpotwilda Untuk Pemekaran Wilayah**

1. Anpotwilda disiapkan oleh bappeda secara swakelola maupun kontraktual dengan penyedia jasa
2. Pasal 10 (3) PP 78/2007: Fasilitasi pengadaan Peta wilayah oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur (untuk pemekaran provinsi), dan dikoordinasikan oleh Kabupaten (untuk pemekaran kabupaten)
3. Pasal 12 (1) PP78/2007: Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten
4. Pasal 14 & 15 (perlunya kajian daerah untuk kelengkapan persyaratan pemekaran) dilakukan oleh Bappeda sesuai Tupoksinya
5. DPRD (sesuai dengan kewenangan atas pemekaran yang dilakukan) melakukan pembahasan hasil analisis yang telah disiapkan sbg bahan persetujuan pemekaran wilayah
6. Masyarakat secara perseorangan maupun ter-Organisasi dapat menyampaikan data, opini, aspirasi dalam proses analisis potensi wilda, pada masa pengumpulan data

### **6.3.6 Kelembagaan Terkait Dalam Anpotwilda Untuk Kepentingan Kawasan Khusus (mis. Agropolitan, KAPET)**

1. Dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kaw Agropolitan (kaw. Khusus lainnya dalam kewenangan daerah), Penyusunan anpotwilda disiapkan oleh Bappeda secara swakelola maupun kontraktual dengan penyedia jasa

2. Semua dinas terkait menyampaikan tanggapan atas hasil anpotwilda yg telah dibuat (Swakelola/kontraktual) untuk keakuratan data maupun pengambilan kesimpulan atas analisis yg dilakukan (dalam Rapat BKPRD maupun dalam presentasi hasil kajian).
3. DPRD akan mengesahkan menjadi PERDA jika keseluruhan hasil Analisis dan Rencana yang telah dibuat, tidak menimbulkan keraguan dan konflik lagi. Untuk penetapan KAPET harus ditetapkan oleh Presiden
4. Masyarakat secara perseorangan maupun ter-Organisasi dapat menyampaikan data, opini, aspirasi dalam proses analisis potensi wilda, pada masa pengumpulan data maupun forum Konsultasi Publik

# Bab VII

## Penggunaan Sistem Informasi Dalam Identifikasi Potensi Wilayah Dan Daerah

### 7.1 Pendahuluan

Dalam rangka pengembangan potensi daerah diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung dan memonitor pelaksanaan pembangunan potensi daerah tersebut. Webgis Simpotenda adalah aplikasi Sistem Informasi Potensi Daerah berbasis SIG.

SIG merupakan suatu tools yang didisain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi telah mencapai kemajuan yang cukup pesat.

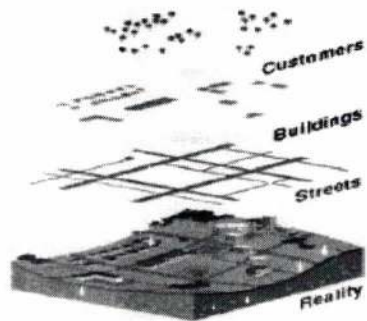
Webgis Simpotenda merupakan bagian dari situs resmi pemerintah daerah (Provinsi atau kabupaten atau Kota) berbasis GIS (peta) sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat umum maupun calon pengunjung/investor melalui internet. GIS (Geographic Information System) adalah suatu sistem yang mendesain, mengelola dan menyajikan data bereferensi geografis atau peta dalam mendukung pengambilan keputusan.

## 7.2 Kemampuan SIG

### 7.2.1 Memetakan Letak

Data realita di permukaan bumi dipetakan ke dalam beberapa layer dengan setiap layer-nya merupakan representasi kumpulan benda (feature) yang mempunyai kesamaan, contohnya layer jalan, layer bangunan, dan layer customer. Layer-layer ini kemudian disatukan dengan disesuaikan urutannya..

Setiap data pada setiap layer dapat dicari, seperti halnya query terhadap database, untuk kemudian dilihat letaknya dalam keseluruhan peta. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk mencari dimana letak suatu daerah, benda, atau lainnya di permukaan bumi. Fungsi ini dapat digunakan seperti untuk mencari lokasi rumah, mencari rute jalan, mencari tempat-tempat penting dan lainnya yang ada di peta. Orang dapat pula melihat pola-pola yang mungkin akan muncul dengan melihat penyebaran letak-letak feature, misalnya sekolah, pelanggan, daerah miskin dan sebagainya.



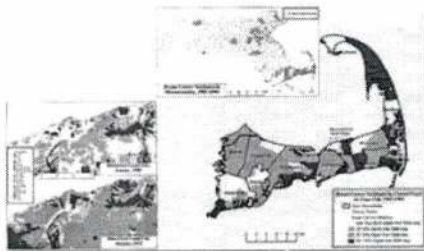
Gambar 30

Representasi SIG terhadap dunia nyata

### 7.2.2 Memetakan Kuantitas

Orang sering memetakan kuantitas, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan jumlah, seperti dimana yang paling banyak atau dimana yang paling sedikit. Dengan melihat penyebaran kuantitas tersebut dapat mencari tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun juga untuk mencari hubungan dari masing-masing tempat tersebut. Pemetaan ini akan lebih

memudahkan pengamatan terhadap data statistik dibanding database biasa. Contoh SIG pada Gambar berikut memetakan jumlah penderita kanker di teluk Cod direlasikan dengan penggunaan lahan. Pemetaan ini digunakan untuk menganalisa apakah penggunaan pestisida dan bahan kimi lainnya berpengaruh terhadap kasus kanker yang terjadi.

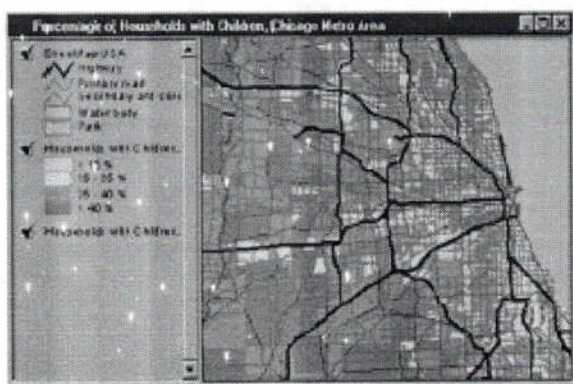


**Gambar 2**  
Peta penyebaran penyakit kanker dan peta lahan pertanian

### 7.2.3 Memetakan Kerapatan (Density)

Pada saat orang melihat konsentrasi dari penyebaran dari feature, di wilayah yang mengandung banyak feature mungkin akan mendapat kesulitan untuk melihat wilayah mana yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi dari wilayah lainnya. Peta kerapatan dapat mengubah bentuk konsentrasi ke dalam unit-unit yang lebih mudah untuk dipahami dan seragam, misal membagi dalam kotak-kotak selebar 10 km<sup>2</sup> dengan menggunakan perbedaan warna untuk menandai tiap-tiap kelas kerapatan.

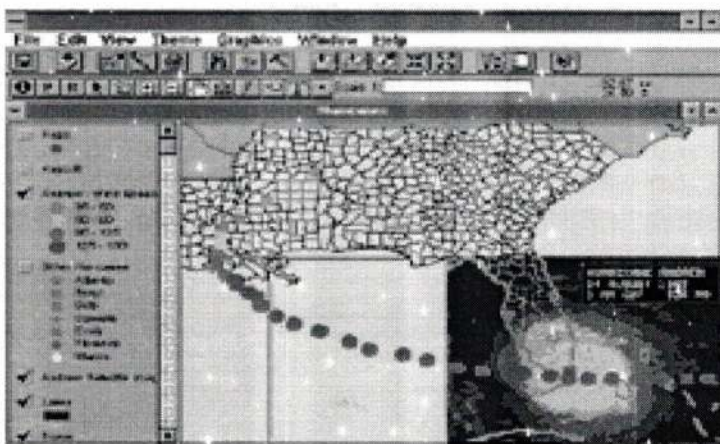
Pemetaan kerapatan sangat berguna untuk data-data yang berjumlah besar seperti sensus atau data statistik daerah. Dalam data sensus, sebuah unit sensus yang mempunyai



jumlah keluarga diatas 40 diberi warna hijau, 30-40 hijau muda dan seterusnya. Dengan cara ini orang akan lebih mudah melihat daerah mana yang kepadatan penduduknya tinggi dan mana yang kepadatannya penduduknya rendah.

#### 7.2.4 Memetakan Perubahan

Dengan memasukkan variabel waktu, SIG dapat dibuat untuk peta historikal. Histori ini dapat digunakan untuk meprediksi keadaan yang akan datang dan dapat pula digunakan untuk evaluasi kebijaksanaan. Pemetaan jalur yang dilalui badai, dapat digunakan untuk memprediksi kemana nantinya arah badai tersebut, dll.

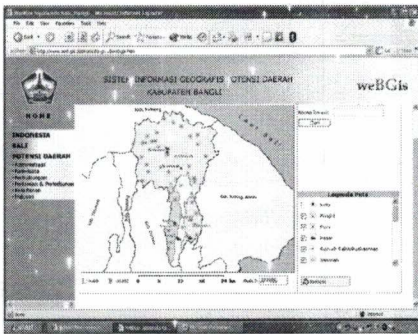
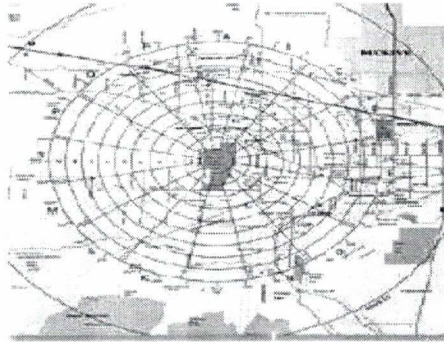


Gambar 32 Peta jalur yang akan dilalui badai

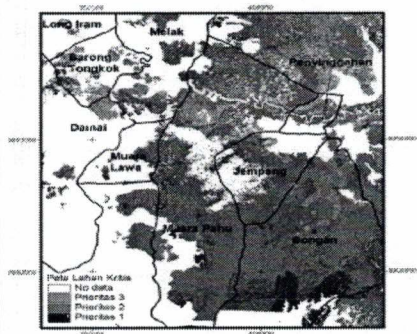
#### 7.2.5 Memetakan Apa yang Ada di Dalam dan di Luar Area

SIG digunakan juga untuk memonitor apa yang terjadi dan keputusan apa yang akan diambil dengan memetakan apa yang ada pada suatu area dan apa yang ada di luar area. Sebagai contoh, pada Gambar dibawah

ini adalah peta sekolah, jalan, sirene dan lainnya dalam jarak radius 10 mil dari pembangkit listrik tenaga nuklir Palo Verde. Peta ini digunakan untuk dasar rencana apabila terjadi keadaan darurat.



Gambar 34 Peta Lahan Kritis



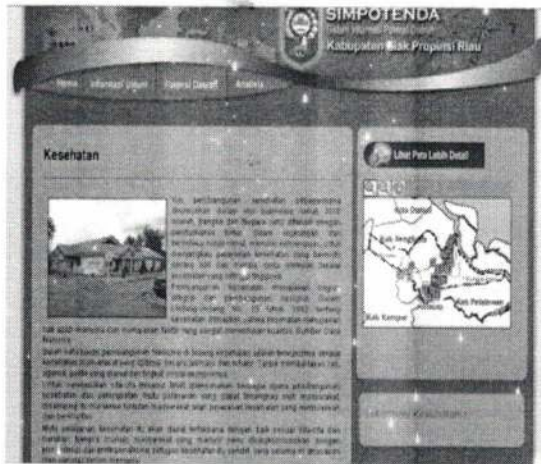
Gambar 35 Peta Potensi Daerah Kabupaten Bangli

Data dan informasi yang ditampilkan dalam aplikasi ini selalu dikaitkan dengan posisi geografis, artinya informasi yang disajikan dapat diketahui koordinat geografisnya (lintang dan bujur). Lebih jauh lagi koordinat geografis tersebut merupakan gambaran tepat tentang objek-objek data dan informasi seperti :

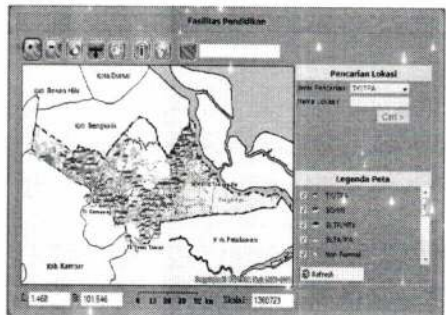
- Puskesmas (titik)
- Jalan (garis)
- Desa (area)

Ketiga bentuk objek tersebut dapat digambarkan secara interaktif dengan data potensi daerah/wilayah sehingga pengguna internet dapat memahami dengan mudah informasi tentang data dan posisi geografisnya. Dalam penyajiannya aplikasi Simpotenda didukung oleh sumber data, sumber peta, sistem kerja dan sistem penyajian secara visual yang merupakan keunikan tersendiri yang membedakannya dengan aplikasi-aplikasi yang lain.

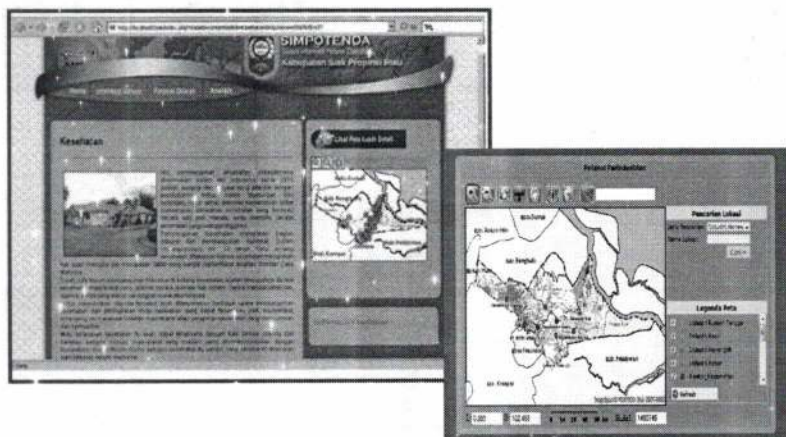
Secara visual dapat dilihat keterkaitan data dan posisi geografis di sektor pendidikan berikut ini:



Simpotenda adalah merupakan sarana yang akan memudahkan penyampaian data potensi daerahnya kepada umum secara lebih cepat dan mudah tanpa melalui birokrasi yang panjang. Webgis Simpotenda dapat menyajikan dan menampilkan data potensi daerah dalam bentuk peta secara global (internet) sehingga dengan mudah diakses oleh masyarakat umum.

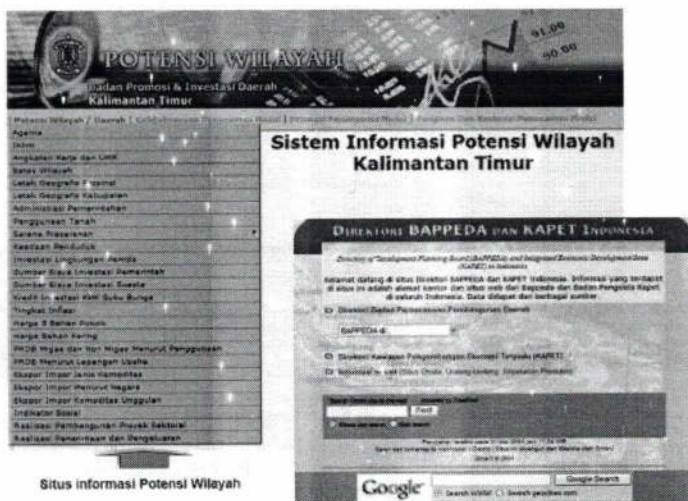


Sebagai gambaran masyarakat yang ingin mengetahui dimana Puskesmas A berada dengan mudah dapat dijawab tentang: lokasi (nama desa; kecamatan), jarak tempuh dan rute jalan terbaik yang harus ditempuh.



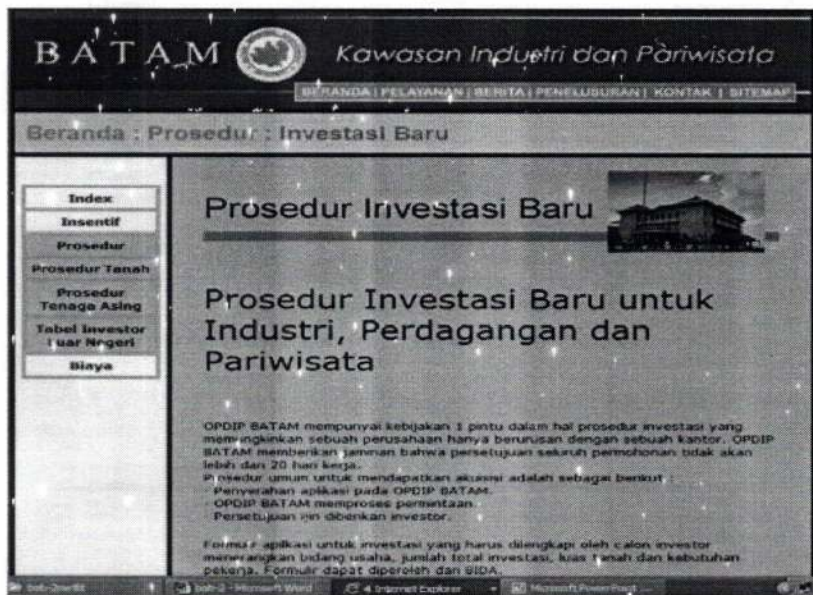
### 7.3 Situs Potensi Wilayah Dan Daerah

#### 7.3.1 Situs Potensi Wilayah Badan Promosi Dan Infestasi Daerah Kalimantan Timur





### 7.3.2 Situs Potensi Otorita Batam



The screenshot shows the website for Batam's Industrial and Tourism Potential. The header includes the logo 'BATAM Kawasan Industri dan Pariwisata' and navigation links: BERANDA | PELAYANAN | BERITA | PENELUSURAN | KONTAK | SITEMAP. The main content area is titled 'Prosedur Irvestasi Baru' (sic) and features a sub-heading 'Prosedur Investasi Baru untuk Industri, Perdagangan dan Pariwisata'. A sidebar on the left lists menu items: Index, Insentif, Prosedur, Prosedur Tanah, Prosedur Tenaga Asing, Tabel Investor Luar Negeri, and Biaya. The main text describes the investment process, mentioning OPDIP BATAM and providing a list of required documents and steps.

**BATAM** Kawasan Industri dan Pariwisata  
BERANDA | PELAYANAN | BERITA | PENELUSURAN | KONTAK | SITEMAP

Beranda : Prosedur : Investasi Baru

**Prosedur Irvestasi Baru**

**Prosedur Investasi Baru untuk Industri, Perdagangan dan Pariwisata**

OPDIP BATAM mempunyai kebijakan 1 pintu dalam hal prosedur investasi yang memungkinkan sebuah perusahaan hanya berurusan dengan sebuah kantor. OPDIP BATAM memberikan jaminan bahwa persetujuan seluruh permohonan tidak akan lebih dari 20 hari kerja.

Prosedur umum untuk mendapatkan akuisisi adalah sebagai berikut:

- Penyerahannya aplikasi pada OPDIP BATAM.
- OPDIP BATAM memproses permohonan.
- Persetujuan ini dibenarkan investor.

Formulir aplikasi untuk investasi yang harus dilengkapi oleh calon investor merencanakan bidang usaha, jumlah total investasi, luas tanah dan kebutuhan pekerja. Formulir dapat diperoleh dan SIDA.

Situs Potensi Otorita Batam



The screenshot shows the home page of the Batam website. It features a large globe graphic with the text 'Selamat Datang di ...' and 'Homepage Otorita BATAM'. The header includes the logo 'BATAM Kawasan Industri dan Pariwisata' and navigation links: BERANDA | PELAYANAN | BERITA | PENELUSURAN | KONTAK | SITEMAP. There are buttons for 'English' and 'Bahasa Indonesia'. A sidebar on the left lists menu items: TENTANG KAMI, PROFIL, FASILITAS, BATAM REPORT, PERTANAHAN, and INVESTASI. The main content area has a section for 'Investor Klik di sini' and 'FORTHCOMING PROJECTS NEWS UPDATE'. The footer includes contact information and the year 2000.

**BATAM** Kawasan Industri dan Pariwisata  
BERANDA | PELAYANAN | BERITA | PENELUSURAN | KONTAK | SITEMAP

English  
Bahasa Indonesia

**Selamat Datang di ...**  
Homepage  
**Otorita BATAM**

TENTANG KAMI  
PROFIL  
FASILITAS  
BATAM REPORT  
PERTANAHAN  
INVESTASI

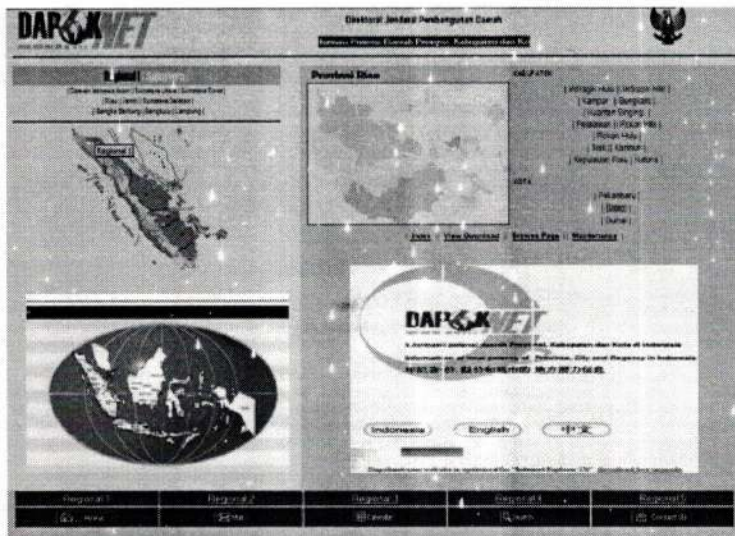
Investor  
Klik di sini

FORTHCOMING PROJECTS  
NEWS UPDATE

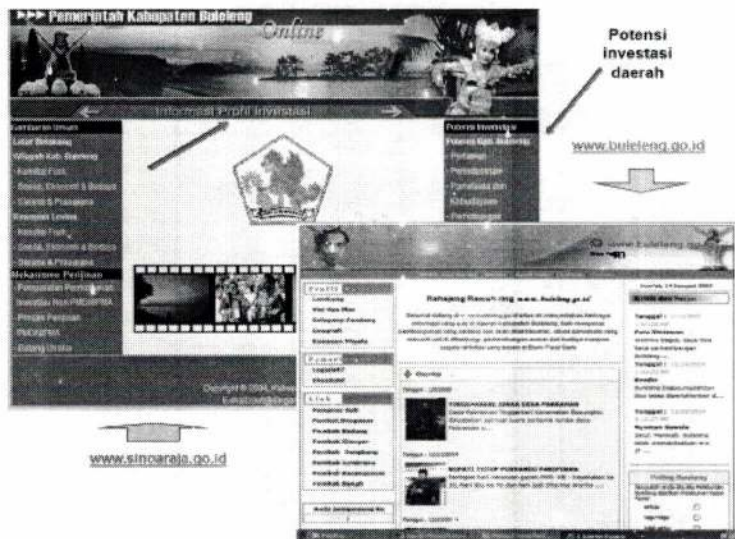
Homepage ini telah diakses 23667 kali  
2000 IPTeXnet

Landasan Hukum BIDA | E-mail Webmaster

### 7.3.3 DAPOKNET Direktorat Jendral Pembangunan Daerah



### 7.3.4 Situs Pemerintah Kabupaten Buleleng



### 7.3.5 Situs Pemerintah Kabupaten Solok

Halaman Utama  
**Lambang Daerah**  
 Selayang Pandang  
 Pemerintahan  
 Potensi Daerah  
 Partisipasi  
 Solok dalam Angka  
 Seputar Solok  
 Satu Pita Plus  
 Galeri  
 KONTAK

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Solok  
 Best viewed with 1024x768 resolution

**Sekapur Sirih** [www.solok.go.id](http://www.solok.go.id)

Selamat Datang di website resmi Pemerintah Kabupaten Solok. Seperti anda lihat, kami tampil dengan perhatian anda pada dinamika kabupaten Solok. Memang pada beberapa bagian disini berusaha memperbaiki dan melengkapi informasi anda terhadap kabupaten Solok. Kami maupun komentar anda sangat kami hargainya dan kabupaten Solok akan segera membalasnya.  
 info@prikam@solok.go.id

\*...in Solok, West Sumatra, regent of Solok talks about corruption, and has begun home ministry. Jakarta talks shows and attends Newsweek, Inc.

Kalimat diatas adalah gambaran media massa dan [www.msnbc.msn.com](http://www.msnbc.msn.com), dan masyarakat Bupati Solok H. Gamawan Fauzi, SH

Nepenthes talengersis, tumbuhan pemakan serangga yang hanya dapat ditemukan di hutan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

### 7.3.6 Situs Resmi Sidarjo

Sidarjo

DELTA  
 Pusat Pelayanan Masyarakat  
 KORINFO  
 KPU  
 Indog

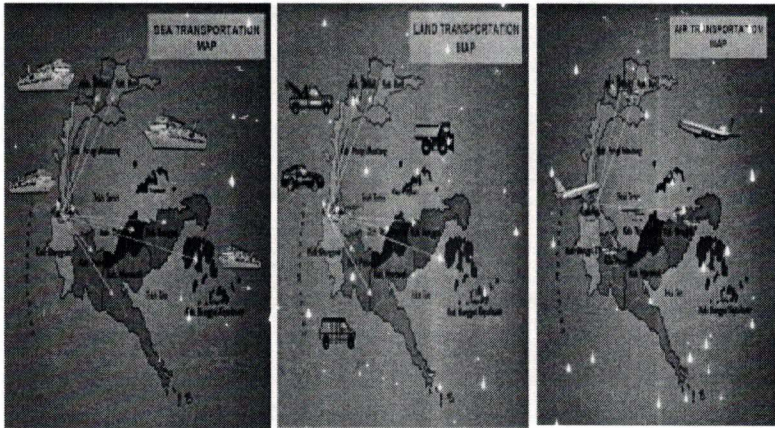
POTENSI DAN PELUANG INVESTASI

## 7.3.7 Potensi Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah



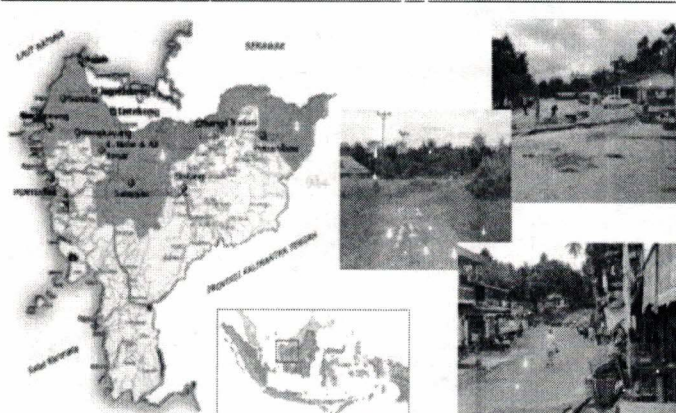


## PETA SPESIFIKASI POTENSI TRANSPORTASI DI SULAWESI TENGAH



### 7.3.8 Kawasan Berpotensi di Indonesia

#### KAWASAN PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA



1. Gambar wilayah perbatasan darat antara Sarawak-Malaysia dengan Kalimantan Barat. Indonesia yang diambangkan melalui KAPET Khatulistiwa; 2. Kota Sili yang terletak di Negeri Bagian Sarawak Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kab. Bangkayang di Kubur; 3. Kendali jalan menuju perbatasan Bangkayang (RI) - Sili (Malaysia); 4. Salah satu desa di Kab. Bangkayang di jalan menuju wilayah perbatasan. (Sumber: Dokumentasi DZ, PKKT Bappenas-2002)



# Bab VIII

## Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

### 8.1 Latar Belakang

Salah satu penguangkit berkembangnya konsepsi akuntabilitas di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah tekanan dunia internasional yang menuntut agar penerapan penyelenggaraan pemerintahan pada negara-negara dunia dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sinilah kemudian “akuntabilitas” menjadi konsep penting yang disepakati secara internasional untuk diterapkan pada seluruh negara dunia. Tekanan dunia internasional begitu terasa ketika Indonesia harus menyepakati permintaan negara-negara donor dalam agenda pemulihan ekonomi Indonesia yang ambruk sejak krisis multidimensi sejak pertengahan tahun 1997. Ketika itu, misi *good governance* diusung negara-negara donor dalam proses perkonsultasian penanganan krisis.

Penguangkit lain yang juga berpengaruh dalam pengembangan konsepsi akuntabilitas di Indonesia adalah dorongan sangat kuat yang berasal dari dalam negeri. Hal demikian dipicu oleh krisis di berbagai bidang, sehingga masyarakat menuntut penerapan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi demikian tidak berlebihan, karena masyarakat meyakini bahwa terjadinya krisis multitemensi disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas dalam sistem manajemen pemerintahan di Indonesia.

Dari sinilah kemudian konsepsi akurabilitas dijawantahkan dalam peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di Indonesia.

Sejak saat itu pula, penyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran nuansa yang begitu penting. Salah satunya adalah bergesernya paradigma dari sentralisasi menuju desentralisasi. Desentralisasi, secara umum dibagi menjadi desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (atau teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Oleh karena itu, desentralisasi pada esensinya merupakan prinsip pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun ke fungsian. Menurut Rondinelli dan Nellis (1996), dalam konsep yang lebih luas, desentralisasi dibagi atas desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal dan desentralisasi politik. Desentralisasi administratif sebagai transfer tanggung jawab untuk merencanakan, memajemen, menaikkan dan mengalokasikan sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agennya (pemerintah daerah, badan semi otonom, perusahaan, otoritas regional atau fungsional, LSM, dan lain-lain). Desentralisasi fiskal adalah transfer kewenangan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan keuangan. Sedangkan desentralisasi politik mencakup transfer kekuasaan administratif, keuangan dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam pada itu, tuntutan terhadap penyelenggaraan *good governance* dirasakan semakin kuat seiring dengan perjalanan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998. Dalam hal tersebut keinginan menyelenggarakan *good governance*, tidak hanya muncul di kalangan pemerintah pusat, tetapi juga di kalangan pemerintah daerah. Konsep *good governance* di daerah dikenal dengan istilah *good local governance*. Makna *local governance* di sini tidak semata-mata menunjukkan peranan aktor lokal, *government* sebagai regulator, namun juga menunjukkan eksistensi pelaku di sektor swasta dan peran serta masyarakat.

Prioritas utama yang perlu dilakukan oleh daerah dewasa ini dalam menerapkan *good local governance* adalah (a) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah; (b) Akuntabilitas pemerintahan daerah; (c) Manajemen kinerja; (d) Paket regulasi yang menarik investasi; (e) Akses masyarakat terhadap kebijakan secara nyata; (f) Kemitraan daerah, yang melibatkan dunia usaha dengan pemerintah daerah selaku regulator; dan (g) Tersedianya pelayanan publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Tim Penulis PKKOD-LAN, 2008).

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004, bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas, di mana salah satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akan tetapi hingga dewasa ini, kinerja instansi pemerintah daerah masih jauh dari yang diharapkan. Peran Pemerintah Daerah seharusnya mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Tugas prinsip pelayanan publik yang seharusnya mampu bersinergi dan berinteraksi dengan *customer's oriented*, belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

Kesulitan dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah tentunya menjadi salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Ukuran keberhasilan instansi pemerintah pusat dan daerah, selama ini masih berorientasi pada terlaksananya program dan kegiatan bukan berorientasi kepada hasil. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah pusat dan daerah belum mengarah pada kualitas implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Daerah sudah saatnya mampu berkontribusi positif terutama dalam rangka pemenuhan hak-hak public dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah perlu menerapkan konsep manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Untuk dapat menerapkan

manajemen kinerja dalam suatu organisasi tentu saja diperlukan suatu indikator kinerja utama yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa indikator kinerja utama merupakan kunci dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja, karena indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.

Dalam konteks tersebut, instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai upaya pembenahan berkenaan dengan penetapan indikator kinerja utamanya. Hal demikian tentunya penting karena Indikator Kinerja Utama dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Studi ini bertujuan untuk menginisiasi penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung berdasarkan PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penyusunan indikator kinerja utama juga merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dimaksud.

## **8.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi**

### **8.2.1 Pemerintah**

Menurut PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi dengan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan di setiap instansi pemerintah, yang meliputi Kementerian Koordinator/ Kementerian Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara, dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintahan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Cakupan indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan tatanan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara, Departemen, LPND, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Selanjutnya berkaitan dengan pengambil keputusan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, maka ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Kementerian Koordinator/Departemen/Kementerian Negara/ Lembaga dan unit organisasi setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.
2. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Lain, dan unit organisasi setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.
3. Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.

Keberhasilan indikator kinerja secara makro pada suatu pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh satu SKPD, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan SKPD lain. Oleh karena itu, indikator kinerja utama pada level pemerintah daerah minimal harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*), dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Untuk tingkat unit kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangannya dengan indikator kinerja unit-unit kerja lainnya serta dengan tingkat instansi pemerintah. Dengan demikian, mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/

Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan.

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan data statistik pemerintah
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Dalam pemilihan dan penetapan kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah hendaknya melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama yang ditetapkan harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Pada PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama merupakan suatu ukuran yang sangat penting dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah. Di lingkungan instansi pemerintah, indikator kinerja utama dapat digunakan untuk beragam kepentingan, yaitu:

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan

Instansi pemerintah dalam melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja harus memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya.

Indikator kinerja utama sebagai patokan keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu disusun, di antaranya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kerja suatu instansi pemerintah. Penyusunan indikator kinerja utama instansi pemerintah, oleh karenanya membutuhkan kecermatan agar Indikator Kinerja Utama memenuhi criteria validitas dan reliabilitas sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penetapan Indikator Kinerja Utama, pada dasarnya melalui beberapa tahapan, mulai dari pengkajian beragam referensi maupun dokumen, penyusunan, hingga penetapan, dan pengesahan Indikator Kinerja Utama.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah diawali dengan pengkajian beragam dokumen yang relevan, antara lain:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dari hasil kajian tersebut kemudian disusun Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya, Kepala Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, Kepala Daerah melibatkan

pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah juga membutuhkan kecermatan agar Indikator Kinerja Utama memenuhi criteria validitas dan reliabilitas sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD pun melalui beberapa tahapan yang sama, yaitu mulai dari pengkajian beragam referensi maupun dokumen, hingga penyusunan, penetapan, dan pengesahan Indikator Kinerja Utama oleh Kepala Daerah. Pengkajian dokumen dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah pada prinsipnya

## 8.2.2 Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Pemerintah daerah, meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indicator outcome, indikator benefit dan indikator impact.

1. Indikator Masukan (Inputs), misalnya
  - a. Jumlah dana yang dibutuhkan
  - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
  - c. Jumlah infra struktur yang ada
  - d. Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator Proses (Process), misalnya
  - a. Ketaatan pada peraturan perundangat
  - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator Keluaran (Output), misalnya
  - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
  - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
4. Indikator Hasil (Outcome), misalnya

- a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
  - b. Produktifitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator Manfaat (benefit), misalnya
    - a. Tingkat kepuasan masyarakat
    - b. Tingkat partisipasi masyarakat
  6. Indikator Impact, misalnya
    - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
    - b. Peningkatan pendapatan masyarakat

Karakteristik Pemerintah daerah sebagai pure non profit organization menempatkan organisasi ini mempunyai keunikan yang sangat berbeda dengan perusahaan bisnis. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar di bidang ekonomi dan sosial secara bersama. Pengukuran kinerja Pemerintah daerah harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup :

1. Kondisi Ekonomi Nasional:
  - a. Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto
  - b. Produk domestik bruto riil per kapita
  - c. Tingkat tabungan
  - d. Defisit/surplus keuangan daerah
  - e. Utang dalam dan luar negeri
  - f. Cadangan emas dan devisa
2. Lingkungan Bisnis:
  - a. Indeks kebebasan ekonomi
  - b. Perlindungan hak milik
  - c. Indeks persepsi korupsi
  - d. Kebebasan bank
3. Stabilitas dan Pengembangan
  - a. Sebaran pendapatan
  - b. Paritas upah tenaga kerja pria/wanita
  - c. Tingkat pengangguran
  - d. Partisipasi politik
  - e. Jumlah pengungsi
  - f. Kepastian hukum

- g. Jumlah kendaraan pribadi dan umum
- h. Kondisi keamanan daerah
- 4. Kesehatan
  - a. Tingkat kelahiran
  - b. Harapan hidup
  - c. Tingkat kematian
  - d. Program pemeliharaan kesehatan
  - e. Pengeluaran untuk kesehatan
  - f. Perbandingan penduduk dengan dokter/tenaga medis
  - g. Kecukupan gizi penduduk
- 5. Pendidikan
  - a. Tingkat partisipasi pendidikan
  - b. Anggaran pendidikan
  - c. Kualitas tenaga pengajar
  - d. Kecukupan sarana dan prasarana pendidikan
  - e. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat
  - f. Pemerataan pendidikan

### **8.3 Tingkatan Organisasi Bappeda Kota Bandung Yang Ditetapkan Indikator**

#### **8.3.1 Kinerja Utamanya**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilakukan di setiap instansi pemerintah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Bandung. Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi level Eselon II dan Eselon III. Penyusunan Indikator Kinerja Utama di dua level Eselon tersebut dipandang sudah cukup representative. Hal ini didasarkan pada prinsip pembagian “habis tugas”, dimana fungsi-fungsi Eselon II, dilaksanakan melalui tugas-tugas Eselon III. Begitu juga fungsi-fungsi Eselon III dilaksanakan melalui tugas-tugas Eselon IV. Dengan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di dua Eselon

tersebut, maka ukuran pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah cukup jelas.



Gambar 36

### Mekanisme Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan BAPPEDA Kota Bandung

Akan tetapi, kerap kali dokumen maupun referensi yang tersedia kurang layak untuk menjadi rujukan karena kekurangoptimalan dalam penyusunannya, dan/atau bahkan dokumen maupun referensi dimaksud tidak tersedia. Kondisi demikian seringkali ditemui dan relative menjadi kendala dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah.

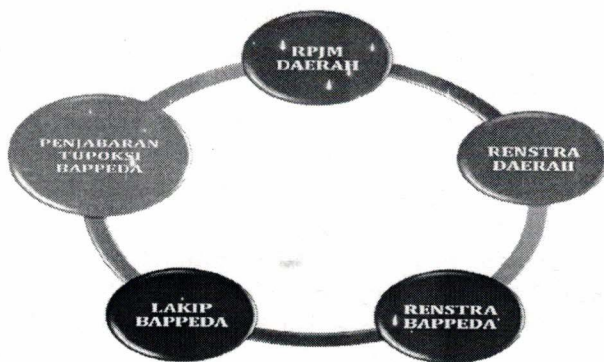
Pada dasarnya setiap instansi pemerintah diberikan kebebasan dalam menentukan apa dan bagaimana Indikator Kinerja Utama yang disusun. Yang perlu menjadi perhatian yaitu tetap merujuk pada pokok-pokok dalam Peraturan Menteri PAN No.PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai pedoman penyusunannya. Kebebasan dan otonomi yang diberikan tersebut sekiranya diambil untuk mengakomodasi keragaman kewenangan masing-masing instansi pemerintah dan perbedaan struktur serta tugas pokok dan fungsi di jajaran instansinya.

Tugas pokok Kepala Bappeda merupakan derivasi dari sebagian fungsi Walikota. Adapun tugas pokok Sekretariat dan Kepala-Kepala Bidang di Bappeda merupakan turunan dari fungsi-fungsi yang

diselenggarakan oleh Kepala Bappeda. Selanjutnya tugas-tugas Subbagian merupakan turunan dari fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretaris, dan tugas-tugas Sub-Subbidang merupakan turunan dari fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Kepala-Kepala Bidang.

### 8.3.2 Aspek-Aspek Terkait Dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Bappeda Kota Bandung

Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung merupakan sebuah langkah inisiasi Pemerintah Kota Bandung. Dari hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan rujukan (*reference*) bagi SKPD yang lain dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama. Oleh karena itu dalam penyusunannya memerlukan kehati-hatian dan kecermatan sehingga Indikator Kinerja Utama yang disusun dapat mencerminkan kinerja yang secara konkret harus dicapai, sekaligus mampu memotivasi seluruh SDM aparatur yang berada di dalamnya seluruh SDM aparatur yang berada di dalamnya.



Gambar 37

Dokumen-Dokumen Pertimbangan dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan BAPPEDA Kota Bandung

Beberapa dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, di antaranya yaitu: RPJM Kota

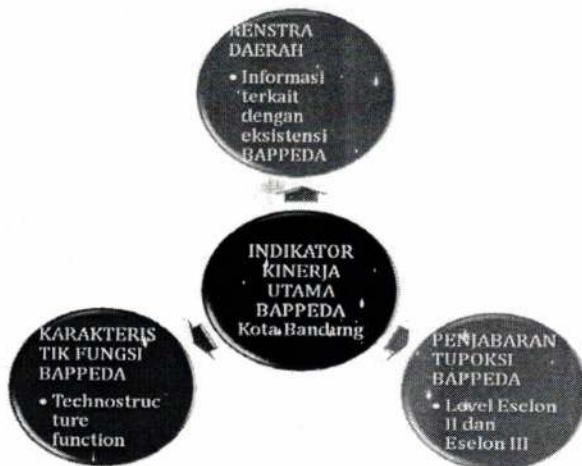
Bandung, Renstra Kota Bandung, Renstra Bappeda Kota Bandung, dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bandung, serta LAKIP Bappeda Kota Bandung (lihat Gambar 2). Semakin lengkap data dan informasi yang dijadikan bahan pertimbangan, tentunya diharapkan pula semakin komprehensif dan lengkap Indikator Kinerja Utama yang dapat disusun.

Meskipun tidak semua dokumen-dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda dapat diakses, bukan berarti bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama dimaksud dipandang tidak valid dan reliable. Dalam kajian ini, dokumen yang dapat diakses adalah Renstra Kota Bandung 2004-2008 dan Peraturan Walikota Bandung No. 256 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Salah satu dokumen penting yang harus dirujuk dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda adalah Peraturan Walikota yang memuat Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bandung. Selain penting untuk pertimbangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama, dokumen yang memuat Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bandung juga merupakan referensi penting dalam penyusunan Renstra dan Renja Bappeda Kota Bandung. Adapun Renstra dan Renja Bappeda merupakan rujukan dalam penyusunan LAKIP Bappeda.

Selain berbagai dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda, hal lain yang mutlak untuk dikuasai adalah pemahaman terhadap konsepsi keragaman fungsi organisasi perangkat daerah. Pemahaman terhadap konsepsi tersebut sangatlah penting untuk dapat mengarahkan pada penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda secara tepat berdasarkan karakter fungsi Bappeda sebagai *technostructure*. Hal demikian sangat dipahami, karena pada dasarnya organisasi perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah memiliki karakter fungsi masing-masing. Kesalahan dalam memahami karakter fungsi masing-masing,

maka akan berakibat munculnya Indikator Kinerja Utama yang kurang tepat dan bahkan salah. Secara sederhana kerangka kerja penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 38

Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan BAPPEDA Kota Bandung (berdasarkan rujukan yang tersedia)

## 1. RENCANA STRATEGIS DAERAH

Visi sebagai suatu cara pandang jauh ke depan mengenai ke mana suatu organisasi mau dibawa, merupakan satu hal yang sangat penting dalam penyusunan rencana strategik. Mencermati seluruh pernyataan Misi, Arah Kebijakan Pembangunan, dan Strategi Pembangunan Kota Bandung di atas, maka dapat dipahami bahwa eksistensi Bappeda sebagai unsur perencana daerah memegang peranan sangat penting. Bappeda dituntut untuk mampu memandu perencanaan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung agar mengarah kepada pencapaian misi yang dicanangkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung merupakan *leading agent* seluruh perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Bandung. Tanpa gagasan dan kinerja yang kreatif dan inovatif, Bappeda dapat dipastikan tidak mampu memberikan kontribusi yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai *technostructure* di bidang perencanaan (Faozan, 2008).

Adalah sangat perlu, penting, dan mendesak (*urgent*) bagi Bappeda untuk menyusun petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja secara komprehensif tetapi *simple* bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah (Faozan, 2008), dalam hal ini Kota Bandung. Menyusun petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah adalah kewajiban utama bagi Bappeda selaku organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai *technostructure* di bidang perencanaan (Faozan, 2008).

Tanpa adanya petunjuk teknis perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Bandung, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Bappeda dapat dipastikan jauh dari optimal. Dengan adanya petunjuk teknis perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka sesungguhnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat (*instrument*) pengendalian yang sangat strategis.

## 2. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA

Dengan menyimak tugas pokok dan fungsi Eselon II dan Eselon III di atas, tampaknya cukup jelas substansi indikator kinerja utama yang perlu disusun. Sekretariat sebagai *supporting staff* tentu orientasi kerjanya adalah memberikan dukungan internal kepada Kepala dan Bidang-Bidang di lingkungan Bappeda agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara optimal. Adapun 3 (tiga) Bidang Perencanaan, yaitu Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang, Bidang

Perencanaan Ekonomi, dan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan orientasi kinerjanya mengarah pada fasilitasi perencanaan kepada seluruh SKPD, dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sesuai lingkup Bidang masing-masing.

Sedangkan 2 (dua) Bidang lainnya, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Statistik dan Pelaporan merupakan Bidang-Bidang urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang serumpun dengan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Kedua Bidang tersebut diharapkan mampu memperkuat eksistensi Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan adanya 2 (dua) Bidang tersebut, diharapkan seluruh SKPD akan semakin mampu meningkatkan kinerjanya karena mendapat dukungan, baik sosialisasi, advokasi maupun fasilitasi penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan data statistik dan hasil analisis statistik.

### **8.3.3 Tingkatan Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dapat dirinci sebagai berikut:

1. Jumlah kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik dan dapat diimplementasikan.
2. Jumlah pedoman/panduan/petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik dan menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Jumlah pedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun berbagai rencana.
4. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Strategik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu.
5. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.

6. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bappeda yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
7. Jumlah pemberitaan tentang Bappeda di media lokal.

#### **8.4 Tingkatan Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

I

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit-unit organisasi di lingkungan Bappeda dirinci ke dalam 6 (enam) unit organisasi, yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Perencanaan Fisik Dan Tata Ruang
3. Bidang Perencanaan Ekonomi
4. Bidang Sosial Budaya Dan Sumber Daya Pemerintahan
5. Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Dan
6. Bidang Statistik Dan Pelaporan

##### **8.4.1 Sekretariat**

1. Nama Unit Organisasi: SEKRETARIAT
2. Tugas: melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan daerah lingkup kesekretariatan.
3. Fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
  - e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.
4. Indikator Kinerja Utama:

- a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bappeda yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
- b. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Kesekretariatan yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
- c. Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Bappeda yang disusun secara baik dan tepat waktu.
- d. Rasio jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis dengan peningkatan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- e. Jumlah rapat-rapat koordinasi internal Bappeda dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Bidang-Bidang.
- f. Jumlah rapat-rapat koordinasi internal Bappeda dalam rangka penyusunan
- g. rencana kinerja, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Bappeda.

#### **8.4.2 Bidang Perencanaan Fisik Dan Tata Ruang**

1. Nama Unit Organisasi: **BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN TATA RUANG**
2. Tugas: melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan fisik dan tata ruang.
3. Fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan

perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota; dan

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota.

5. Indikator Kinerja Utama

- a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bidang Perencanaan Fisik Dan Tata Ruang yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
- b. Jumlah konsep (*draft*) kebijakan teknis dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.
- c. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.
- d. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota dalam menyusun berbagai rencana.
- e. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota, yang mampu menyusun Rencana Strategik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu.
- f. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota, yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
- g. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota, dalam rangka penyusunan berbagai perencanaan.

- h. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota, dalam rangka pelaksanaan perencanaan di lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota.

### 8.4.3 Bidang Perencanaan Ekonomi

1. Nama Unit Organisasi: BIDANG PERENCANAAN EKONOMI
2. Tugas: melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi.
3. Fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.
4. Indikator Kinerja Utama
  - a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bidang Perencanaan Ekonomi yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
  - b. Jumlah konsep (*draft*) kebijakan teknis dalam lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.
  - c. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis dalam lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.

- d. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah dalam menyusun berbagai rencana.
- e. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah, yang mampu menyusun Rencana Strategik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu.
- f. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah, yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
- g. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah, dalam rangka penyusunan berbagai
- h. perencanaan. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah, dalam rangka pelaksanaan perencanaan di lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah.

#### **8.4.4 Bidang Sosial Budaya Dan Sumber Daya Pemerintahan**

1. Nama Unit Organisasi: BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA PEMERINTAHAN
2. Tugas: melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup sosial budaya dan sumber daya pemerintahan.
3. Fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya;

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya.
4. Indikator Kinerja Utama
- a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bidang Sosial Budaya Dan Sumber Daya Pemerintahan yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
  - b. Jumlah konsep (*draft*) kebijakan teknis dalam lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.
  - c. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis dalam lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.
  - d. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya dalam menyusun berbagai rencana.
  - e. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya, yang mampu menyusun Rencana Strategik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu.
  - f. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya, yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
  - g. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

ah (SKPD) dalam lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya, dalam rangka penyusunan berbagai perencanaan.

- h. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya, dalam rangka pelaksanaan perencanaan di lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah.

#### **8.4.5 Bidang Penelitian Dan Pengembangan**

1. Nama Unit Organisasi: **BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
2. Tugas: melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian dan pengembangan.
3. Fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitian dan pengembangan pembangunan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya;
  - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya; dan
  - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.
4. Indikator Kinerja Utama
  - a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bidang Penelitian Dan Pengembangan yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
  - b. Jumlah konsep (*draft*) kebijakan teknis mengenai penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan

- sosial budaya, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.
- c. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis mengenai penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.
  - d. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun berbagai rencana mengenai penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.
  - e. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Strategik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu, yang berkaitan dengan substansi materi dan metodologi penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.
  - f. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu, yang berkaitan dengan substansi materi dan metodologi penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.
  - g. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka penyusunan berbagai perencanaan yang berkaitan dengan substansi materi dan metodologi penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.
  - h. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pelaksanaan perencanaan yang berkaitan dengan substansi materi dan metodologi penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.

## 8.4.6 Bidang Statistik Dan Pelaporan

1. Nama Unit Organisasi: BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN
2. Tugas: melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup statistik dan pelaporan.
3. Fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup statistik dan pelaporan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup statistik dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan dan koordinasi lingkup statistik dan pelaporan; dan
  - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik dan pelaporan.
4. Indikator Kinerja Utama
  - a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bidang Statistik Dan Pelaporan yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu.
  - b. Jumlah konsep (*draft*) kebijakan teknis dalam lingkup statistik dan pelaporan, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.
  - c. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis dalam lingkup statistik dan pelaporan, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik.
  - d. Jumlah konsep (*draft*) pedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan statistik dan pelaporan.
  - e. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Strategik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu, yang berkaitan dengan substansi materi statistik.
  - f. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu, yang berkaitan dengan

- substansi materi statistik dan tata cara pelaporannya.
- g. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka penyusunan berbagai perencanaan yang berkaitan dengan substansi materi statistik dan tata cara pelaporannya.
  - h. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pelaksanaan perencanaan yang berkaitan dengan substansi materi statistik dan tata cara pelaporannya.

## 8.5 Penutup

Mencermati perlu dan pentingnya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka sudah saatnya seluruh jajaran instansi pemerintah --Pusat dan Daerah-- menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansinya. Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda Kota Bandung pada prinsipnya perlu mempertimbangkan berbagai dokumen relevan agar Indikator Kinerja Utama yang disusun dapat lebih lengkap dan komprehensif, serta merepresentasikan kinerja konkret yang harus dicapai oleh Bappeda.

Selain berbagai dokumen yang perlu dipertimbangkan, dalam menyusun Indikator Kinerja Utama Bappeda maupun SKPD yang lain, mutlak untuk memahami konsepsi dan teori organisasi perangkat daerah. Hal ini dikarenakan organisasi perangkat daerah terdiri dari beragam SKPD yang memiliki karakter fungsi masing-masing, di mana substansi dan orientasi Indikator Kinerja Utamanya harus merujuk pada karakter fungsi tersebut.

# Bab IX

## Penetapan Indikator Kinerja Daerah

### 9.1 Latar Belakang

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2008-2013 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2013. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada :

1. Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan RPJMN 2010 – 2014; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka

- harapan hidup dan angka pendapatan per kapita;
2. Tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs);
  3. Penyelarasan IPM berdasarkan capaian kurun waktu tahun 2004 s.d. 2009, untuk proyeksi 2010 – 2025.

## 9.2 Pencapaian IPM

Setelah melalui penelaahan capaian IPM tahun 2004 – 2009 dan menggali kembali asal mula proyeksi indikator makro pembangunan Jawa Barat tahun 2001 – 2010 (dokumen akademis IPM tahun 2001 – 2010, Bappeda tahun 2000), serta dengan mengacu kepada besaran angka indikator turunan IPM pada RPJMN 2010-2014, yaitu Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,70 tahun, Angka Harapan Hidup sebesar 71,41 tahun, Angka Kematian Bayi sebesar 24 perseribu kelahiran dan Pendapatan perkapita sebesar Rp. 8.650.000, dengan asumsi pencapaian pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pendapatan per kapita yang dalam implementasinya sangat tergantung kepada kebijakan nasional, baik menyangkut kebijakan fiskal maupun moneter serta investasi, maka penetapan angka indikator turunan IPM harus mengakomodasikan target RPJMN.

Meskipun demikian, mengingat kemampuan realisasi pencapaian target indikator turunan IPM yang sangat dipengaruhi kemampuan fiskal daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan program pembangunan yang berorientasi IPM, dengan demikian indikator turunan IPM ditetapkan dengan kisaran skala antara target RPJMN dan target berdasarkan rekomendasi BPS yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut di atas.

Adapun penetapan indikator turunan IPM untuk target tahun 2013 yaitu Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,55-9,00 tahun, Angka Harapan Hidup sebesar 70 tahun, Angka Kematian Bayi sebesar 26-30 perseribu kelahiran dan Pendapatan per kapita sebesar Rp. 7.106.000 – Rp. 7.500.000. Demikian juga untuk penetapan target angka IPM tahun 2013 disajikan dalam skala sebesar 74,85 – 75,03. Target ini merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

Berikut gambaran target IPM dan turunannya pada tabel 14 dan tabel 15

Tabel 14 Perubahan Target IPM Beserta Turunannya Tahun 2011

IPM PADA TENGAH RPJMD TAHUN 2008 - 2013	PENCAPAIAN TAHUN 2009	TARGET TAHUN 2011	
		SEMULA	MENJADI
<b>IPM</b>	<b>71,64</b>	74,68	<b>73,24 – 73,39</b>
<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>81,14</b>	84,98	<b>82,92 – 83,29</b>
a. Rata – rata Lama Sekolah (tahun)	7,72	9 – 9,5	8,23 - 8,40
b. Angka Melek Huruf (%)	95,98	95 – 96	96,93 – 96,94
<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>71,67</b>	74,85	<b>73,33 - 73,40</b>
- Angka Harapan Hidup (tahun)	68,00	69,91	69,00 – 69,04
<b>Indeks Daya Beli</b>	<b>62,10</b>	64,22	<b>63,47 – 63,48</b>
- Daya Beli Masyarakat (Rp.)	628.710	625.000 - 630.000	634.930

Tabel 15 Perubahan target IPM beserta turunannya tahun 2013

IPM PADA AKHIR RPJMD TAHUN 2008 – 2013	TARGET TAHUN 2013	
	SEMULA	MENJADI
<b>IPM</b>	<b>77,20</b>	<b>74,85 – 75,03</b>
<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>88,28</b>	<b>84,70 - 85,26</b>
a. Rata – rata Lama Sekolah (tahun)	10,53	8,75 - 9,00
b. Angka Melek Huruf (%)	97,33	97,89
<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>77,21</b>	<b>75,00</b>

- Angka Harapan Hidup (tahun)	71,32	70,00
<b>Indeks Daya Beli</b>	<b>66,10</b>	<b>64,83</b>
- Daya Beli Masyarakat (Rp.)	630.000 – 640.000	640.550

Selanjutnya berikut ini (Tabel 9.3.) adalah gambaran target indikator kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat mengacu kepada RPJMN 2010 – 2014: indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, dan angka pendapatan per kapita;

Tabel 16 Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan RPJMN Tahun 2010 - 2014

NO.	INDI-KATOR	REA-LISASI 2009	RPJMN 2010-2014 (TARGET 2014)	RPJMD 2008-2013 (TARGET 2013)	
				SEMULA	MENJADI
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,29	6,2 – 6,8	6 – 6,5	6 – 6,5
2.	Kemiskinan (%)	11,58	4,15 – 4,12	-	5,59 – 9,07
3.	Pengangguran (%)	11,85	8,8 – 9,8	-	10,00
4.	Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)	39	24	33 -34	26 -30
5.	Angka Harapan Hidup (tahun)	68,00	71,41	71,32	70,00
6.	Angka Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu)	7.090	8.650	-	7.106 – 7.500

Catatan : angka target kemiskinan Nasional berdasarkan MDGs tahun 2015 sebesar 7,50

Tabel 17 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2007	Target Midterm 2011	Target 2013
<b>MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing</b>				
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,5	<u>8,23 - 8,40</u>	<u>8,49 - 8,74</u>
2	Angka Melek Huruf	95,32%	<u>96,93 - 96,94%</u>	<u>97,89 %</u>
3	Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH)	40,26/1.000 KH	<u>35 - 36/1.000 KH</u>	<u>26 - 30/1.000 KH</u>
4	Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH)	321/100.000 KH	215 - 220/ 100.000 KH	205 - 210/ 100.000 KH
5	Indeks Pembangunan Gender	60,8 (2006)	63-64	65-66
6	Indeks Pemberdayaan Gender	54,4 (2006)	61-63	64-65
<b>MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal</b>				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,41% per tahun	5 - 6% per tahun	6 - 6,5% per tahun
2	Daya Beli Masyarakat	Rp. 623.526,-	<u>Rp.634.930,-</u>	<u>Rp.640.550,-</u>
3	Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/ PMTB) atas dasar harga berlaku	16,5%	10 - 12%	12 - 14%
4	Indeks Gini	0,21	0,19 - 0,20	0,18 - 0,19

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2007	Target <i>Midterm</i> 2011	Target 2013
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	54,73%	55-56%	56-57%
<b>MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah</b>				
1	Tingkat Kemantapan Jalan	87,31%	91-92%	93-94%
2	Intensitas Tanam Padi	190%	194-198%	Lebih dari 200%
3	Rasio elektrifikasi perdesaan	99,59%	100%	100%
4	Rasio elektrifikasi rumah tangga	60,41%	67-69%	71-7
5	Cakupan pelayanan persampahan (perkotaan)	53%	57-62%	65-70%
6	Cakupan pelayanan air bersih (perkotaan)	45%	50-55%	60-65%
7	Cakupan pelayanan air limbah (domestik perkotaan)	51%	56-61%	67-72%
<b>MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan</b>				
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,84%	1,7-1,8%	1,6 - 1,8%
2	Tingkat status mutu sungai utama dan waduk besar	status mutu cemar berat	status mutu cemar sedang	status mutu cemar ringan
3	Jumlah hari dengan kualitas udara perkotaan katagori baik	20 hari baik/tahun	27-30 hari baik/tahun	32-35 hari baik/tahun

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2007	Target Midterm 2011	Target 2013
4	Capaian luas kawasan lindung terhadap luas Jawa Barat	27%	30-31%	34-35%
5	Jumlah penerapan energi alternatif	N/A	Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (biokerosin) serta bio gas	Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (biokerosin) serta bio gas

**MISI KELIMA : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi**

1	Skala kepuasan masyarakat (skala 1-4)	N/A	2	3
2	Skala Komunikasi Organisasi (skala 1-7)	N/A	4	5
3	Jumlah angka kriminalitas	N/A	Menurunnya angka kriminalitas	Menurunnya angka kriminalitas
4	Jumlah kasus korupsi	N/A	Menurunnya jumlah kasus korupsi	Menurunnya jumlah kasus korupsi
5	Tingkat partisipasi pemilih	67-70 %	75-78 %	Meningkatnya partisipasi pemilih Pilkada 2013 lebih besar dari 78 %

### 9.3. Penetapan Indikator Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Berikut ini (Tabel 9.5.) adalah tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat :

Tabel 18  
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
 Provinsi Jawa Barat

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
a	Pertumbuhan PDRB/ LPE	5,83	4,29	5,0 – 6,0	5,0 – 6,0	6,0 – 6,5	6,0 – 6,5	6,0 – 6,5
b	Indeks Gini	0,282	0,244	0,19 – 0,20	0,19 – 0,20	0,18 – 0,19	0,18 – 0,19	0,18 – 0,19
c	PDRB per kapita	6.890	7.090	7.106	7.106 – 7.500	7.106 – 7.500	7.106 – 7.500	7.106 – 7.500
2.	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>							
2.1.	<b>Pendidikan</b>							
a	Angka Melek Huruf	95,53	95,98	96,46	96,93 – 96,94	97,41 – 97,42	97,89	97,89
b	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,50	7,72	7,98 – 8,06	8,23 – 8,40	8,49 – 8,74	8,75 – 9,00	8,75 – 9,00
c	<b>Angka Partisipasi Murni</b>							
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,19	95,58	95,57	95,98	96,40	96,81	96,81
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	67,43	71,35	70,3	70,902	71,504	72,106	72,106

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
d	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	38.06	46.37	46.905	49.74	52.575	55.41	55.41
	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>							
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	105.97	117.18	116.345	119.114	121.883	124.652	124.652
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	30.6	93.11	100.845	107.77	114.695	121.62	121.62
2.2. e f g	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C	46.35	57.5	55.135	57.03	58.925	60.82	60.82
	<b>Kesehatan</b>							
	Angka Harapan Hidup	67.80	68.00	68.50 – 36,03 –	69,00 – 35,00 –	69,50 – 30,00 –	70,00	70,00
	AKB (/1.000 KH)	38,51	39,00	37,00	36,00	35,00	30,00	30,00
	AKI (/100.000 KH)	N/A	N/A	215 - 220	215 - 220	205 - 210	205 - 210	205 - 210

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian: Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B  I	ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib  Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah	94.92	95.66	95.58	95.50	95.41	95.33	95.33
	Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah	39.08	43.78	43.80	43.82	43.84	43.86	43.86
	Pekerjaan Umum Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (Tingkat Kemantapan Jalan)	88.16	89.50	91,00 - 92,00	91,00 - 92,00	93,00 - 94,00	93,00 - 94,00	93,00 - 94,00
	Intensitas Tanam Padi	N/A	N/A	194 - 198	194 - 198	194 - 198	> 200	> 200
	Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja	61.89	63.56	65.50	65.17	64.92	64.70	64.70

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
a	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
a	Pertumbuhan ekonomi	5,83	4,29	5,0 – 6,0	5,0 – 6,0	6,0 – 6,5	6,0 – 6,5	6,0 – 6,5
B	Kemiskinan Skala Kepuasan	12.74	11.96	11.17	10.31	9.45	5,39 - 9.07	5,39 - 9.07
c	Layanan Masyarakat (skala 1-4)	N/A	N/A	2	2	3	3	3
2	<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian</b>							
a	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12.58	13.25	12.80	12.73	12.68	12.63	12,63

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Sctiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
b	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68
c	<b>Kehutanan</b> Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13
d	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b> Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	2.36	2.45	2.32	2.28	2.25	2.22	2.22
e	<b>Pariwisata</b> Kontribusi sektor pariwisata (hotel dan restoran) terhadap PDRB	2.61	2.56	2.54	2.52	2.50	2.49	2.49
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
f	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58
	<b>Perdagangan</b>							
g	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	17.01	17.18	17.20	17.22	17.24	17.25	17.25
	<b>Perindustrian</b>							
h	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	46.10	43.74	44.60	44.54	44.49	44.43	44.43
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
a	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Daya beli masyarakat/ PPP (Rp.000)	626.81	628.71	632.11	634.93	637.74	640.55	640.55
b	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.)	239,692	226,101	244,109	262,117	280,125	298,133	298,133
c	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita per bulan (Rp.)	233,376	220,287	242,278	264,269	286,260	308,251	308,251

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
d	Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/ PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku	23,35	10,55	10,00 – 12,00	10,00 – 12,00	12,00 – 14,00	12,00 – 14,00	12,00 – 14,00
2	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Lingkungan Hidup</b>							
a	Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)	53,00	54,00	54,00 – 57,00	57,00 – 62,00	62,00 – 65,00	65,00 – 70,00	65,00 – 70,00
b	Cakupan Pelayanan Air Bersih (Perkotaan)	42,00	48,00	50,00 – 55,00	50,00 – 55,00	60,00 – 65,00	60,00 – 65,00	60,00 – 65,00
c	Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan)	53,00	55,00	55,00 – 56,00	56,00 – 61,00	61,00 – 67,00	67,00 – 72,00	67,00 – 72,00
d	Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besi	Status Mutu Cemar Berat	Status Mutu Cemar Berat	Status Mutu Cemar Sedang	Status Mutu Cemar Sedang	Status Mutu Cemar Sedang	Status Mutu Cemar Ringan	Status Mutu Cemar Ringan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
e	Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik	N/A	N/A	27 – 30 hari baik/tahun	27 – 30 hari baik/tahun	27 – 30 hari baik/ tahun	32 – 35 hari baik/ tahun	32 – 35 hari baik/ tahun
f	Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Jawa Barat	28,00	29,00	29,00 – 30,00	30,00 – 31,00	31,00 – 34,00	34,00 – 35,00	34,00 – 35,00
g	Jumlah Penerapan Energi Alternatif	N/A	Mening- katnya di- versifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (bio kero- sin) serta biogas	Mening- katnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (bio-kero- sin) serta biogas	Mening- katnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (bio kerosin) serta biogas	Mening- katnya di- versifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (bio kero- sin) serta biogas	Mening- katnya di- versifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (bio kero- sin) serta biogas	Mening- katnya diversi- fikasi en- ergi dari mikro hidro, bio- fuel (bio kerosin) serta biogas
h	Rasio elektrifikasi Perdesaan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i	Rasio elektrifikasi rumah tangga	64.24	66.91	67,00 - 69,00	67,00 - 69,00	71,00 - 73,00	71,00 - 73,00	71,00 - 73,00
3	<b>Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
a	Angka kriminalitas	N/A	Menurun- nya Angka Kriminali- tas	Menurun- nya Angka Kriminalitas	Menurun- nya Angka Kriminali- tas	Menu- runnya Angka Krim.- nalitas	Menurun- nya Angka Krimi- nalitas	Menu- runnya Angka Krimi- nalitas
b	Jumlah Kasus Korupsi	N/A	Menurun- nya Jumlah Kasus Korupsi	Menurun- nya Jumlah Kasus Ko- rupsi	Menurun- nya Jumlah Kasus Ko- rupsi	Menurun- nya Jum- lah Kasus Korupsi	Menurun- nya Jumlah Kasus Korupsi	Menu- runnya Jumlah Kasus Korupsi

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
c	Tingkat Partisipasi Pemilih	67,00 – 70,00	70,00 – 73,00	73,00 – 75,00	75,00 – 78,00	75,00 – 78,00	Mening- katnya partisi- pasi pemilih Pilkada 2013 > 78%	Mening- katnya partisi- pasi pemilih Pilkada 2013 > 78%
4	<b>Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan</b>							
a	Rasio ketergantungan	54,19	52,55	46,51	46,52	46,60	46,75	46,75
b	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,2	1,7-1,8	1,7-1,8	1,7-1,8	1,7-1,8	1,6-1,8	1,6-1,8
c	Tingkat Pengangguran Terbuka	12,08	11,85	10,71	10,47	10,24	10,00	10,00
d	Indeks Pembangunan Gender	61,81	62,50	63,00 – 64,00	64,00 – 65,00	65,00 – 66,00	65,00 – 66,00	65,00 – 66,00

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBA-NGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
c	Indeks Pemberdayaan Gender	55,51	57,00	58,00 – 60,00	61,00 – 63,00	63,00 – 64,00	64,00 – 65,00	64,00 – 65,00

## 9.4 Penetapan Target Kinerja Pembangunan

Dalam penetapan target kinerja pembangunan Jawa Barat untuk pembagian urusan dan kewenangan pembangunan dalam kerangka sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka target kinerja pembangunan akan terdistribusi di kabupaten/kota sebagaimana mestinya. Adapun indikator kinerja pembangunan kabupaten/kota adalah meliputi :

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Indeks Pendidikan;
3. Rata – rata Lama Sekolah;
4. Angka Melek Huruf;
5. Indeks Kesehatan;
6. Angka Harapan Hidup;
7. Indeks Daya Beli;
8. Daya Beli Masyarakat;
9. Pertumbuhan Ekonomi;
10. Kemiskinan;
11. Tingkat Pengangguran Terbuka;
12. Angka Kematian Bayi;
13. Laju Pertumbuhan Penduduk;
14. Angka PDRB Perkapita; dan
15. Kawasan Lindung

Selanjutnya target masing – masing indikator kinerja pembangunan kabupaten/kota disajikan pada tabel – tabel berikut ini :

## 1. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 19  
Realisasi dan Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Per Kabupaten Dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Bandung	73,41	74,63	75,45
2	Kab. Bekasi	72,10	73,74	74,90
3	Kab. Sumedang	71,68	73,32	74,40
4	Kab. Bandung Barat	72,65	73,44	73,95
5	Kab. Bogor	70,66	72,34	73,43
6	Kab. Purwakarta	70,31	72,13	73,38
7	Kab. Garut	70,53	72,00	73,00
8	Kab. Tasikmalaya	71,35	72,35	72,94
9	Kab. Ciamis	70,57	71,87	72,71
10	Kab. Karawang	69,06	71,34	72,65
11	Kab. Subang	70,43	71,60	72,27
12	Kab. Kuningan	70,11	71,36	72,21
13	Kab. Sukabumi	69,48	71,20	72,16
14	Kab. Majalengka	69,40	70,99	72,02
15	Kab. Cirebon	67,71	69,82	71,18
16	Kab. Cianjur	68,16	69,69	70,73
17	Kab. Indramayu	66,78	68,65	69,96

	<b>KOTA</b>			
18	Kota Depok	78,36	79,47	80,15
19	Kota Bekasi	75,73	76,98	77,84
20	Kota Cimahi	74,79	76,47	77,63
21	Kota Bandung	75,35	76,42	77,18
22	Kota Sukabumi	74,17	75,68	76,72
23	Kota Bogor	75,16	76,08	76,72
24	Kota Tasikmalaya	73,35	75,01	76,05
25	Kota Cirebon	74,26	75,22	75,83
26	Kota Banjar	70,62	71,86	72,76

## 2. Indeks Pendidikan

Tabel 20  
Realisasi dan Target Indeks Pendidikan  
per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Bandung	83,95	84,68	85,08
2	Kab. Sumedang	82,01	83,67	84,69
3	Kab. Bandung Barat	83,11	83,26	83,33
4	Kab. Garut	81,70	82,29	82,56
5	Kab. Bekasi	80,45	81,30	81,84
6	Kab. Tasikmalaya	80,98	81,56	81,83

7	Kab. Karawang	76,88	80,25	81,66
8	Kab. Purwakarta	79,28	80,75	81,63
9	Kab. Ciamis	79,79	80,62	81,00
10	Kab. Bogor	78,39	79,98	80,72
11	Kab. Cianjur	79,07	80,00	80,48
12	Kab. Sukabumi	78,59	79,83	80,44
13	Kab. Cirebon	74,71	77,91	79,89
14	Kab. Majalengka	78,10	78,66	78,92
15	Kab. Kuningan	77,68	78,38	78,76
16	Kab. Subang	76,25	77,61	78,03
17	Kab. Indramayu	69,28	70,65	71,55
	<b>KOTA</b>			
18	Kota Cimahi	89,22	90,68	91,65
19	Kota Bekasi	88,28	90,00	91,01
20	Kota Depok	89,27	90,33	90,69
21	Kota Bandung	88,87	89,24	89,40
22	Kota Bogor	87,13	87,66	87,91
23	Kota Sukabumi	86,43	87,05	87,34
24	Kota Cirebon	85,11	85,88	86,23
25	Kota Tasikmalaya	84,95	85,72	85,97
26	Kota Banjar	81,77	82,95	83,59

### 3. Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

Tabel 21  
Realisasi dan Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  
Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Sumedang	7,65	8,35	8,77
2	Kab. Bandung	8,20	8,42	8,52
3	Kab. Bekasi	8,10	8,24	8,31
4	Kab. Bandung Barat	8,00	8,05	8,08
5	Kab. Bogor	7,20	7,64	7,85
6	Kab. Garut	7,10	7,35	7,46
7	Kab. Purwakarta	7,00	7,31	7,46
8	Kab. Subang	6,60	7,20	7,39
9	Kab. Cirebon	6,42	7,00	7,34
10	Kab. Ciamis	6,90	7,15	7,26
11	Kab. Karawang	6,68	7,02	7,22
12	Kab. Tasikmalaya	6,80	7,03	7,14
13	Kab. Majalengka	6,70	6,87	6,95
14	Kab. Kuningan	6,80	6,89	6,93
15	Kab. Cianjur	6,42	6,71	6,85
16	Kab. Sukabumi	6,39	6,66	6,80
17	Kab. Indramayu	5,50	5,68	5,77

	<b>KOTA</b>			
18	Kota Cimahi	10,26	10,92	11,35
19	Kota Bekasi	10,19	10,77	11,08
20	Kota Depok	10,50	10,85	11,01
21	Kota Bandung	10,10	10,26	10,33
22	Kota Bogor	9,60	9,82	9,92
23	Kota Cirebon	9,20	9,54	9,69
24	Kota Sukabumi	9,00	9,27	9,40
25	Kota Tasikmalaya	8,40	8,65	8,76
26	Kota Banjar	7,80	8,02	8,12

#### 4. Angka Melek Huruf

Tabel 22  
Realisasi dan Target Angka Melek Huruf (AMH)  
Per Kabupaten Dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Bandung	98,60	99,00	99,20
2	Kab. Garut	98,90	98,90	99,00
3	Kab. Tasikmalaya	98,80	98,90	98,90
4	Kab. Karawang	93,10	97,00	98,40
5	Kab. Bandung Barat	98,00	98,10	98,10

6	Kab. Sukabumi	96,60	97,60	98,00
7	Kab. Cianjur	97,20	97,60	97,90
8	Kab. Sumedang	97,50	97,70	97,80
9	Kab. Purwakarta	95,60	96,70	97,60
10	Kab. Ciamis	96,70	97,10	97,30
11	Kab. Cirebon	90,70	93,50	95,40
12	Kab. Majalengka	94,80	95,10	95,20
13	Kab. Bekasi	93,70	94,50	95,10
14	Kab. Kuningan	93,90	94,60	95,00
15	Kab. Bogor	93,60	94,50	94,90
16	Kab. Subang	92,40	92,40	92,40
17	Kab. Indramayu	85,60	87,00	88,10
	<b>KOTA</b>			
18	Kota Tasikmalaya	99,40	99,80	99,80
19	Kota Bandung	99,60	99,70	99,70
20	Kota Sukabumi	99,60	99,70	99,70
21	Kota Cimahi	99,60	99,60	99,60
22	Kota Bekasi	98,50	99,10	99,60
23	Kota Depok	93,90	99,30	99,30
24	Kota Bogor	98,70	98,80	98,80
25	Kota Banjar	96,70	97,70	98,30
26	Kota Cirebon	97,00	97,00	97,00

## 5. Indeks Kesehatan

Tabel 23  
Realisasi dan Target Indeks Kesehatan  
Per Kabupaten Dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Bekasi	72,90	74,52	75,59
2	Kab. Bogor	71,72	73,77	75,14
3	Kab. Subang	73,48	74,21	74,70
4	Kab. Bandung	73,10	73,50	73,77
5	Kab. Bandung Barat	72,63	72,81	72,94
6	Kab. Tasikmalaya	70,88	71,96	72,68
7	Kab. Indramayu	68,35	70,35	71,69
8	Kab. Sukabumi	69,05	70,61	71,66
9	Kab. Purwakarta	69,13	70,57	71,54
10	Kab. Kuningan	70,38	70,96	71,35
11	Kab. Ciamis	69,90	70,75	71,32
12	Kab. Sumedang	70,35	70,86	71,20
13	Kab. Karawang	68,50	70,02	71,05
14	Kab. Majalengka	68,03	69,35	70,23
15	Kab. Cianjur	67,15	68,88	70,03
16	Kab. Garut	66,33	68,33	69,66
17	Kab. Cirebon	66,75	67,36	67,77

	<b>KOTA</b>			
18	Kota Depok	79,75	80,32	80,72
19	Kota Tasikmalaya	73,55	75,35	76,56
20	Kota Sukabumi	73,20	74,49	75,35
21	Kota Bandung	74,35	74,61	74,79
22	Kota Bekasi	74,20	74,49	74,70
23	Kota Cimahi	73,40	73,75	73,98
24	Kota Bogor	72,80	73,25	73,55
25	Kota Cirebon	72,42	72,52	72,60
26	Kota Banjar	68,38	68,80	69,19

## 6. Angka Harapan Hidup

Tabel 24  
Realisasi dan Target Angka Harapan Hidup (AHH)  
per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Bekasi	68,74	69,71	70,36
2	Kab. Bogor	68,03	69,26	70,09
3	Kab. Subang	69,09	69,53	69,82
4	Kab. Bandung	68,86	69,10	69,26
5	Kab. Bandung Barat	68,58	68,69	68,76
6	Kab. Tasikmalaya	67,53	68,18	68,61

7	Kab. Indramayu	66,01	67,21	68,02
8	Kab. Sukabumi	66,43	67,37	67,99
9	Kab. Purwakarta	66,48	67,34	67,92
10	Kab. Kuningan	67,23	67,58	67,81
11	Kab. Ciamis	66,94	67,45	67,79
12	Kab. Sumedang	67,21	67,51	67,72
13	Kab. Karawang	66,10	67,01	67,63
14	Kab. Majalengka	65,82	66,61	67,14
15	Kab. Cianjur	65,29	66,33	67,02
16	Kab. Garut	64,80	66,00	66,79
17	Kab. Cirebon	65,05	65,41	65,66
	<b>KOTA</b>			
18	Kota Depok	72,85	73,19	73,43
19	Kota Tasikmalaya	69,13	70,21	70,94
20	Kota Sukabumi	68,92	69,69	70,21
21	Kota Bandung	69,61	69,76	69,87
22	Kota Bekasi	69,52	69,70	69,82
23	Kota Cimahi	69,04	69,25	69,39
24	Kota Bogor	68,68	68,95	69,13
25	Kota Cirebon	68,45	68,51	68,56
26	Kota Banjar	66,03	66,28	66,52

## 7. Indeks Daya Beli

Tabel 9.12  
Realisasi dan Target Indeks Daya Beli  
Per Kabupaten Dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Bandung	63,20	65,71	67,49
2	Kab. Sumedang	62,69	65,44	67,31
3	Kab. Bekasi	62,96	65,39	67,26
4	Kab. Purwakarta	62,53	65,07	66,96
5	Kab. Majalengka	62,07	64,94	66,91
6	Kab. Garut	63,54	65,37	66,80
7	Kab. Indramayu	62,72	64,96	66,63
8	Kab. Kuningan	62,27	64,75	66,54
9	Kab. Cirebon	61,66	64,18	65,87
10	Kab. Ciamis	62,01	64,23	65,81
11	Kab. Bandung Barat	62,21	64,24	65,58
12	Kab. Karawang	61,80	63,77	65,25
13	Kab. Bogor	61,87	63,28	64,42
14	Kab. Sukabumi	60,80	63,15	64,37
15	Kab. Tasikmalaya	62,19	63,52	64,32
16	Kab. Subang	61,55	62,98	64,08
17	Kab. Cianjur	58,26	60,20	61,67

	<b>KOTA</b>			
18	Kota Depok	66,07	67,76	69,03
19	Kota Bogor	65,55	67,34	68,68
20	Kota Cirebon	65,25	67,25	68,64
21	Kota Bekasi	64,69	66,44	67,80
22	Kota Sukabumi	62,90	65,49	67,47
23	Kota Bandung	62,82	65,42	67,36
24	Kota Cimahi	61,75	64,97	67,26
25	Kota Tasikmalaya	61,55	63,95	65,61
26	Kota Banjar	61,70	63,83	65,50

## 8. Daya Beli (Purchasing Power Parity)

Tabel 26  
 Realisasi dan Target Daya Beli Masyarakat (*Purchasing Power Parity/*  
 PPP)  
 Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Bandung	633,5	644,3	652,1
2	Kab. Sumedang	631,3	643,2	651,3
3	Kab. Bekasi	632,4	643,0	651,1
4	Kab. Purwakarta	630,6	641,6	649,8
5	Kab. Majalengka	628,6	641,0	649,5
6	Kab. Garut	635,0	642,9	649,0

7	Kab. Indramayu	631,4	641,1	648,3
8	Kab. Kuningan	629,5	640,2	647,9
9	Kab. Cirebon	626,8	637,7	645,0
10	Kab. Ciamis	628,3	637,9	644,8
11	Kab. Bandung Barat	629,2	638,0	643,8
12	Kab. Karawang	627,4	635,9	642,4
13	Kab. Bogor	627,7	633,8	638,8
14	Kab. Sukabumi	623,1	633,3	638,5
15	Kab. Tasikmalaya	629,1	634,9	638,3
16	Kab. Subang	626,3	632,5	637,3
17	Kab. Cianjur	612,1	620,5	626,9
	<b>KOTA</b>			
18	Kota Depok	645,9	653,2	658,7
19	Kota Bogor	643,7	651,4	657,2
20	Kota Cirebon	642,3	651,0	657,0
21	Kota Bekasi	639,9	647,5	653,4
22	Kota Sukabumi	632,2	643,4	652,0
23	Kota Bandung	631,8	643,1	651,5
24	Kota Cimahi	627,2	641,1	651,1
25	Kota Tasikmalaya	626,4	636,7	643,9

## 9. Angka Kematian Bayi

Tabel 27  
Realisasi dan Target Angka Kematian Bayi  
Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Cirebon	50,35	48,72	47,63
2	Kab. Ciarnis	48,07	45,53	43,84
3	Kab. Bandung Barat	42,14	41,60	41,23
4	Kab. Garut	49,47	44,40	41,04
5	Kab. Karawang	45,40	41,64	39,04
6	Kab. Kuningan	40,97	39,44	38,43
7	Kab. Indramayu	47,47	41,98	38,34
8	Kab. Tasikmalaya	43,33	40,24	38,19
9	Kab. Cianjur	44,33	40,24	37,53
10	Kab. Majalengka	42,05	38,99	36,96
11	Kab. Sumedang	38,11	36,82	35,96
12	Kab. Subang	39,11	37,15	35,85
13	Kab. Sukabumi	41,87	37,96	35,36
14	Kab. Bekasi	42,34	37,84	34,85
15	Kab. Purwakarta	39,09	35,71	33,47
16	Kab. Bandung	41,63	34,50	31,75
17	Kab. Bogor	38,14	32,59	28,91

	<b>KOTA</b>			
18	Kota Banjar	41,10	39,75	38,85
19	Kota Bandung	34,46	33,77	33,31
20	Kota Cirebon	31,06	30,81	30,64
21	Kota Tasikmalaya	38,06	33,22	30,01
22	Kota Cimahi	30,54	29,80	29,31
23	Kota Bekasi	30,21	29,56	29,12
24	Kota Sukabumi	30,28	27,61	25,84
25	Kota Bogor	25,64	24,87	24,36
26	Kota Depok	26,84	25,12	23,97

## 10. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 28  
Realisasi dan Target Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)  
Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Ciamis	2,66	2,51	2,46
2	Kab. Bandung Barat	2,53	2,42	2,40
3	Kab. Bandung	2,57	2,41	2,37
4	Kab. Bekasi	2,17	2,16	2,15
5	Kab. Garut	2,15	2,12	2,08
6	Kab. Sumedang	1,97	1,93	1,89

7	Kab. Kuningan	1,96	1,89	1,86
8	Kab. Karawang	1,88	1,81	1,78
9	Kab. Bogor	1,99	1,68	1,41
10	Kab. Purwakarta	1,46	1,39	1,38
11	Kab. Cirebon	1,38	1,31	1,30
12	Kab. Tasikmalaya	1,25	1,21	1,19
13	Kab. Subang	1,19	1,07	1,05
14	Kab. Indramayu	0,91	0,90	0,89
15	Kab. Sukabumi	0,83	0,78	0,77
16	Kab. Cianjur	0,97	0,82	0,76
17	Kab. Majalengka	0,53	0,52	0,51
	<b>KOTA</b>			
18	Kota Cirebon	2,94	2,64	2,59
19	Kota Cimahi	2,53	2,39	2,33
20	Kota Bekasi	2,09	2,04	2,02
21	Kota Banjar	2,12	2,03	1,99
22	Kota Tasikmalaya	2,02	1,97	1,92
23	Kota Sukabumi	1,70	1,59	1,49
24	Kota Depok	1,28	1,21	1,18
25	Kota Bogor	1,18	1,10	1,07
26	Kota Bandung	1,09	1,02	0,99
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>1,71</b>	<b>1,22</b>	<b>1,12</b>

## 11. Kemiskinan

Tabel 29  
Realisasi dan Target Kemiskinan  
Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Cirebon	20,25	17,05	15,55
2	Kab. Indramayu	19,75	16,74	14,94
3	Kab. Sumedang	15,18	13,27	12,33
4	Kab. Kuningan	16,75	14,02	12,18
5	Kab. Majalengka	18,79	14,14	11,14
6	Kab. Garut	17,87	13,51	10,87
7	Kab. Bandung Barat	17,61	12,13	9,47
8	Kab. Karawang	14,00	10,51	8,19
9	Kab. Subang	15,15	10,65	7,45
10	Kab. Bogor	12,11	8,97	6,97
11	Kab. Cianjur	15,38	9,91	5,88
12	Kab. Ciamis	12,32	7,69	4,42
13	Kab. Purwakarta	11,61	7,65	4,05
14	Kab. Tasikmalaya	14,70	8,33	3,58
15	Kab. Bekasi	5,89	4,60	3,50
16	Kab. Sukabumi	13,26	7,54	3,47
17	Kab. Bandung	9,42	3,83	1,54

	<b>KOTA</b>			
18	Kota Cirebon	14,11	11,92	11,32
19	Kota Tasikmalaya	26,08	13,43	8,37
20	Kota Bogor	9,72	8,64	8,20
21	Kota Sukabumi	10,41	8,45	6,45
22	Kota Cimahi	8,35	6,10	5,10
23	Kota Banjar	9,31	6,38	4,12
24	Kota Bekasi	6,36	4,62	3,46
25	Kota Bandung	4,42	4,28	3,05
26	Kota Depok	2,69	2,35	2,06

## 12. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 30  
Realisasi dan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Per Kabupaten dan Kota

No	Kabupaten/Kota	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>Kabupaten</b>			
1	Kab. Ciamis	4,94	6,80	7,90
2	Kab. Karawang	6,93	7,06	7,68
3	Kab. Purwakarta	4,99	6,49	7,61
4	Kab. Bandung	5,30	6,86	7,38
5	Kab. Bogor	5,58	6,69	7,06
6	Kab. Indramayu	2,14	4,81	6,29

7	Kab. Garut	4,69	5,68	6,26
8	Kab. Bekasi	6,07	6,18	6,23
9	Kab. Cianjur	4,04	5,25	5,95
10	Kab. Cirebon	4,91	5,60	5,83
11	Kab. Sumedang	4,58	5,28	5,69
12	Kab. Majalengka	4,57	5,18	5,49
13	Kab. Bandung Barat	5,08	5,39	5,44
14	Kab. Subang	4,74	5,01	5,15
15	Kab. Kuningan	4,28	4,61	4,82
16	Kab. Sukabumi	3,89	4,16	4,25
17	Kab. Tasikmalaya	4,02	4,14	4,15
	<b>Kota</b>			
18	Kota Bandung	7,83	7,97	7,97
19	Kota Depok	6,65	6,78	6,78
20	Kota Sukabumi	6,23	6,32	6,32
21	Kota Bekasi	6,07	6,19	6,19
22	Kota Bogor	6,03	6,05	6,05
23	Kota Cirebon	5,54	5,75	5,75
24	Kota Tasikmalaya	5,11	5,40	5,40
25	Kota Cimahi	4,82	4,89	4,89
26	Kota Banjar	4,71	4,78	4,78

### 13. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 31  
Realisasi dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Per Kabupaten Dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Bandung Barat	16,24	-	-
2	Kab. Bandung	15,09	14,97	14,35
3	Kab. Karawang	15,23	14,71	14,15
5	Kab. Bekasi	13,29	12,59	12,42
6	Kab. Cirebon	13,36	11,03	10,45
7	Kab. Bogor	13,60	10,97	10,31
8	Kab. Kuningan	9,58	9,12	9,01
9	Kab. Sumedang	8,96	8,50	8,38
4	Kab. Indramayu	10,05	8,55	7,44
10	Kab. Subang	9,27	7,77	7,40
11	Kab. Purwakarta	11,89	7,18	6,00
12	Kab. Majalengka	7,13	6,21	5,57
13	Kab. Cianjur	11,73	6,69	5,43
14	Kab. Sukabumi	8,94	6,98	4,98
15	Kab. Tasikmalaya	8,02	5,91	4,81
16	Kab. Garut	10,98	4,73	3,17
17	Kab. Ciamis	6,00	3,32	2,25
	<b>KOTA</b>			
18	Kota Sukabumi	15,02	14,94	13,60
19	Kota Bekasi	13,28	12,46	12,25

20	Kota Bogor	18,52	12,74	11,30
21	Kota Bandung	15,27	11,84	10,98
22	Kota Cimahi	14,17	11,90	9,43
23	Kota Depok	10,11	9,33	8,22
24	Kota Tasikmalaya	10,87	9,07	7,76
25	Kota Cirebon	14,2	7,12	5,35
26	Kota Banjar	10,24	3,98	0,49

#### 14. PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 (tanpa migas)

Tabel 32  
Realisasi dan Target PDRB per kapita ADH konstan 2000 (tanpa migas)  
Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2008	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Bekasi	20.701.931,73	20.895.468,00	20.960.624,00
2	Kab. Karawang	8.113.107,77	8.207.672,00	8.276.896,00
3	Kab. Purwakarta	7.912.121,17	8.007.394,00	8.043.192,00
4	Kab. Bogor	6.351.126,28	6.473.476,00	6.497.968,00
5	Kab. Bandung	6.331.554,66	6.429.372,00	6.461.978,00
6	Kab. Sumedang	4.756.336,58	4.888.308,00	4.917.744,00
7	Kab. Bandung Barat	4.745.323,77	4.872.762,00	4.897.016,00
8	Kab. Subang	4.210.014,60	4.461.975,87	4.540.968,41

9	Kab. Ciamis	4.308.951,33	4.402.216,00	4.436.288,00
10	Kab. Garut	4.296.634,63	4.376.110,00	4.401.480,00
11	Kab. Indramayu	4.032.533,37	4.105.972,00	4.141.296,00
12	Kab. Tasikmalaya	3.481.502,52	3.680.984,00	3.876.312,00
13	Kab. Cianjur	3.481.030,88	3.561.794,03	3.609.241,84
14	Kab. Kuningan	3.492.871,97	3.571.862,00	3.595.816,00
15	Kab. Cirebon	3.401.195,34	3.560.020,00	3.583.360,00
16	Kab. Majalengka	3.376.805,76	3.469.920,00	3.496.560,00
17	Kab. Sukabumi	3.259.200,57	3.434.545,84	3.470.300,73
	<b>KOTA</b>			
18	Kota Cirebon	19.905.550,70	20.456.062,00	20.641.416,00
19	Kota Bandung	11.690.806,37	12.465.583,26	12.914.573,50
20	Kota Cimahi	10.855.031,77	11.036.092,00	11.081.456,00
21	Kota Bekasi	6.184.522,75	6.422.749,71	6.493.347,87
22	Kota sukabumi	6.090.194,70	6.168.468,00	6.224.624,00
23	Kota Bogor	4.867.354,49	5.011.528,00	5.048.704,00
24	Kota Banjar	4.011.889,41	4.089.334,00	4.119.112,00
25	Kota Depok	3.850.653,20	4.019.018,00	4.042.024,00
26	Kota Tasikmalaya	3.941.893,39	3.997.374,00	4.029.832,00

## 15. Kawasan Lindung

Tabel 33  
Realisasi dan Target Capaian Kawasan Lindung  
Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	REAL- ISASI	PROYEKSI	
		2010	2011	2013
	<b>KABUPATEN</b>			
1	Kab. Garut	64.3	66.44	70.72
2	Kab. Bandung	58.9	60.36	63.23
3	Kab. Tasikmalaya	54.4	55.68	58.15
4	Kab. Cianjur	47.0	48.37	51.20
5	Kab. Bandung Barat	39.9	42.04	46.36
6	Kab. Subang	9.0	40.59	43.77
7	Kab. Sukabumi	39.6	40.96	43.76
8	Kab. Purwakarta	38.3	39.67	42.50
9	Kab. Ciamis	35.0	35.93	37.81
10	Kab. Bogor	32.4	33.68	36.26
11	Kab. Sumedang	28.8	31.09	35.66
12	Kab. Kuningan	32.0	32.90	34.76
13	Kab. Majalengka	27.0	28.56	31.60
14	Kab. Karawang	9.6	10.78	13.09
15	Kab. Indramayu	3.8	4.29	5.35

16	Kab. Bekasi	0.9	1.59	2.92
17	Kab. Cirebon	2.1	2.14	2.31
	<b>KOTA</b>			
18	Kota Tasikmalaya	9.9	10.17	10.68
19	Kota Sukabumi	9.0	9.47	10.35
20	Kota Banjar	7.2	7.38	7.67
21	Kota Cimahi	5.9	6.21	6.80
22	Kota Bandung	3.8	4.32	5.37
23	Kota Bogor	1.9	1.92	2.02
24	Kota Depok	-	0.00	0.01
25	Kota Cirebon	-	-	-
26	Kota Bekasi	-	-	-

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, 2008, "Pengembangan Wilayah : Konsep dan Teori", Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rijanta, R., dkk, 2005, "Ilmu Wilayah (GPW 1102)", bahan kuliah, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rustiadi, Ernani, dkk, 2007, "Perencanaan dan Pengembangan Wilayah", Crestpent Press, P4W-LPPM IPB, Bogor.
- Tarigan, Robinson, 2009, "Perencanaan Pembangunan Wilayah", Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Djunaedi, Ackhmad, 2002, Bahan Kuliah TKP 622-Metode dan Teknik Perencanaan II, Program MPKD, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta
- Kuncoro, Mubyarto, 2001, Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, Analisis Spasial dan regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah, dan Kebijakan, UPP AMP YPKN
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengumpulan Data dan Informasi serta Rencana Tata Ruang
- Tarigan, Robinson, 2008, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Perencanaan Pembangunan, PT Toko Gunung Agung, Jakarta